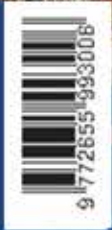


Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next



Edisi 32  
Agustus 2021



# 20<sup>TH</sup>

## Indonesia Terkoneksi

# KOMINFO

# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Mira Tayyiba

**Wakil Pengarah:**  
Phillip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Ferdinandus Setu

**Wakil  
Pemimpin Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan  
M. Taufiq Hidayat  
Verawati  
Annisa Bonita P.  
Walbertus Natalius W.  
Primus A Latu B.

**Reporter:**  
Yusuf  
Ahmad Irso Kubangun  
Meita Pusparini  
Emild Kadju

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono  
Doni Paulus Sumule  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka  
Rahma Aulia Indroputri  
Lamdza Rachmattunisa  
Dhenty Febrina Sahara

**Produksi:**  
Fahmi Trihatin J.

**Alamat Redaksi:**  
Biro Humas Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 9, Jakarta Pusat

# Dua Dekade Kominfo

Salam sehat dan selalu sehat, para pembaca Majalah Kominfo Next! Masih dalam semangat kemerdekaan, izinkan kami mengucapkan Dirgahayu ke-76 tahun Republik Indonesia. 76 tahun untuk Indonesia merdeka kesehatan, merdeka ekonomi, merdeka dari hoaks, disinformasi dan tentu saja merdeka dari pandemi Covid-19 berikut badai krisis dan bentuk ancaman lainnya.

Dua bulan berturut-turut: Agustus dan September menjadi bulan yang spesial bagi kami Civitas Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Tim Majalah Kominfo Next. Selain turut memeriahkan hari kemerdekaan, kami juga siap menyambut hari ulang tahun Kementerian Kominfo yang genap berusia 20 tahun tepat di bulan September 2021.

Kementerian Kominfo telah melewati beberapa fase dan dinamika panjang yang turut serta menghantarkan perjalanan bangsa ini. Sejak Departemen Penerangan (Deppen) dilikuidasi Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999. Lebih dari setahun setelahnya, nomenklatur lembaga baru menandai cikal bakal lahirnya Kementerian Kominfo berawal dari dibentuknya Lembaga Informasi Nasional (LIN). Kemudian, berganti nama menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat Kemeneg Kominfo di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada September tahun 2001.

Saat peralihan kekuasaan nasional dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kemeneg Kominfo berubah nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), yang menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional dan Ditjen Postel Departemen Perhubungan. Dalam perjalanan waktu, Departemen Kominfo bersalin nama menjadi Kementerian Kominfo, hingga sekarang ini.

Kami selalu percaya adagium klasik ini: Jangan lupakan sejarah (Jas Merah). Menurut kami,

## Selamat membaca!

**Ferdinandus Setu**  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

 @FSetu  @FSetu  FSetu TV

Menyimpan memori sejarah lahirnya Kominfo menjadi penting dan akan sangat penting tidak hanya bagi para civitas, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum. Lahirnya lembaga negara ini telah memberikan banyak perubahan yang signifikan bagi Indonesia seiring perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Atas inisiatif Sekretaris Jenderal Ibu Mira Tayyiba, kami telah menggelar 5 seri *Focus Group Discussion* secara virtual yang menghadirkan pejabat Kementerian Kominfo pada eranya. Mereka adalah pejabat eselon I yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal, Direktur-direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri hingga jabatan strategis lainnya.

Animo dan rasa kecintaan karena menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Kominfo, tidak saja datang dari pejabat eselon. Sebuah kebanggaan besar dan rasa syukur kami Dua Dekade Kominfo, kami kemas juga dalam acara Temu Kangen Menteri yang menghadirkan 4 mantan Menteri dan Menteri Kominfo saat ini.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Sofyan Djalil (Menkominfo RI 2004-2007), Bapak Muhammad Nuh (Menkominfo RI 2007-2009), Bapak Tifatul Sembiring (Menkominfo RI 2009-2014), Bapak Rudiantara (Menkominfo RI 2014-2019), dan Bapak Johnny G. Plate (Menkominfo RI).

Dua Dekade Kominfo. Sebuah perjalanan, juga pencapaian. Dalam terminologi bahasa Yunani "waktu" dikenal sebagai kronos dan kairos. Kronos berarti waktu yang berjalan linear kronologis, seperti menit ke menit, jam ke jam, hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Sedangkan waktu sebagai kairos dimaknai waktu sebagai sebuah jejak pencapaian, kualitas peristiwa yang telah dilewati lembaga ini dalam dua puluh tahun terakhir. Dari aspek kronos dan kairos, jejak perjalanan 20 tahun Kominfo perlu ditulis dan disajikan kepada publik. Karena itu, kami persembahkan edisi khusus Majalah Kominfo Next edisi khusus: Dua Dekade Kominfo untuk Indonesia.

Doa kami keluarga besar Kementerian Kominfo untuk Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju.

# Daftar

# Isi

---

2 Surat dari MMB 9

4 Resensi Buku

10 Kabar Istana

28 Jejak Sejarah

30 Liputan Khusus

84 Dari Balik Layar

108 Dari Stakeholders

116 Liputan Khusus

120 Jurnal Foto

126 Kisah Lensa

130 Kemerdekaan Digital

138 Lomba Virtual Medsos

142 Rumah Digital Indonesia

148 Kominfo Daerah

164 OpiNext

166 Lintas Kominfo

172 Top 10 Hoaks



# Lead or Leave It to Millennials

## Menumbuhkan Milenial menjadi Pemimpin Sejati

**Lida Noor Meitania,**

Pranata Humas Ahli Muda

Subkoordinator Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial, Ditjen IKP

**B**uku ini menarik dibaca karena saat ini, populasi generasi milenial dalam sebuah organisasi atau institusi telah mencapai rata-rata 50 persen hingga 60 persen. Diperkirakan jumlah populasi mereka di perusahaan akan terus tumbuh hingga menyentuh angka 75 persen pada tahun 2025. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk mengelola para milenial ini? Bagaimana menjadi pemimpin yang andal di masa depan sementara milenial memiliki karakter dan cara kerja yang berbeda dari generasi lama pada umumnya?

Buku *Lead or Leave It to Millennials* berisi seluk-beluk manajemen dan kepemimpinan yang melibatkan para milenial, bukan saja sebagai karyawan baru, tapi juga sebagai kader pemimpin andal. Selain itu, buku karya Jazak Yus Afriansyah ini juga menyajikan pengetahuan dan ide segar tentang konsep dasar kepemimpinan, pengembangan individu, dan penerapan kepemimpinan dalam aktivitas bisnis di era milenial.







**Penulis :** Jazak Yuz  
**Penerbit :** Grasindo

Dalam buku ini, penulis mendefinisikan kepemimpinan (*leadership*) sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Mempengaruhi sendiri bisa berarti positif dan negatif. Sebagai contoh ekstrim, Adolf Hitler menghabiskan dirinya sebagai *fuhrer* gerakan NAZI Jerman. Hitler membangun pengaruh kuat yang mencengkeram rakyat Jerman dan menebarkan rasa takut dan ancaman. Tujuannya adalah menguasai benua eropa dengan cara yang sangat diskriminatif dan sadis, termasuk dengan berperang. Berbeda dengan Hitler, Gandhi adalah Bapak Bangsa India. Ia berkenan membagikan pelajaran sekaligus keteladanan dengan membangun kekuatan pribadi dahulu, kemudian berbanding lurus dengan membangun rasa hormat, sehingga pengaruh atau kepemimpinan yang disembarkannya dengan segera dan kuat diikuti oleh hampir seluruh rakyat India dan memerdekakan rakyat India tanpa perang.

Peran utama seorang pemimpin adalah bertanggung jawab pada pengembangan orang, organisasi, dan bisnis. Strategi dan rencana yang hebat akan menjadi macan ompeng atau macan kertas jika tidak dieksekusi oleh seluruh karyawan. Menurut David Rock dalam bukunya yang berjudul *Quiet Leadership: Enam Langkah*

Mengubah Kinerja Demi Kesuksesan Perusahaan Anda, *Quiet Leadership* adalah kepemimpinan yang mampu meningkatkan pemikiran orang lain tanpa memberitahukan hal yang harus dilakukan. *Quiet Leadership* akan membantu para pemimpin meningkatkan pemikiran orang lain, yang merupakan tempat terbaik untuk memulai meningkatkan kinerja.

Penulis buku ini mengelompokkan lima tipe kepemimpinan, yaitu *Inspiring Leader*, *Autocratic Leader*, *Democratic Leader*, *Service Leader*, dan *Situational Leadership*.

### Inspiring Leader

*Inspiring Leader*, seperti kisah heroik Alexander Agung (*Alexander The Great*) dalam perjalanan menaklukkan negeri-negeri yang belum ia kuasai di kawasan anak benua India. Di Indonesia ada Nadiem Makarim. Ia menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang relevan di kondisi yang dinamis dan penuh dengan distraksi. Karakternya yang inovatif dan pantang menyerah persis seperti Alexander Agung.



### Autocratic Leader



Tipe kepemimpinan ini otoriter, digunakan secara absolut oleh institusi militer, namun ada juga pemimpin di lingkungan bisnis dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Pemimpin tipe ini tidak melibatkan apalagi bertanya kepada anak buahnya tentang keputusan yang akan diambil.

Namun mengandalkan dan mengutamakan aspek rasional dan logika daripada sisi emosional. Contohnya Lee Kuan Yew saat memimpin Singapura setelah memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Ia membuat dan menerapkan hukuman tegas dan keras bagi pelanggarnya. Ini mengubah masyarakat Singapura yang tadinya tidak disiplin dan suka buang sampah sembarangan.

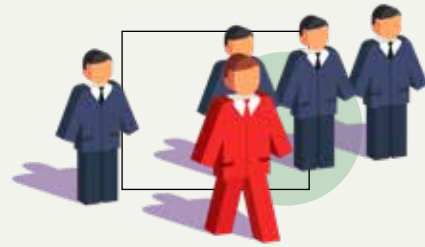
## Democratic Leader

Cirinya adalah sang pemimpin memberikan kesempatan secara terukur kepada yang dipimpin untuk berpartisipasi mengatasi keadaan dan mengambil keputusan.

Di era Presiden Soekarno, hampir setiap tiga hingga empat bulan terjadi *reshuffle* kabinet dan pergantian perdana menteri. Gaya kepemimpinan ini menciptakan instabilitas negara, hingga memuncak kepada pemberontakan di berbagai daerah dan kudeta yang gagal oleh partai berhaluan komunis. Intinya, jika tidak dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, hanya akan menimbulkan banyak bencana daripada manfaat.



## Service Leader



Pada dasarnya pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya atau anggota tim. Pemimpin yang mengutamakan pelayanan terhadap anak buahnya mendapatkan penghormatan yang tinggi dari pengikut sehingga sang pemimpin dengan mudah memberikan pengaruhnya. Contohnya para pemimpin spiritual seperti para rasul, nabi, wali, dan alim ulama. Keinginan melayani dan membantu muncul secara alami. Setelah itu, barulah keinginan memimpin muncul mengikuti.



## Situational Leadership

Model kepemimpinan ini mengedepankan pendekatan situasi yang dihadapi seorang pemimpin terhadap masing-masing anggota tim yang dipimpin. Fokusnya pada tugas dan tanggung jawab. Pemimpin melakukan proses memimpin untuk memastikan seluruh anggota timnya mau dan mampu melaksanakan tugasnya. Perbedaan situasi didasarkan atas perbandingan dua aspek yang berpengaruh pada kinerja karyawan, yaitu komitmen dan kompetensi.





Penulis buku ini mengklasifikasikan situasi karyawan berdasarkan empat kuadran, yaitu D1: *Low Competence High Commitment*, D2: *Low-Some Competence Low Commitment*, D3: *Moderate-High Competence Variable Commitment*, D4: *High Competence High Commitment*.

**D1: Low Competence High Commitment.** Karyawan yang memiliki kompetensi rendah dengan komitmen yang tinggi, biasanya terjadi pada anak buah yang baru memasuki dunia kerja, atau mereka yang baru saja dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**D2: Low-Some Competence Low Commitment.** Karyawan yang memiliki kompetensi rendah sedikit tinggi dan mempunyai komitmen yang rendah. Kondisi ini sering dialami mereka setelah beberapa saat memulai karier. Kondisi ini terjadi akibat adanya jarak antara idealisme mereka di dunia akademis dengan kenyataan di dunia kerja.

**D3: Moderate-High Competence Variable Commitment.** Karyawan pada kuadran ini memiliki kompetensi yang sedang mendekati tinggi, karena mereka telah memiliki masa kerja di atas 3 tahun, sehingga telah terpapar dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang meskipun masih belum bisa disebut lama.

**D4: High Competence High Commitment.** Ini adalah kuadran situasi impian setiap pemimpin, karyawan memiliki kompetensi yang tinggi dan ditunjang dengan komitmen yang tinggi juga. Mereka disebut dengan *star performer*. Namun, berdasarkan pengalaman empiris, jumlah karyawan di kuadran ini hanya 12-20% saja dari keseluruhan anggota tim. Inilah tantangannya pemimpin untuk mempertahankan dan mengembangkan karyawan pada kondisi D4, sekaligus meningkatkan presentase karyawan di kuadran lain agar masuk kuadran ini.

Ada empat gaya kepemimpinan dalam **Situational Leadership**, yaitu S1 *High Directive and Low Supportive Behavior*, S2 *High Directive and High Supportive Behaviour*, S3 *Low Directive and High Supportive Behaviour*, S4 *Low Directive and Low Supportive Behaviour*.

Dalam situasi D1, dianjurkan pemimpin memberikan lebih banyak arahan (*directing*). Untuk situasi D2, pemimpin didorong untuk mulai melakukan *coaching* atau melatih karyawan. Pemimpin tetap diminta memberikan arahan, dengan dukungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pada situasi D1. Menghadapi karyawan situasi D3, pemimpin harus bergerak menyesuaikan gaya kepemimpinan menjadi *supporting* atau mendukung. Sedangkan menghadapi situasi D4, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya menjadi *delegating* atau memberikan delegasi (penyerahan sebagian tugas) kepada karyawan pada situasi D4. Jika pemimpin terlambat atau gagal mengantisipasi anggota tim yang sudah berkembang di D4, maka karyawan tersebut akan keluar dari tim.

Berbagai macam gaya kepemimpinan tersebut pada dasarnya adalah saling melengkapi satu sama lain. Agar bisa dilaksanakan, ada dua keahlian dasar memimpin (*fundamental leadership skill*) yang wajib dimiliki, yaitu *coaching skill* dan *counselling skill*. Dengan *coaching* dan *counselling* anggota tim dari milenial menjadi lebih mandiri, kreatif, dan konsisten berkontribusi terhadap pengembangan organisasi maupun bisnis.

Penulis buku ini juga memberikan studi kasus dalam melaksanakan *coaching*. Bagaimana jika *coaching* terhadap karyawan *trouble maker* tidak berhasil? Langkah apa yang dilakukan? Buku setebal 162 halaman ini menjelaskan keahlian dasar memimpin dengan cara yang mudah dipahami, bukan seperti modul diklat kepemimpinan.

Buku ini layak dibaca oleh para pemimpin dan calon pemimpin di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lingkungan kerja lainnya untuk menemukan cara yang tepat mengelola para milenial, menjadi pemimpin yang andal di masa depan sementara milenial memiliki karakter dan cara kerja yang berbeda dari generasi lama pada umumnya.

Baca buku itu mudah dan menyenangkan. Saya pinjam secara daring melalui aplikasi Ruang Buku Kominfo dari Perpustakaan Kominfo. Sama dengan peminjaman buku langsung ke perpustakaan Kominfo, buku ini hanya ada dua eksemplar. Pinjam bukunya pun terbatas selama 14 hari. Jika sudah sampai batas waktu peminjaman buku, secara otomatis akan hilang dari aplikasi di perangkat kita. Jangan khawatir, bukunya masih bisa dipinjam kembali. Tapi, jika ingin punya buku terbitan Gramedia Widiasarana Indonesia ini secara fisik bisa diperoleh di toko buku kesayangan dengan harga sekitar Rp50.000,00.





# Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo

Ruang Buku Kominfo adalah Akses Koleksi Digital Perpustakaan Kementerian Kominfo

1



Kirimkan nama, NIP, e-mail, & satuan kerja ke:

[perpustakaan@mail.kominfo.go.id](mailto:perpustakaan@mail.kominfo.go.id)

Subjek Email :  
Pendaftaran Ruang  
Buku Kominfo

2



Akan ada e-mail balasan dari perpustakaan kominfo berupa username/email dan password

3



Unduh "Ruang Buku Kominfo" di playstore/ appstore



4 Masukan username/email dan password



5 Klik buku yang ingin anda pinjam lalu klik pinjam



6 Selamat menikmati layanan EPerpustakaan

Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :  
Agung (0813-8336-4421)



# Pidato Presiden Republik Indonesia

*Pada Sidang Tahunan MPR  
& Sidang Bersama DPR dan  
DPD dalam Rangka Hut Ke-76  
Proklamasi Kemerdekaan  
Republik Indonesia*

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Selamat Pagi,*

*Salam Sejahtera bagi kita semua,*

*Om Swastyastu,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam Kebajikan*

Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma'ruf Amin;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati, Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati, Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri;

Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik,

Yang saya hormati hadirin, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,



Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan.

Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah.

Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan.







Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape-etape ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka, juga berhasil kita lampau. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita.

Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu.

Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya Pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas.

Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.

Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.

Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.

Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam *testing, tracing, treatment* dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh.

Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.

Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini.

Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya muliakan,

Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.



Sumber Foto : Antara Foto

Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.





Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendorong perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita.

Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, *Online Single Submission*, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan

insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok

global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan



mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.

Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya Lembaga-lembaga Negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan

kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini.

Saya mengapresiasi para anggota MPR RI, dengan Program Empat Pilarnya, yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.

Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19.

Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan

Sumber Foto : Antara Foto





pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Walaupun di era pandemi, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda, bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan-elektronik, *e-Court*, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi, yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara Pilkada, tetap membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi

penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah terselesaikan.

Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini, dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Kita jaga kesehatan kita, disiplinkan diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu. Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman Covid-19, selama masih ada yang menderitanya.

Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi Covid-19 ini. Saya juga menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridai dan mempermudah upaya bangsa Indonesia, dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka!

Terima kasih,

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

*Namo Buddhaya.*

Jakarta, 16 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

# Pidato Presiden Republik Indonesia

*Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah  
Atas Rancangan Undang-Undang Tentang  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022  
Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Selamat Pagi,*

*Salam Sejahtera bagi kita semua,*

*Om Swastyastu,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam Kebajikan.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Sampai saat ini, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan

pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau *countercyclical*, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.





Hadirin yang saya muliakan,

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Sumber Foto : Antara Foto



Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. *Lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga



melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau *spending better*, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil.

Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023.



Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,  
 Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting* untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat energi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.





Hadirin yang saya muliakan, Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan *testing*, *tracing*, dan *treatment*, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.

Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan,

peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN.

Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang diarahkan pada: Melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan

bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.

Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal:

Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak; Pemerataan sarana prasarana pendidikan; serta menyelesaikan *mismatch* pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan *teaching industry*, serta pelaksanaan program merdeka belajar.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain: mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau *blended finance* akan terus dilakukan.

Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat.

Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang difokuskan pada: meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas; meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome*, serta mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.





Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan *quality control* terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan.

Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.



Sementara itu, upaya peningkatan PNBPN terus dilakukan, melalui: perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBPN dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan PNBPN; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBPN; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,  
Defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap Produk Domestik Bruto.

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali.

Hadirin yang saya muliakan,  
Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan rida-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!  
Dirgahayu Negeri Pancasila!  
Merdeka!

Terima kasih,  
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi  
Wabarakaatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Nama Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA





# 20 Tahun

## Perjalanan Kementerian Kominfo

“A generation which ignores history has no past and no future”.

### 2001

#### Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi

Kominfo lahir berdasarkan Keppres 288/M tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong

Keppres 101/2001 tanggal 13 September 2001 adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara.

### 2003

Terbitnya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang e-Government

### 2002

Lahirnya UU Penyiaran

### 2021

**18 Agustus 2021**

Groundbreaking satelit bumi SATRIA-1

### 2018

Perubahan nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)

**2001 - 2004**

Dipimpin oleh

**Sjamsul Mu'arif**

Membawa Kominfo untuk melewati masa transisi dari Departemen Penerangan menuju ke era baru informasi

**2004 - 2007**

Dipimpin oleh

**Sofyan A. Djalil**

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Kementerian Kominfo dengan meluncurkan program beasiswa untuk para pegawai

**2007 - 2009**

Dipimpin oleh

**Mohammad Nuh**

Menyelesaikan penyusunan dua undang-undang yang berperan besar di bidang informasi dan digital, yaitu UU Nomor 11/2008 tentang ITE dan UU Nomor 14/2008 tentang KIP



# 2005

## Departemen Komunikasi dan Informatika

### 31 Januari 2005

**Berganti nama** atas dasar Perpres No. 9/2005 pada masa Kabinet Indonesia Bersatu

**Ditandai** dengan bergabungnya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Ditjen Postal Departemen Perhubungan

### 7 Februari 2005

- Penambahan tugas Badan Informasi Publik

## 2006

Penerimaan CPNS Depkominfo angkatan pertama

## 2008

Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

## 2010

### 14 April 2010

Melengkapi struktur organisasi s/d tingkat Eselon 1

### 28 Oktober 2010

**Terbitnya** Permenkominfo No. 17/2010 yang mencerminkan paradigma baru kebijakan komunikasi

**Menempatkan** informasi sebagai kebutuhan masyarakat

**Menandai** lahirnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

# 2009

## Kementerian Komunikasi dan Informatika

### 3 November 2009

Pembentukan Kementerian Kominfo berdasarkan Perpres 47/2009

2009 - 2014  
Dipimpin oleh

### Tifatul Sembiring

Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi yang memberikan kontribusi bagi pembangunan

2014 - 2019  
Dipimpin oleh

### Rudiantara

Percepatan implementasi Palapa Ring sebagai proyek pertama di bidang TIK yang menggunakan skema KPBU

2019 - Sekarang  
Dipimpin oleh

### Johnny G. Plate

Berhasil memperjuangkan status Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group pada Presidensi Indonesia G20





# 20TH KOMINFO

Indonesia  
Terkoneksi



# 20 Tahun Kementerian Kominfo

## Torehan Sejarah 6 Menteri

Komunikasi dan informatika merupakan dua sektor penting yang turut serta menghantarkan perjalanan bangsa ini. Berbagai kebijakan dan regulasi terus dilakukan untuk mewujudkan transformasi digital nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam melewati tantangan transformasi digital itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berdiri paling depan untuk memastikan bahwa komitmen Indonesia untuk menjadi bangsa digital dilakukan bersama seluruh lapisan masyarakat, untuk akselerasi pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, masyarakat digital.

Pertama kali dibentuk pada era pemerintahan Presiden Megawati di tahun 2001, Kementerian Kominfo mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan organisasi dari masa ke masa. Lahir dengan nama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada 13 September 2001, kementerian ini mengemban tugas yang menitikberatkan pada kebijakan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang informasi dan komunikasi.

Sejak saat itu, Kementerian Kominfo terus mengalami perubahan bentuk lembaga serta penyesuaian struktur organisasi, yang berpengaruh pada tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja di dalamnya. Pada tahun 2004, terjadi penggabungan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, serta Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang semula berada di Departemen Perhubungan, bergabung menjadi satu membentuk Departemen Komunikasi dan Informatika.

Seiring berkembangnya dunia komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo pun melakukan perubahan paradigma baru kebijakan komunikasi yang menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar 'penerangan', namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik.

Bergabungnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, semakin memperkaya tugas dan fungsi departemen ini, terutama pada aspek teknis pengelolaan spektrum frekuensi dan tata kelola telekomunikasi. Aspek teknis ini bersanding dengan tugas baru yang disematkan yang berkaitan dengan dunia telematika Indonesia yang memperkaya peran strategis Kementerian Kominfo.

September 2021 mendatang genap menandai 20 tahun sejak Kementerian Kominfo berdiri, menggawangi tugas negara di bidang komunikasi dan informatika. Dalam 20 tahun usianya Kemkominfo dipimpin oleh 5 menteri dengan torehan sejarah yang menjadi kebanggaan hingga saat ini, mulai dari (Alm) Syamsul Mu'arif, Sofyan Djalil, Mohammad Nuh, Tifatul Sembiring, Rudiantara, hingga Menkominfo saat ini Johnny G. Plate.

# MIRA WIRA





## 20 Tahun Kementerian Kominfo

# 20 Tahun Perjuangan Mewujudkan Transformasi Digital

Mira Tayyiba | Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI



***Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future***



- John F. Kennedy

Quote dari John F. Kennedy ini mengisyaratkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Tidak ada yang tidak berubah dan tinggal tetap, karena yang tetap dan tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Demikian pun Kementerian komunikasi dan Informatika yang akan memasuki usia 20 tahun pada September 2021 mendatang.

Dari sisi nomenklatur, Kominfo sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi RI (2001-2005), Departemen Komunikasi dan Informatika RI (2005-2015), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2015-sekarang). Tentunya dalam perjalanan selama dua dekade tersebut, ada begitu banyak pasang surut yang dialami Kominfo. Namun itulah yang membuat Kominfo terus berkembang, bahkan bertransformasi menjadi lembaga negara yang lebih progresif dan futuristik dari waktu ke waktu.

### ● Transformasi Kominfo: Melihat Kepingan Mozaik Kominfo Lintas Zaman

Tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo genap berusia 20 tahun. Sejenak melihat ke belakang, eksistensi Kominfo ditandai oleh lahirnya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi berawal dari pembentukan Kabinet Gotong Royong yang termaktub dalam Keputusan Presiden No. 288/M tanggal 9 Agustus 2001. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2001, Kominfo kemudian melengkapi seluruh perangkatnya.

Dari sisi organisasi, Kominfo telah berhasil melewati periode konsolidasi, baik di lima tahun pertama sebagai kementerian baru, maupun lima tahun kedua saat Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pada masa kepemimpinan Dr. Sofyan Djalil sebagai Menteri Kominfo (2004-2005), terjadi peleburan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Ditjen Postel Departemen Perhubungan dalam satu payung yang disebut Departemen Kominfo. Tentunya bukan

fasilitator, dan akselerator. Lebih lanjut lagi, Kominfo sebagai *affirmative action*, juga menjadi agen pembangunan infrastruktur TIK melalui Badan Layanan Umum Kominfo yang saat ini dikenal dengan nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Melalui BAKTI yang sejak tahun 2006 terus bergerilya dari pelosok ke pelosok untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Kominfo hendak menyatukan Indonesia dari sisi komunikasi, konektivitas, dan keterbukaan informasi publik.

Pada masa kepemimpinan Dr. Sofyan A. Djalil, Kominfo juga berhasil membuat tender pita

tentang KIP, UU No 44/2008 tentang Pornografi, dan UU No.38/2009 tentang Pos. Keempat UU tersebut merupakan undang-undang yang melampaui zamannya, bahkan sampai saat ini tampak begitu relevan, kendati terus direvisi.

Pada masa kepemimpinan Menteri Nuh, Kominfo juga membentuk Dewan TIK Nasional (Detiknas) untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawal pembangunan infrastruktur TIK, hingga pada 10 November 2008, Kominfo mulai merancang cetak biru Palapa Ring, yang mana hasilnya mulai tampak satu dekade kemudian.

Pada tahun 2008 juga, Kominfo berhasil menyelesaikan permasalahan seputar tarif interkoneksi telepon/pulsa antar layanan di Indonesia dan sambungan luar negeri yang cukup mahal. Dari yang termahal kedua di dunia, Kominfo berhasil menurunkan tarif pulsa menjadi yang termurah. Hal ini membuat teknologi informasi seperti telepon dan handphone bisa digunakan oleh lebih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selanjutnya Kominfo pada masa kepemimpinan Dr. Tifatul Sembiring (2009-2014) berhasil membuat kebijakan lokalisasi pusat data yang menjadi salah satu pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Suatu upaya untuk menjaga kedaulatan data saat itu dan kemudian berkembang menjadi kebijakan pertukaran data lintas batas (*cross-border data flow*) yang memenuhi prinsip *lawfulness*, *transparent*, dan *faimess*.

Pada masa kepemimpinan Menteri Tifatul Sembiring, penyediaan akses pita lebar atau *broadband* juga mulai menjadi fokus pembangunan Kominfo. Selain itu, Kominfo juga menyediakan fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan akses internet melalui

**Kominfo terus tumbuh dan berkembang dengan merespon berbagai perkembangan dan disrupsi yang terjadi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional. Hal ini tampak dalam setiap manuver Kominfo dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan akselerator.**

hanya sekedar menyatukan tiga lembaga yang menjadi tantangan, tetapi juga bagaimana mengelola perbedaan mulai dari budaya kerja, cara pandang, cara berkomunikasi dan interaksi, sampai dengan masalah tunjangan.

Dari sisi peran, Kominfo terus tumbuh dan berkembang dengan merespon berbagai perkembangan dan disrupsi yang terjadi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional. Hal ini tampak dalam setiap manuver Kominfo dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kebijakan, regulator,

frekuensi dan migrasi jaringan 2G ke 3G secara terbuka dan *fair*, sehingga mendapatkan harga spektrum yang *competitive value*. Tentunya hal ini merupakan salah satu tonggak akselerasi transformasi digital.

Berlanjut lagi ke masa kepemimpinan Prof. Mohammad Nuh sebagaimana Menkominfo (2007-2009), Kominfo berhasil menggolkan empat RUU menjadi UU, yaitu: UU No 11/2008 tentang ITE, UU No 14/2008





**Keberadaan teknologi pita lebar (*broadband*) dalam bidang telekomunikasi menjadi salah satu pendorong perubahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknologi pita lebar memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

*community access point* sebagai sebagai upaya untuk menjangkau yang tidak terjangkau.

Keberadaan teknologi pita lebar (*broadband*) dalam bidang telekomunikasi menjadi salah satu pendorong perubahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknologi pita lebar memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pita lebar tentunya akan mempercepat dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mendorong peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung optimalisasi teknologi pita lebar berupa pendorong faktor pertumbuhan masyarakat seperti inovasi dalam berbagai bidang, munculnya barang dan jasa baru, proses bisnis yang baru, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi.

Selanjutnya pada periode kepemimpinan Rudiantara (2014-2019), atau yang akrab disapa *Chief RA*, Kominfo semakin bergerilya dalam upaya mewujudkan akselerasi transformasi digital di Indonesia. Saat itu, Kominfo berupaya mempercepat implementasi Palapa Ring, sebagai proyek pertama di bidang TIK yang menggunakan skema KPBU. Proyek yang telah diinisiasi pada tahun 2005, akhirnya terealisasi 11 tahun kemudian. Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur pun berhasil dirampungkan, sehingga harapan akan Indonesia terkoneksi pun semakin dekat.

Palapa Ring merupakan pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan semuanya. Pembangunan jaringan serat optik nasional akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (*existing network*) dengan jaringan baru (*new network*) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur dibangun sejauh 4.450 KM

## Kominfo berhasil memperjuangkan dan mengawal kepentingan dan agenda nasional di bidang digital dalam forum pertemuan tingkat Menteri G20 yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2021

yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan *land cable* sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.

Selain itu, Kominfo pada masa kepemimpinan *Chief RA* juga mulai gencar melakukan pemblokiran konten internet negatif pada periode kepemimpinan *Chief RA*. Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika (Permen Kominfo) Nomor 19 Tahun 2014 soal konten negatif, Kominfo terus melakukan pemblokiran internet, yang merupakan bentuk baru dari penyaringan konten negatif.

Dari tahun ke tahun, sejak 2014 hingga 2019, target pemblokiran konten internet negatif terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, Kominfo telah memblokir 1.857.907 konten negatif di internet, di mana 1.025.263 diantaranya didominasi oleh situs web berisi konten pornografi, 166.853 situs perjudian, 8.689 situs penipuan, 497 konten yang bersifat terorisme dan radikalisme, 187 konten yang mengandung isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam 3 tahun terakhir, *take down* konten negatif di internet dan media sosial sudah mencapai lebih dari 2,5 juta konten, baik terkait konten penipuan, pornografi, separatisme, perjudian, dan lain sebagainya.

Berlanjut pada masa kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate saat ini, Kominfo juga terus bergerak maju. Gagasan-gagasan besar seperti Analog Switch Off (ASO) dengan penyiaran televisi digital yang dapat meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (*high definition*), peningkatan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang



usaha baru bagi industri konten, kemudian *farming* dan *refarming* pita frekuensi, implementasi jaringan 5G, dan berbagai gagasan futuristik lainnya menunjukkan bahwa Indonesia digital sebagai bagian dari visi besar Indonesia emas di tahun 2045 bisa terwujud.

Kembali pada masa sekarang, Kominfo berhasil memperjuangkan dan mengawal kepentingan dan agenda nasional di bidang digital dalam forum pertemuan tingkat Menteri G20 yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2021, termasuk menaikkan status satuan tugas ekonomi digital (*Digital Economy Task Force*) menjadi kelompok kerja ekonomi digital (*Digital Economy Working Group*). Hal ini merupakan awal yang baik karena masih ada satu lagi tugas besar bagi Kominfo tahun depan, mengingat Kominfo akan menjadi ketua *Digital Economy Working Group* dalam periode Presidensi Indonesia G20.

### Pembangunan SDM Digital

Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya menyangkut infrastruktur digital semata, melainkan juga menyangkut aspek pengembangan sumber daya manusia digital.

Sejatinya gagasan pembangunan SDM digital sudah mulai dilakukan pada masa kepemimpinan Dr. Sofyan A. Djalil. Pada tahun 2006, Menteri Sofyan mulai membuka beasiswa secara terbuka untuk PNS Kominfo dan CPNS Kominfo. Hal ini dimaksudkan untuk mencetak SDM unggul dari para pegawai Kominfo sebagai regulator TIK. Pada tahun-tahun setelahnya, Kementerian Kominfo mulai membuka beasiswa S1 dan S2 untuk masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia.



Dalam perkembangan selanjutnya, Kominfo memfokuskan program beasiswa ini jurusan Komunikasi dan IT, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong transformasi digital dari sisi SDM. Akhirnya pada tahun-tahun belakangan ini, Kominfo pun membuka beasiswa untuk pelatihan-pelatihan talenta digital secara vokasional.

Melalui program *Digital Talent Scholarship (DTS)*, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo berupa mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama transformasi digital di Indonesia. Dalam program tersebut, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global untuk melahirkan para profesional dan terampil menguasai bidang yang memberikan tutorial, pendampingan dan pelatihan.

Ada begitu banyak tema pelatihan yang dihadirkan Kominfo untuk mencetak talenta-talenta digital di Indonesia, antara lain: *Associate Cloud Engineer (Google)*, *Digital Skills (Microsoft)*, *Android Developer (Dicoding)*, *iOS Developer (Dicoding)*, *Augmented Reality (Dicoding)*, *Programming: HTML, CSS, Javascript (Progate)*, *Digital Entrepreneurship (Google)* dan *Digital Entrepreneurship (Facebook)*.

Jumlah peserta Digital Talent pun terus bertambah dari tahun ke tahun, bahkan total peserta yang mengikuti program DTS 2021 pada batch 3 terdapat sebanyak 74.413 orang. Bila jumlah ini terus meningkat, maka jumlah SDM digital di Indonesia dipastikan akan terus bertumbuh dan berkembang, sejalan dengan progres infrastruktur digital yang terus dibangun Kominfo.



## Mewujudkan Ekonomi Digital

Dari sisi ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan KIBAR—sebuah perusahaan yang bertujuan membangun ekosistem teknologi di Indonesia melalui inisiatif-inisiatif pembangunan kapasitas, mentoring, dan inkubasi di berbagai kota—secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* di Jakarta, Jumat 17 Juni 2016. Peluncuran program ini adalah bentuk pergerakan baru di industri digital. Perkembangan industri digital yang cepat tentu akan sangat berpengaruh terhadap GDP Indonesia.

Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* ini dimulai di 10 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Medan, Bali, Makassar, dan Pontianak. Di 10 kota tersebut didirikan pusat inovasi sebagai titik kumpul komunitas teknologi, kreatif, dan budaya, sekaligus juga menyediakan *co-working space* agar para pelaku dan kreator lokal dapat berkolaborasi menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat, baik dalam level lokal maupun nasional. Kemudian menambah 5 kota lagi yakni Batam, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Manado.

Gerakan ini diharapkan akan melahirkan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia dan peluncuran gerakan ini sebagai momen bersejarah dalam industri digital Indonesia. Pemerintah menargetkan dapat menjangkau 200 *startup digital* secara berkelanjutan hingga tahun 2020. Target akhir dari gerakan ini adalah menjadikan Indonesia “The Digital Energy of Asia” dengan membangun 1.000 *startup digital* di Indonesia.

Program penciptaan *technopreneur* yang siap menerima seed funding ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak. Pertama, *ignition* (penanaman pola pikir entrepreneurship); kedua *workshop* (pembekalan keahlian dasar yang dibutuhkan dalam membuat *startup digital*); ketiga *hackathon* (pembentukan tim yang saling melengkapi keterampilan untuk membuat prototype produk); keempat *bootcamp* (pembinaan mendalam bersama mentor untuk menyiapkan peluncuran produk); dan kelima

*incubation* (pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap jadi bagian dari ekosistem *startup digital*).

Semua program taktis itu akan menghasilkan SDM dengan kompetensi dasar dan *mindset* yang harus dimiliki oleh seorang *founder startup* yang punya hati untuk membangun bangsanya.

## ● Belajar dari Masa Lalu, Berkembang di Masa Depan

Secatinya, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kominfo saat ini dan kedepannya tentunya berbeda dengan 20 tahun sebelumnya. Bila selama 20 tahun Kominfo masih menjadikan pembangunan infrastruktur TIK sebagai fokus utama, maka setelah 20 tahun, tugas Kominfo bukan lagi hanya di infrastruktur, tetapi juga mendorong hilirisasi atau pemanfaatannya sehingga tercipta nilai tambah, seraya menjaga ruang digital agar bersih, beretika, dan produktif.

Ke depan, tantangan Kominfo dalam mengorkestrasi pelaksanaan transformasi digital nasional akan semakin berat. Lanskap digital yang kompleks dengan multi pelaku dari lintas sektor merupakan tantangan tersendiri. Selain itu, digital juga sudah menjadi isu utama dalam banyak kerjasama dan perjanjian internasional. Kemampuan Kominfo dalam menavigasi tuntutan dan lanskap baru ini tentunya menjadi kunci.

Namun berkaca pada pengalaman masa lalu, untuk menciptakan lompatan-lompatan progresif pada masa kini dan masa depan adalah *conditio sine qua non*, atau hal yang harus dilakukan Kominfo. Karena ada pepatah yang mengatakan, "*A generation which ignores history has no past and no future.*"

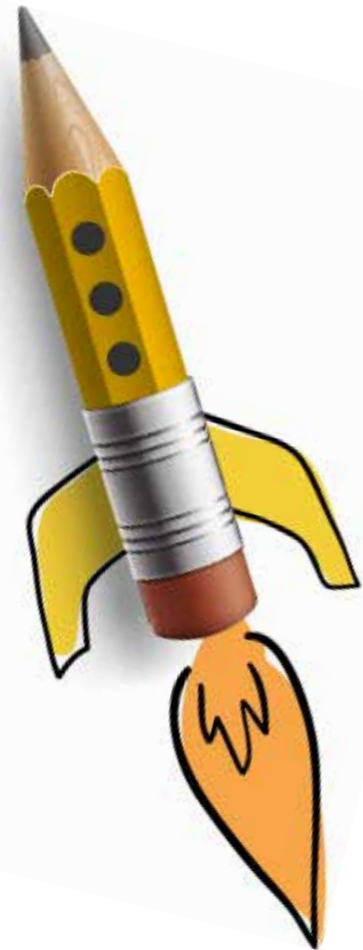
Sebagai *learning organization*, Kominfo harus dapat mengambil pembelajaran dari sejarah dan pengalaman, membangun

*cumulative knowledge*, dan menjaga perspektif yang bersifat *forward-looking*.

Maka kedepannya Kominfo dituntut untuk *agile*. Bila pada awalnya telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran merupakan isu yang terpisah, saat ini ketiganya menjadi konvergen. Kominfo juga perlu melakukan berbagai inisiatif untuk menghilirisasi ekonomi digital, guna menghadapi disrupsi yang kian hari kian akseleratif.

Momentum 20 tahun Kominfo ini bukan hanya sekadar bernostalgia dengan perjalanan Kominfo selama 20 tahun terakhir, tetapi juga harus dijadikan sebagai momentum untuk mendalami progres-progres yang dihasilkan Kominfo selama 20 tahun terakhir, serta membawanya lebih progresif dan futuristik ke depan melalui program-program yang transformatif dan disruptif.

Akhirnya, Kominfo perlu belajar banyak dari pengalaman masa lalu selama 20 tahun terakhir, guna merajut asa dalam mengorkestrasi akselerasi transformasi digital dan menenun harapan bangsa akan Indonesia Maju sebagai tujuan utama. Karena "*The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson.*"



***The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson***



# SYARIF MANSUR MANSURIF





## 20 Tahun Kementerian Kominfo

# Nurani dan Amal sebagai Pedoman Hidup

Syamsul Muarif - Menteri Negara Komunikasi dan Informasi

Kodrat seorang manusia adalah memilih merdeka dengan prinsip hidup, tetapi juga tidak mudah melewati segala tantangan yang kapan saja bisa menggoda prinsip hidup itu. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki tekad dan jalannya sendiri. Soal takdir akan membawanya kemana dan menjadi apa, ikhtiar adalah pilihan terbaik untuk tetap mengingat Sang Khalik penguasa langit dan bumi. Ya, meningkatkan keimanan agar menuju jalan yang lurus.

Saban hari, kita mungkin pernah mendengar, membaca, atau bahkan melihat dan berinteraksi langsung dengan salah seorang tokoh bangsa yang nama dan karirnya ikut menghantarkan Indonesia sampai pada era teknologi digital ini. Adalah Syamsul Muarif. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tahun 2001 – 2004. Jauh sebelum menjadi Menteri dan sederet jabatan penting lainnya di panggung politik tanah air, Syamsul Muarif berpegang teguh pada kodratnya menjadi seorang manusia, yakni pedoman hidup adalah nurani dan amal.

Sebuah pesan yang amat singkat tapi memiliki makna mendalam itu tertanam dalam diri Syamsul Muarif, seseorang yang tidak mau mengkhianati hati nurani hanya untuk mendapatkan sesuatu<sup>1</sup>. Putra asal Kandangan, Sumatera Selatan itu merupakan sosok yang dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Dimulai dari menjadi pemimpin di dalam keluarganya, Syamsul Muarif mengajarkan enam putra-putrinya harus menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung pada nama besar dirinya sebagai seorang ayah. Itulah mengapa, dalam urusan rumah tangga, ia diketahui tidak memiliki asisten rumah tangga. Ia sengaja melibatkan langsung anak-anaknya untuk turut mengurus pekerjaan rumah bahkan hingga mencuci mobil. Prinsip yang ditanamkan Syamsul Muarif itu dengan harapan kelak generasinya akan menjadi orang yang sukses, dan itu terbukti dengan karir pendidikan yang mereka raih.

Bekal ilmu dan pengalaman memimpin dalam keluarga itu, Syamsul Muarif dapatkan dari keteguhannya menimba ilmu di masa muda. Saat menjadi mahasiswa<sup>2</sup>, ia

pernah memimpin beberapa organisasi, seperti Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kandangan, Ketua Pengurus Daerah PII Kabupaten Kandangan, Ketua Umum Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Antasari Banjarmasin, Ketua Umum BADKO HMI Kalimantan, Ketua KNPI Kalimantan Selatan dan masih banyak lagi posisi strategis yang dipimpinnya di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.

Seperti pedoman hidupnya yang bersahaja itu, Syamsul Muarif juga pernah menjadi seorang guru agama di Madrasah Ibtidaiyah<sup>3</sup>. Memilih menjadi seorang guru adalah jalan pengabdian untuk keluarga dan kampung halaman. Menerpa diri sejak dini di usia muda membuat Syamsul Muarif dibekali ilmu dan pengalaman untuk mengabdikan kepada umat dan bangsa dalam skala yang lebih luas.

<sup>1</sup>Profil Syamsul Muarif. Merdeka.com. <https://m.merdeka.com/syamsul-muarif/profil/>. (2012). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

<sup>2</sup>Profil – Syamsul Muarif Organisator Sukses. sultra.antaranews.com. <https://sultra.antaranews.com/berita/263757/profil-syamsul-muarif-organisator-sukses>. (2012). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

<sup>3</sup>Merdeka.com. Ibid-

**Ketika Ibu Mega datang (menjabat Presiden RI kelima), langsung dia merubah Departemen Penerangan menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Di sana kemudian menempati gedung departemen tersebut, dan diangkatlah pak Syamsul Muarif sebagai Menteri. Beliau ini orang yang paling berjasa mulai bertumbuhnya Kominfo menjadi besar, karena beliau sebagai politisi tetapi mempunyai visi yang sangat luar biasa jauh ke depan.**

Karir politiknya<sup>4</sup> dimulai saat menjadi Anggota DPRD (1982-1985), Anggota DPR RI (1987-2001), Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI (1999-2001), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar (1998-2004), dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong Royong tahun (2000-2004), serta beberapa jabatan strategis lainnya baik di legislatif maupun partai politik.

Dari berbagai sumber, almarhum menghembuskan nafas terakhir di Singapore General Hospital pada hari Selasa, 3 April 2012 di usia 63 tahun. Jenazah almarhum dibawa ke Indonesia dan disemayamkan di Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Kandungan, Sumatera Selatan untuk dimakamkan.

Mengenang almarhum yang telah mendahului kita, semoga atas jasa dan pengabdian Bapak Syamsul Muarif semasa hidup kepada masyarakat, bangsa dan negara dibalas dengan kemuliaan dan janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Amiin!

### **Menteri Kominfo Pertama**

Perjalanan panjang Departemen Penerangan sejak didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, yang kemudian berujung kandas setelah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 bersama Departemen Sosial. Terlepas dari pro dan kontra atas kebijakan Presiden RI keempat itu, ada serpihan jejak Departemen Penerangan yang kembali membangkitkan misi dengan wajah baru.

Pada tahun 2000, Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim

Koordinasi Telematika Indonesia. Melalui Keppres tersebut, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Ketua TKTI dan JB Kristiadi sebagai Sekretaris Jenderal.<sup>5</sup>

Sebagai Sekjen TKTI, JB Kristiadi banyak berinteraksi dengan para anggota lembaga tersebut sehingga muncul sebuah inisiatif untuk membuat suatu kementerian. Agar semakin memperkuat nawaitu para pengurus dan Anggota TKTI, mereka sempat mengundang Menteri Informasi dan Teknologi dari Korea untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Ketua TKTI terkait industri telematika.

Setelah peralihan kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati pada tahun 2001, TKTI bisa dikatakan sebagai fondasi dari terbentuknya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi oleh Presiden Megawati yang secara historisnya berkaitan dengan pembubaran Departemen Penerangan di era Gus Dur.

“Ketika Ibu Mega datang (menjabat Presiden RI kelima), langsung dia merubah Departemen Penerangan menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Di sana kemudian menempati gedung departemen tersebut, dan diangkatlah pak Syamsul Muarif sebagai Menteri. Beliau ini orang yang paling berjasa mulai bertumbuhnya Kominfo menjadi besar, karena beliau sebagai politisi tetapi mempunyai visi yang sangat luar biasa jauh ke depan,” kata JB Kristiadi menceritakan awal mula Syamsul Muarif ditunjuk menjadi menteri pertama di Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi.

Sebagaimana diketahui, Kemeneg Kominfo termasuk salah satu lembaga negara dalam pemerintahan Presiden Megawati yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Khusus Kemeneg Kominfo ditugaskan untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang komunikasi dan

<sup>4</sup>Tokoh. Ensiklopedi. Syamsul Muarif. Tokoh.id. <https://tokoh.id/tokoh/ensiklopedi/syamsul-muarif/>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>5</sup>FGD Menuju 20 Tahun Kemkominfo – Seri 2. Narasumber: JB Kristiadi. Youtube: Kemkominfo TV. [https://www.youtube.com/watch?v=3-eEy9\\_8wzc&list=PLzqIQdh1\\_80s8OVuikkMhr7a1td4CKOKU&index=9](https://www.youtube.com/watch?v=3-eEy9_8wzc&list=PLzqIQdh1_80s8OVuikkMhr7a1td4CKOKU&index=9). (2021). Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.

informasi nasional.

Sebagai Menteri Kominfo pertama sejak lembaga itu didirikan, salah satu tugas yang cukup berat dilewati Syamsul Muarif adalah merangkul semua pegawai ex Departemen Penerangan yang dalam keadaan dilema usai Gus Dur melikuidasi lembaga negara tersebut. Pada akhirnya, Syamsul Muarif mendirikan Lembaga Informasi Nasional (LIN). Keberadaan LIN menjadi angin segar bagi seluruh pegawai sehingga tidak ada lagi keresahan karena telah memiliki satu gudang pekerjaan yang siap menampung mereka.

“Ini transisi yang sangat indah menurut saya karena membangun satu kementerian dari hal yang dibubarkan itu tidak mudah. Saat itu saya masih di deputi Kementan (Kementerian Pertanian, red.), dan diminta untuk membantu Pak Samsul oleh Bu Mega. Saya bantu tapi belum diangkat menjadi Sekjen, masih membantu secara informal,” JB Kristiadi menjelaskan tentang keterlibatannya dalam membantu Menkominfo Syamsul Muarif.

Saat resmi menjadi Sekjen Kominfo, JB Kristiadi banyak membantu penyusunan struktur organisasi. Jabatan-jabatan strategis di eselon I dan eselon II mulai diisi. Menurut hemat dia, mengisi kekosongan struktur bukan sesuatu yang sulit karena sudah ada TKTI yang memiliki SDM yang lama menggeluti industri informasi dan teknologi (IT). Pejabat yang mengisi struktur organisasi beberapa diantaranya adalah Cahyana Ahmadjayadi dan Ashwin Sasongko.

“Kita tinggal mengajak mereka bergotong royong bersama-sama untuk membangun Kominfo. Syukur alhamdulillah, mereka berkenan mau bergabung dan teman-teman saya di LIN juga sangat kooperatif sekali untuk sama-sama menggeluti. Tentunya bidang-bidang di Kominfo itu luar biasa, karena selain IT, dia juga tetap mempertahankan bagaimana membina pers maupun media nasional,” cerita JB Kristiadi.

Masih tentang TKTI, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Melalui Keppres tersebut, struktur lembaga berubah dengan Ketua TKTI dipimpin langsung oleh Presiden Megawati dan Meneg Kominfo Syamsul Muarif sebagai Ketua Pelaksana Harian. Formasi kepengurusan itu tidak mengalami perubahan sampai terbentuknya Departemen Kominfo pada tahun 2005.

Selain menata internal lembaga yang kala itu usianya masih terbilang muda, Meneg Kominfo Syamsul Muarif juga membuat kebijakan dan upaya perampingan birokrasi, baik tentang regulasi hingga memperkuat peran dan fungsi Kominfo.

Sekretaris Jenderal Kominfo periode 2005-2009 Ashwin Sasongko mengulas beberapa regulasi yang dihasilkan di era Meneg Syamsul Muarif<sup>6</sup>, antara lain:

- 1 **Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**
- 2 **Penyiapan berbagai Peraturan Pemerintah hingga tahun 2005**
- 3 **Membentuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP)**
- 4 **Membentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan TVRI**
- 5 **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-Government**
- 6 **Menggabungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang teknologi informasi di Ditjen Postel Departemen Perhubungan, dan RUU tentang Transaksi Elektronik di Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).**

## Bapak Telematika

Berbicara mengenai industri telematika di Indonesia memang sudah ada sejak zaman pemerintahan orde baru. Pada tahun 1997<sup>7</sup>, Presiden Soeharto pernah menerbitkan Keppres Nomor 30 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Sehingga memang TKTI telah berkiprah sebelum Kementerian Kominfo atau sebut saja masih di era Deppen.

“Ketika itu pendekatannya masih lebih kepada infrastruktur, maka diletakkanlah palapa, ring of ring dan sebagainya. Jadi untuk menyambung Indonesia ini dari segi infrastruktur,” kata JB Kristiadi

Sekitar tahun 1990-an, JB Kristiadi diangkat sebagai ketua LAN dan juga ketua Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara (Bakotan). Di saat itulah yang namanya otomatisasi mulai mengaplikasikan komputer sebagai alat pengganti mesin tik, sehingga untuk mengirim surat dan sebagainya menggunakan kabel atau lokal area network.

Sejak Kemeneg Kominfo didirikan dan dijabat pertama kali oleh Syamsul Muarif, tiga tahun masa kepemimpinannya dikenal meletakkan dasar-dasar atau grand strategy pengembangan telematika di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam wawancaranya bersama wartawan Tokoh Indonesia (tokoh.id), Syamsul Muarif mengatakan bahwa karakter dari teknologi informasi adalah jiwa transparansi yang harus dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti dari aspek politis dan strategis. Tidak bisa dipungkiri, ekosistem pegawai di Kemeneg Kominfo kala itu lebih banyak diambil dari Tim Koordinasi Telematika, juga beberapa diantaranya yang berasal dari kementerian dan lembaga lain serta para akademisi.

Tidak saja itu, Syamsul Muarif memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan telematika di Indonesia, salah satunya dengan melihat perkembangan industri itu

<sup>6</sup>FGD Menuju 20 Tahun Kemkominfo – Seri 1. Narasumber: Ashwin Sasongko. Youtube: Kemkominfo TV. <https://www.youtube.com/watch?v=gg4SXvh29M>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>7</sup>JB Kristiadi. Ibid-

<sup>8</sup>Tokoh.id. Ibid-



di beberapa negara seperti Malaysia dan Korea Selatan. Atas dasar itulah, muncul inisiatif dan gagasan besarnya untuk merubah nama lembaga kementerian menjadi departemen. Berawal dari ide Syamsul itu, Kemeneg Kominfo kemudian berganti nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi.

Tentu ada satu alasan yang mendasar dalam pandangan Syamsul, yakni dukungan anggaran yang jauh lebih besar untuk mengoperasionalkan industri telematika dibanding menggunakan Kementerian Negara yang saat itu masih mendapatkan alokasi anggaran kecil. Oleh karenanya, implementasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan e-government berawal dari gagasan besar Menteri Syamsul.

Menteri Syamsul Muarif telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan industri telematika di Indonesia. Ia juga yang mengusulkan kepada presiden dan jajaran kabinet bahwa melalui kajian kelembagaan komunikasi dan informasi yang bekerjasama dengan LAN pun membuahkan hasil. Pada akhirnya, sejak pemilihan umum tahun 2004, Syamsul berharap siapapun yang terpilih sebagai presiden bidang telekomunikasi harus masuk dalam Departemen Komunikasi dan Informasi. Mengingat berbagai upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Syamsul Muarif sehingga dampaknya dirasakan hingga saat ini, dapat dikatakan beliau adalah Bapak Telematika Indonesia.

Sebagai informasi juga, Syamsul Muarif pernah menyebutkan lima kelemahan Indonesia yang mungkin saat ini juga menjadi perhatian serius pemerintah. Lima kelemahan itu antara lain undang-undang, infrastruktur, sumber

daya manusia (SDM), budget atau anggaran dan budaya.

Sekilas kita mengamati bahwa lima kelemahan yang disebutkan Syamsul Muarif ternyata relevan dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju. Soal undang-undang? Jelas kita ketahui hal itu menjadi prioritas Presiden Jokowi lewat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada juga beberapa UU dan peraturan turunannya yang diperkuat di berbagai bidang.

Mengenai infrastruktur pun bukan lagi rahasia umum. Nawa Cita Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia diakui lewat pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia, baik infrastruktur fisik dan non-fisik. Presiden Jokowi pernah menyebutkan komitmennya itu melalui tagline membangun Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris, Kalimantan Sentris, dll.

Hal yang sama juga terlihat dari upaya pengembangan SDM yang unggul. Ambil contoh paling dekat adalah SDM bertalenta digital. Arahan Presiden Jokowi kepada Menkominfo Johnny

G. Plate adalah siapkan SDM digital dari level dasar, menengah hingga level atas. Kita mengenal itu melalui beberapa program Kementerian Kominfo seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (basic), *Digital Talent Scholarship* (menengah) dan *Digital Leadership Academy* (atas). Demikian halnya mengenai anggaran dan budaya kerja yang dituntun mengikuti perkembangan zaman.

Gagasan besar berikut ide dan kajian Syamsul Muarif tentang lima kelemahan Indonesia itu sangat penting diperhatikan saat ini. Oleh karenanya, menjadi suatu kebanggaan dan rasa syukur bangsa ini memiliki salah satu tokoh nasional yang jauh hari telah menyiapkan konsep besar untuk Indonesia.



## Tetap Kemerdekaan Pers

Sejak kekuasaan orde baru runtuh di tahun 1999, para insan pers di tanah air seakan mendapatkan angin segar. Dalam perjalanannya di era reformasi, pers di Indonesia mulai berkembang ditandai dengan lahirnya banyak perusahaan media. Meskipun demikian, rasa ketakutan akan bayang-bayang kekuasaan orde baru masih melekat, bahkan istilah pembredelan kerap dijumpai insan pers kala itu.

Reformasi adalah era yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga untuk menjamin kemerdekaan pers, pemerintah menerbitkan beberapa regulasi, yang paling dinantikan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU tersebut di era Syamsul Muarif pun dianggap masih membatasi kemerdekaan pers.

Menjawab hal itu, JB Kristiadi selaku Sekjen Kominfo era Syamsul Muarif mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membatasi kemerdekaan pers, yang ada justru upaya mempertahankan dan membina pers dan media nasional.<sup>9</sup> Untuk menjaga dan mendukung eksistensi pers nasional, diagendakan pertemuan rutin bersama para Pemimpin Redaksi (Pemred).

“Kita sebulan sekali mesti bertemu dengan semua pemred. Awalnya ketika semua pemred diundang itu takut-takut, ‘kita jangan-jangan mau disegel nih, dibredel waktu dulu jamannya Soeharto’. Tapi kita saling berbagi informasi dan bertukar pikiran untuk membangun pers nasional dan sebagainya. Ini peran dari teman-teman LIN yang luar biasa sekali waktu itu, kemudian juga Dewan Pers dihidupkan lagi,” kata JB Kristiadi

Komitmen dalam menjamin kemerdekaan pers itu sebenarnya tertuang pada visi Kementerian Komunikasi dan Informasi, yakni “Terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Lewat visi ini, Syamsul Muarif menilai bahwa peran pers sangat penting dalam pembangunan nasional, terlebih pers merupakan salah satu pilar demokrasi.

Syamsul Muarif berpandangan keterlibatan pers dalam pembangunan nasional terletak pada bagaimana pelayanan informasi publik yang dilakukan pemerintah. Tanpa adanya kebebasan pers yang mutlak, berbagai program dan kebijakan pemerintah yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentu terhambat dari segi waktu.

Melalui visi kementerian, Syamsul Muarif meyakinkan semangat demokratisasi dan keterbukaan informasi<sup>10</sup> menjadi ihwal penting. Sehingga stigma yang muncul mengenai isu akan dihidupkan kembali Deppen pun dapat terbantahkan. Dalam UU Pers 40/1990 disebutkan bahwa pemerintah tidak bisa campur dalam soal pemberitaan. Ancamannya adalah pidana penjara dua tahun atau denda.

Memegang penuh amanah UU tersebut, kebebasan pers dan tidak adanya campur tangan pemerintah menjadi sebuah jawaban kepada publik bahwa pemerintah tetap menjamin kemerdekaan pers. Tentu hal substansi lainnya juga diatur dalam regulasi lain, salah satunya pada UU penyiaran. Pada pengesahan UU Penyiaran tahun 2002, Syamsul Muarif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan UU tersebut untuk melakukan kontrol terhadap media, pers, dan penyiaran.

“Tidak ada pemikiran di pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap media, pers dan penyiaran,<sup>11</sup> tegas Syamsul seraya menjelaskan UU Penyiaran hanya ada dua hal yang harus disensor, yaitu film dan iklan.

Menurut Syamsul Muarif, terkait film sudah diatur dalam UU Perfilman yang menyebutkan bahwa film dan iklan yang disiarkan kepada publik, baik di bioskop maupun di televisi wajib melalui sensor oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, terlepas dari muatan konten dalam film dan iklan yang telah diatur lebih lanjut oleh KPI, pemerintah tidak akan mengontrol dan sensor muatan lainnya, seperti isi pemberitaan dan program.

**Terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

<sup>9</sup>JB Kristiadi. Ibid-

<sup>10</sup>Tokoh.id. Ibid-

<sup>11</sup>UU Penyiaran Tidak Akan Mengontrol Media, Pers dan Penyiaran. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7023/uu-penyiaran-tidak-akan-mengontrol-media-pers-dan-penyiaran/?page=1>. (2002). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

# SOLUSI KAWALAN





# 20 Tahun Kementerian Kominfo

## Ciptakan *Added Value* Bagi Bangsa dan Negara

Kisah Pengabdian Menkominfo Sofyan A. Djalil (2004-2007)



**Kita harus menciptakan *added value*, karena kemajuan bangsa Indonesia akan tercipta ketika ada *added value on the right page*. ... Tugas kita bukan hanya infrastruktur, tetapi juga mendorong pemanfaatannya bagi masyarakat Indonesia,**



tutur Dr. Sofyan A. Djalil  
(Menteri Kominfo periode 2004 - 2007)

### Prolog

*Verba Volant, Scripta Manent* (Spoken words fly away, written words remain). Secara realis, adagium ini berarti bahwa apa yang terkatakan, akan segera lenyap. Apa yang tertulis akan menjadi abadi. Inilah yang menjadi landasan mengapa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat acara Temu Kangen Menteri Kominfo lintas periode selama 20 tahun terakhir. Acara ini sejatinya didedikasikan untuk mengumpulkan kembali kepingan mozaik sejarah yang terpecah-pecah, merajutnya jadi satu kesatuan yang utuh, dan menenunnya dalam sebuah goresan pena agar tidak lekang ditelan waktu.

Pada kesempatan pertama, Kementerian Kominfo mengundang Menteri Sofyan A. Djalil untuk membagikan kisah-kisah seputar pengalamannya menjadi Menteri Kominfo dari tahun 2004 sampai 2007. Acara yang bertajuk “Temu kangen Menteri – Mentoring Bareng Dr. Sofyan A. Djalil” pada Senin, 2 Agustus 2021 tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Tampak banyak orang, lebih-lebih *civitas* Kominfo yang begitu antusias mengikutinya, baik melalui Zoom maupun melalui kanal Youtube Kemkominfo TV. Dari 200-an peserta yang ikut berpartisipasi, tampak

para pejabat tinggi Kominfo, diantaranya: Sekjen Kominfo (Ibu Mira Tayyiba), Ditjen SDPPI (Pak Ismail), Irjen Kominfo (Pak Doddy Setiadi), mantan Kepala Badan Litbang SDM dan Dirjen Postel era Menteri Sofyan Djalil (Pak Basuki Yusuf Iskandar), dan Kepala Badan Litbang SDM (Pak Hary Budiarto).

### Menteri Teh Botol yang Selalu Belajar

Sofyan A. Djalil dijuluki sebagai Menteri Teh Botol. Hal ini karena ia selalu masuk dalam kabinet kerja beberapa periode Presiden RI. Sampai-sampai muncul *tagline* guyonan, “Siapapun presidennya, Sofyan A. Djalil tetap jadi menteri.

**Saya hanya seorang *good listener*, *management leader*, dan *common sense*. Kalau dibilang berhasil, bukan saya. Melainkan karena semua pegawai Kominfo yang selalu bekerja keras. Keberhasilan saya adalah keberhasilan mereka dan kita semua**

Sofyan menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2004-2007. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu di 2007 - 2009. Sofyan juga kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi di Kabinet Kerja di tahun 2014- 2015. Setelah ramai *reshuffle* menteri kabinet kerja, di tahun 2015 Sofyan kembali menduduki kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bappenas di tahun 2015-2016. Kemudian di tahun 2016 Sofyan A. Djalil ditugasi Jokowi untuk mensertifikatkan bidang tanah di seluruh Indonesia untuk mengepalari Kementerian ATR/BPN. Kini, Sofyan menjabat Menteri ATR kembali.

Kendati selalu bolak-balik jadi menteri, Sofyan tidak jumawa. Ia malah mengatakan bahwa dirinya menjadi menteri bukan karena pintar dan hebat, tetapi karena ia adalah seorang yang *good listener*, mau belajar, dan memiliki *common sense*. Sofyan juga selalu mengutamakan *added value* dalam setiap kebijakan kebijakan publik yang ditelurkannya. Bagi Sofyan, hidup harus memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat sekitar.

Pada tahun 2004, Sofyan A. Djalil dipercayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Ia menjabat sebagai Menkominfo selama 3 tahun, yaitu Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Dalam acara temu kangen, Menteri Sofyan mengatakan bahwa dirinya bukan seorang yang ahli dalam bidang *Information & Communication Technology (ICT)*. Bahkan untuk membuat *background Zoom* saja dirinya tidak bisa. Menurutnya, untuk menjadi Menteri Kominfo tidak harus ahli ICT, melainkan harus mampu membuat *good policy* yang memiliki *added value* kepada bangsa dan negara.

Tiga hal penting untuk mewujudkan *good policy* menurut Menteri Sofyan adalah menjadi pendengar yang baik, *common sense*, dan *management leader*. Menteri Sofyan juga mengaku bahwa dirinya memiliki tiga staf khusus yang kompeten dari sisi ICT yang selalu memberikan input-input progresif kepadanya. Bahkan Sofyan mengaku bahwa pada masa itu, ada empat Menteri Kominfo, yaitu dirinya bersama tiga staf khususnya.

"Waktu itu Kominfo punya empat menteri: saya, Pak Loso, Pak Alexander Rusli, Bu Emiliana," kisah Menteri Sofyan dan menambahkan, "Karena kalau apa-apa kita selalu diskusi bareng dan hasil kebijakan pun bisa dikatakan lahir dari diskusi bersama tersebut."

Menteri Sofyan juga selalu memberikan kesempatan kepada semua pegawai Kominfo untuk berkembang dan mengeksplorasi semua potensi yang dimiliki. Banyak orang lantas mengatakan bahwa Sofyan A. Djalil berhasil menjadi Menteri Kominfo

yang progresif. Namun Sofyan selalu mengatakan bahwa keberhasilannya di Kominfo bukan karena dirinya, melainkan keberhasilan semua pegawai Kominfo yang kompeten.

"Saya hanya seorang *good listener*, *management leader*, dan *common sense*. Kalau dibilang berhasil, bukan saya. Melainkan karena semua pegawai Kominfo yang selalu bekerja keras. Keberhasilan saya adalah keberhasilan mereka dan kita semua," tutur Menteri Sofyan.

Kendati hanya menjabat selama 3 tahun, nyatanya Menteri Sofyan begitu dikenang oleh *civitas* Kominfo hingga saat ini karena legasi-legasi futuristik yang ditinggalkannya.

Dalam acara temu kangen Menteri Kominfo lintas zaman, Sofyan A. Djalil mengisahkan bahwa ada dua hal yang sangat berkesan pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kominfo. Pertama, membuka slot beasiswa Kominfo untuk umum. Kedua, perpindahan Ditjen Postel dari Departemen Perhubungan ke Departemen Kominfo.



## Cetak SDM Berkualitas melalui Program Beasiswa

Dalam acara Temu Kangen tersebut, Menteri Sofyan mengisahkan bahwa segala sepak terjangnya hingga beberapa kali "bolak-balik" jadi menteri tidak luput dari peran serta orang-orang baik pada masa lalu. Menteri Sofyan bersyukur karena ia pernah dibiayai untuk melanjutkan studinya hingga ke luar negeri.

"Saya bisa duduk di sini, bicara di sini, karena dulu ada orang yang menyekolahkan saya, jadi jangan ragu untuk menyekolahkan orang," tuturnya.

Selain itu, Sofyan juga berkisah bahwa pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kominfo, dirinya sulit menemukan orang yang berkualifikasi untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional strategis, baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat umum. Padahal ihwal utama yang menentukan tumbuh kembangnya suatu bangsa bukan SDA, tetapi SDM yang kompeten.

Kualitas SDM menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan serta kemajuan suatu negara. Ia bertutur bahwa generasi muda Indonesia butuh untuk dilatih dan diberikan pengalaman, salah satunya dengan akses pendidikan dan melanjutkan studi.

"Terlebih kualitas SDM di pemerintahan. Kita sebagai pelopor dan regulator harus kompeten agar kualitas kebijakan yang dihasilkan menjadi baik pula. Seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang amat kompetitif, memberi harapan besar bagi SDM di pemerintahan," ujarnya.

Kedua faktor inilah yang membuat Menteri Sofyan mulai menginisiasi pengadaan beasiswa umum bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinannya mulai menyiapkan anggaran studi lanjut

yang mana hasilnya mulai terasa pada saat ini.

"Dulu mereka yang berangkat studi, telah menjadi orang penting dan pemimpin di bidangnya sekarang, karena program beasiswa ini memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk maju," terangnya.

Sejalan dengan falsafah ini, pada tahun 2006 Menteri Sofyan membuka beasiswa untuk semua *civitas* Kominfo. Menteri Sofyan juga memberikan kesempatan yang sama kepada CPNS Kementerian Kominfo angkatan pertama untuk ikut bersaing dalam perebutan beasiswa secara *fair* dengan para PNS senior di Kominfo. Sebuah gebrakan baru, karena pada masa sebelum-sebelumnya, beasiswa hanya diperuntukkan bagi pegawai senior Kominfo.

Pada tahap pertama tersebut, Kominfo membuka slot anggaran anggaran beasiswa untuk 100 orang. Pada beasiswa angkatan pertama tersebut, ada 70 orang yang lolos, termasuk beberapa CPNS berkualitas Kominfo angkatan 2006.

Dalam program beasiswa tersebut, tampak bahwa penerima beasiswa Kominfo didominasi oleh CPNS Kominfo angkatan 2006. Hal ini juga sempat mendatangkan "kecemburuan" dari senior-senior PNS lainnya yang gagal mendapatkan beasiswa.

Terlepas dari semuanya itu, Menteri Sofyan tampak berbeda dan begitu *out of box*. Ia berpikir futuristik dan ingin memberikan kesempatan kepada semua pegawai Kominfo untuk berkembang, khususnya anak muda CPNS Kominfo.

Hasilnya jelas. Setelah lebih dari satu dekade, rupanya banyak diantara para penerima beasiswa angkatan pertama Kominfo kala itu yang telah menjadi pejabat tinggi pemerintahan saat ini. Tidak hanya menjadi pejabat, mereka juga mampu mengembangkan Kementerian Kominfo ke arah yang lebih progresif.

"Kita perlu lebih banyak memberikan kesempatan bagi

kaum muda untuk sekolah, belajar, expose, dan mengembangkan potensi diri untuk menciptakan SDM unggul yang kompeten, karena SDM yang kompeten selalu menjadi kebutuhan," tutur Menteri Sofyan.

Dalam acara temu kangen, Sofyan menuturkan bahwa untuk membuat bangsa ini maju, diperlukan SDM unggul, bukan hanya di lingkungan pemerintah, melainkan juga di masyarakat. Karena sejatinya SDM kompeten akan memberikan sumbangsih dan *added value* pada pembangunan bangsa.

## Bergabungnya Ditjen Postel ke Kominfo

Sofyan A. Djalil bercerita banyak pengalamannya kala duduk menjadi Menteri Kominfo, salah satunya ialah saat Ditjen Postel ditarik ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2005. Perlu diketahui, sebelum menjadi portfolio Kemkominfo, Ditjen Postel berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) resmi pindah dari Departemen Perhubungan ke Kominfo. Hal itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI dan termaktub pada Perpres No. 10/2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, Ditjen Postel pun dipindahkan ke Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Perpres yang mulai berlaku sejak ditandatangani pada 31 Januari 2005 tersebut membuat Ditjen Postel masuk dan menjadi bagian integral dari Departemen Kominfo, serta bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, yang dinahkodai oleh Menteri Sofyan A. Djalil.

Pemindahan payung besar Ditjen Postel ke Kemkominfo tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan



kebijakan pengembangan telematika (telekomunikasi, informatika dan media penyiaran) satu atap di Indonesia. Selain alasan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara sudah diatur tentang keberadaan Departemen Komunikasi dan Informatika. Dalam keputusan tersebut, Ditjen Postel, bersama tiga direktorat jenderal lain yaitu penyiaran, frekuensi, dan penerangan umum akan berada di Departemen Kominfo.

## Tarikan Politik

Alih-alih berjalan mulus, sejarah perpindahan Ditjen Postel dari Departemen Perhubungan ke Departemen Kominfo diwarnai oleh berbagai polemik dan tarik menarik politik yang cukup kencang. Perpindahan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya mengenai keberlakuan regulasi produksi Dirjen Postel selama ini. Pasalnya, berbagai regulasi yang dibuat oleh Ditjen Postel kala itu, dikeluarkan atas persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Menteri Sofyan dalam acara temu kangen mengatakan bahwa saat itu, banyak tarikan politik yang tidak ingin agar Ditjen Postel bergabung ke Kominfo. Banyak yang mengatakan bahwa Ditjen Postel akan memasuki jurang bila bergabung dengan Kominfo.

"Waktu itu tarikan politiknya luar biasa keras. Ada suara dari tokoh nasional agar Ditjen Postel tidak ditarik ke Kemkominfo. Manuvernya kemana-mana," kata Sofyan dalam acara 'Menuju 20 Tahun Kominfo (2001-2021)' yang disiarkan melalui channel Youtube Kemkominfo TV, Selasa (3/8/2021).



Dari sisi regulasi, kala itu Departemen Perhubungan tengah merevisi blueprint telekomunikasi Indonesia dan sedang bergerilya melakukan restrukturisasi di bidang telekomunikasi dan percepatan pertumbuhan telekomunikasi.

Dr. Sofyan mengatakan bahwa alasan tersebut kerap digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan agar Ditjen Postel tetap bertahan di Departemen Perhubungan.

Selain itu, ada juga pihak tertentu yang menilai bahwa perpindahan Ditjen Postel ke Depkominfo kurang relevan. Mengingat pos merupakan bagian dari logistik, yang masuk dalam domain transportasi, harusnya Ditjen Postel tetap berada di bawah naungan Departemen Perhubungan.

Menteri Sofyan juga menuturkan bahwa karena begitu besarnya tekanan politik, ia sempat dipanggil oleh Presiden SBY untuk menanyakan beberapa hal menyangkut perpindahan Ditjen Postel ke Kominfo. Menteri Sofyan pun menjelaskan bahwa pemindahan Ditjen Postel ke Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan hal yang wajar dan dinilai produktif di era konvergensi media komunikasi dan informasi.

Singkat cerita, Presiden dan Wakil Presiden sepakat agar Ditjen Postel berpindah induk ke Depkominfo. Keputusan ini lantaran Presiden dan Wakil Presiden kala itu yakni SBY dan Jusuf Kalla telah

mempertimbangkan matang berdasarkan input yang diberikan ahli agar Ditjen Postel ikut dalam payung Depkominfo. Alhasil, tarikan politik tidak mampu membendung perpindahan Ditjen Postel ke Depkominfo.

"Karena mendapatkan input dari orang, Presiden dan Wakil Presiden bahwa Ditjen Postel harus menjadi satu dengan Depkominfo. Karena kecenderungan di masa mendatang, Ditjen Postel harus dalam portfolio Depkominfo. Kalau pada waktu itu tidak ada kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada Ditjen Postel yang di bawah Kemkominfo seperti sekarang ini," tutur Menteri Sofyan.

Ia juga menambahkan bahwa tanpa defensif yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden, mustahil Ditjen Postel bisa berpindah ke Kominfo. Akhirnya, tarikan politik tidak mampu membendung kebijakan pemindahan Ditjen Postel ke Kominfo.

## Pasca Pindahannya Ditjen Postel

Dalam acara Temu Kangen Menteri Kominfo, Menteri Sofyan menceritakan bahwa beberapa saat setelahnya, ia berupaya mencari orang kompeten untuk menjadi Dirjen Postel. Menteri Sofyan

menawarkan kepada Mahendra Siregar, tetapi ditolak. Kemudian ia menawarkan kepada Puan Ramani dari Kementerian Keuangan, tetapi juga ditolak. Ia juga sempat menawarkan kepada Prof. Mohammad Nuh, tetapi juga ditolak. Akhirnya Menteri Sofyan berhasil menemukan seorang muda kompeten bernama Basuki Yusuf Iskandar untuk menjadi Dirjen Postel.

*Chemistry* yang melampaui pekerjaan membuat Menteri Sofyan dan Dirjen Basuki mampu membuat Ditjen Postel semakin maju dan futuristik. Ditjen Postel menemukan warna baru dalam sejarah perkembangan infrastruktur digital di Indonesia. Keduanya mampu menjawab keraguan yang terbersit pada awal rencana pemindahan Ditjen Postel dari Departemen Perhubungan ke Departemen Kominfo.

Kala itu Menteri Sofyan menjelaskan kepada publik bahwa regulasi bentukan Dirjen Postel semenjak masih berada di bawah Departemen Perhubungan akan tetap berlaku, kecuali dibuat peraturan baru yang lebih relevan (bila ada).

Ia mengatakan bahwa perpindahan kedudukan Dirjen Postel tidak serta-merta mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap tata kerja lembaga tersebut. Menteri Sofyan juga menjelaskan bahwa segala kebijakan yang dinilai baik semenjak masih berada di bawah Departemen Perhubungan, akan terus dilanjutkan. Sementara beberapa kebijakan yang dinilai masih perlu perbaikan, akan diperbaiki. Namun dari signifikansi, efektivitas, dan efisiensi, Menteri Sofyan menggaris bawahi bahwa pindahannya Dirjen Postel ke Depkominfo akan lebih memudahkan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), karena berada di bawah satu atap yang tersinkronisasi dari sisi teknologi dan informasi publik.

"Tidak ada perubahan apa-apa, yang ada hanya pemindahan tempat lapor. Kalau tadinya Dirjen Postel lapor kepada Menteri Perhubungan, sekarang lapor pada Menteri Kominfo," katanya di sela-sela rapat kerjanya dengan anggota Komisi I DPR, di Gedung DPR Jakarta, Senin (7/2/2005) dan menambahkan, "Jadi semua regulasi yang ada sekarang ini masih tetap berlaku, tidak ada perubahan apa-apa."

Ucapan Menteri Sofyan terbukti benar. Beberapa Keputusan Menhub yang masih berlaku sejak kepindahan Ditjen Postel ke Kominfo antara lain: KepMenhub No. KM.65/2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat, Pelabelan Alat Dan Perangkat Telekomunikasi, KepMenhub No. KM.35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa

Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, dan beberapa regulasi lainnya yang dikeluarkan Dirjen Postel, misalnya SK No. 199/DIRJEN/2001 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik, dan SK No. 15A/2004, tentang Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Siaran FM.

Dari sisi anggaran, pindahnya Ditjen Postel ke Departemen Kominfo secara otomatis membuat anggaran Departemen Perhubungan untuk Ditjen Postel akan pindah ke Departemen Kominfo. Menteri Sofyan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meminta tambahan anggaran, dalam hubungan dengan masuknya dua divisi ke dalam Depkominfo, yaitu Ditjen Postel dan Lembaga Informasi Nasional.

Departemen Kominfo justru berfokus menggunakan alokasi anggaran yang sudah ada, yaitu dari penggabungan anggaran Kementerian Kominfo, Ditjen Postel, dan Lembaga Informasi Nasional. Namun bila terjadi pembengkakan anggaran kerja, pihaknya akan meminta tambahan anggaran kepada pemerintah. Adapun total anggaran dari hasil penggabungan ketiga lembaga tersebut mencapai Rp 600 miliar. Dari total anggaran tersebut, Ditjen Postel kala itu menggunakan dana paling besar, yaitu Rp 400 miliar untuk membangun infrastruktur perangkat pos dan telekomunikasi.

## Tender Pita Frekuensi dan Migrasi Jaringan 2G ke 3G

Dalam Temu Kangen tersebut, Menteri Sofyan juga mengisahkan tentang migrasi sinyal 2G ke 3G bagi penyedia layanan telekomunikasi yang sifatnya tender. Karena sistem tender sebelumnya dirasa bersifat monopolistik, Menteri Sofyan pun

melakukan diskresi atas kebijakan yang ada sehingga masing-masing penyedia mendapat blok sinyal frekuensi yang sama. Tidak tanggung-tanggung, Menkominfo, Sofyan A. Djalil kala itu justru membuka ulang membuka tender pita frekuensi. Tender tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan penawaran harga spektrum secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Hal ini senada dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yang mana pasal 5 menyatakan secara jelas bahwa Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam hal penyampaian pemikiran dan pengembangan bidang telekomunikasi. Kemudian pasal 10 UU Nomor 36 tahun 1999 yang melarang praktik monopoli di antara penyelenggara telekomunikasi. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam bentuk lembaga dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi pun semakin terbuka.

Dalam acara temu kangen, Menteri Sofyan menceritakan bahwa ia ditemui oleh pihak Telkomsel, Indosat, dan XL. Ketiganya menjelaskan bahwa jaringan 2G akan susah masuk ke 3G. Hal ini karena jaringan 3G membutuhkan kurang lebih 2,1 Ghz, sedangkan hasil tender jaringan 3G sudah diberikan ke perusahaan frekuensi yang belum memiliki pelanggan di daerah.

Ketika ditanyai Sofyan tentang alasan mengapa Telkomsel, Indosat, dan XL tidak lolos tender di Departemen Perhubungan, alasannya adalah ketiganya sudah memiliki frekuensi, yaitu 2G dan untuk itu maka jaringan 3G perlu dibagikan ke penyedia lain untuk menghindari monopoli.

Menteri Sofyan lantas memanggil pemenang tender yang adalah Lippo Tel, dengan sedikit melakukan *manuver* bahwa harus dibuat tender ulang secara terbuka dan *fair*. Bila Lipo Tel tidak setuju untuk mengembalikan tender 3G, maka Sofyan akan membuat kebijakan untuk menaikkan tarif, dengan catatan bahwa tarif yang mahal akan sulit mendapatkan pelanggan di daerah.

## Kurang Lebih Begini:

**Sebelum bergabung dengan Depkominfo, penyelenggara telekomunikasi terkesan bersifat monopolistik. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, dimana pemerintah didaulat menjadi policy maker, regulator, dan sekaligus menjadi operator telekomunikasi. Pasal 4 ayat 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini juga membuat perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia tidak berjalan baik.**



Akhirnya permintaan Sofyan disetujui oleh pihak Lippo Tel. Tender 3G pun bisa dibuka kembali. Namun aturan tender kala itu, menurut Sofyan akan lebih menguntungkan Telkomsel, karena pihak yang membayar paling besar bisa *take all* semua blok 3G.

Sofyan tidak menginginkan hal ini terjadi. Ia mau memberikan kesempatan yang sama untuk provider lainnya seperti Indosat dan XL. Untuk itu, dirinya membuat kebijakan tender di luar dari biasanya. Ia membuat diskresi dan meminta bantuan rapat kabinet menyetujui hal ini. Kebijakan Sofyan pun disetujui oleh jajaran kabinet pemerintahan kala itu.

Setelah disetujui rapat kabinet, keluarlah aturan bahwa satu provider hanya boleh memegang satu blok. Bagi pihak yang paling banyak membayar akan dapatkan blok pertama, bagi pihak yang membayar terbanyak kedua akan mendapatkan blok kedua, dan pihak yang membayar terbanyak ketiga akan mendapatkan blok ketiga.

Hasilnya, Telkomsel mendapatkan blok pertama karena bersedia membayar 250 miliar per tahun, selanjutnya Indosat mendapat blok kedua karena bersedia membayar 200 miliar per tahun, dan XL mendapatkan blok ketiga karena bersedia membayar 180 miliar per tahun. Kebijakan ini kemudian membuat tambahan pemasukan negara yang cukup besar.

Sofyan A. Djalil berkata bahwa inilah peran penting pemerintah, yakni menyediakan solusi atas suatu masalah demi kepentingan banyak pihak. Menurutnya, seringkali pejabat negara tersandung permasalahan karena rumitnya kebijakan yang saling tumpang tindih.

“Itulah model penataan frekuensi yang oleh tim Kemenkominfo kala itu lakukan. Hal seperti ini juga yang mendasari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi kendala dalam pemerintahan, salah satunya dalam hal investasi,” jelas Menteri Sofyan.

Kebijakan ini tampak didukung oleh Dirjen Postel kala itu, Basuki Yusuf Iskandar, karena dinilai akan menghasilkan vendor yang kompeten dan progresif, dan futuristik dengan harga spektrum yang *competitive value*. Secara mekanisme, kebijakan tersebut pun dinilai lebih kompetitif dan *fair* dibandingkan dengan sebelumnya waktu di Departemen Perhubungan.

## Epilog

Hingga saat ini, Sofyan A. Djalil telah enam kali memegang peranan penting sebagai menteri di lima Kementerian yang berbeda. Ketika ditanya bagaimana perjalanannya tersebut, ia mengaku bahwa sebagai pemimpin intinya harus menjadi pendengar yang baik, tidak malu bertanya serta mempunyai keyakinan yang baik sehingga dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat.

Satu pesan khas Sofyan A. Djalil yang banyak diingat orang adalah bagaimana senantiasa menciptakan nilai tambah dalam segala lini kehidupan.

Sofyan A. Djalil mengucapkan terima kasih untuk Kominfo sudah bekerja keras sehingga dari Sabang sampai Merauke bisa terkoneksi dengan baik. Menteri Sofyan juga melihat bahwa Kementerian Kominfo saat ini sudah sangat maju dan *advanced*.

Akhirnya, sebagai penutup sesi di acara Temu Kangen tersebut, Menteri Sofyan kembali membuat *callback*, bahwa bagaimana kita harus menciptakan *added value*, karena kemajuan bangsa Indonesia akan tercipta ketika ada *added value on the right page*.

“Nilai tambah apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita ciptakan bagi bangsa ini, jadi ciptakan Indonesia yang lebih baik, negara yang baik bagi generasi anak cucu kita nanti, negeri yang aman, makmur serta penuh ampunan Tuhan,” tutup Menteri Sofyan A. Djalil.



sumber foto: Properti Kompas



## 20 Tahun Kementerian Kominfo

# Menjangkau yang Tak Terjangkau



**Kita harus menjangkau yang tidak terjangkau sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman dengan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika**



tutur Prof. Mohammad Nuh  
(Menteri Kominfo periode 2007-2009).

### Prolog

Publik begitu kaget tatkala Prof. Mohammad Nuh didaulat menjadi Menteri Kominfo pada tahun 2007 menggantikan Dr. Sofyan A. Djalil. Pada perombakan kedua kabinet tersebut, Dr. Sofyan A. Djalil dipercayakan untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menariknya, Istri dan keluarga Prof. Nuh, demikian sapaan akrabnya, sempat tidak percaya bahwa beliau dipercaya Presiden SBY sebagai menteri. Bahkan pihak keluarga juga tidak sempat menggelar syukuran atas pengangkatan Prof. Nuh, karena hal tersebut. "Kami terkejut dan tidak percaya kalau bapak diminta menjadi Menkominfo," Kata Laily Rachmawati, istri Prof. Nuh saat ditemui wartawan di rumahnya Jl. Rungkut Asri Utara 5, Surabaya, Minggu (6/5/2007).

### Dari Rektor Menjadi Menteri: Dari Akademisi ke Teknisi

Mohammad Nuh lahir di Surabaya 17 Juni 1959. Ia adalah lulusan S1 Teknik Elektro ITS pada 1983. Selanjutnya gelar S2 dan S3 diraihnya dari Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Perancis. Prof. Nuh juga telah dianugerahi gelar guru besar bidang ilmu *digital system*, 2004. Sebelum didaulat menjadi Menteri Kominfo, Prof. Nuh menjabat sebagai rektor ITS untuk periode 2003-2007.

Dalam acara Temu Kangen Menteri, Prof Nuh menceritakan bahwa pada 5 Mei 2007, ia ditelepon oleh nomor baru, yang mengaku sebagai staf Presiden SBY dan memintanya untuk menemui Presiden di Puri Cikeas, Bogor. Karena nomor baru, Prof. Nuh lantas tidak terlalu merespon untuk beberapa kali panggilan tersebut. Namun, setelah dikontak oleh nomor yang ia kenal, dirinya pun menyanggupi untuk bertemu Presiden SBY di Cikeas.



Saat bertemu Presiden SBY, Prof. Nuh mulai menduga bahwa dirinya bakal dipercaya masuk kabinet. Apalagi setelah berbincangnya dengan Presiden di Cikeas menyoal seputar perkembangan informasi dan teknologi. Ia kemudian yakin bahwa pos yang akan dipercayakan kepadanya adalah Menkominfo.

Firasatnya benar. Prof. Nuh diminta menjadi Menteri Kominfo menggantikan Dr. Sofyan A. Djalil yang pada masa itu dipercayakan menjadi Menteri BUMN. Ia pun dipercayakan untuk memantau dan merancang perkembangan informasi dan komunikasi, termasuk bidang-bidang lain seperti masalah penyiaran dan pers.

Prof. Nuh mengatakan akan segera mempelajari portofolio Departemen Komunikasi dan Informatika serta meneruskan rencana jangka pendek maupun jangka panjang departemen tersebut. Ia mengisahkan bahwa dirinya tidak akan mengubah banyak apa yang sudah berjalan pada masa kepemimpinan Dr. Sofyan A. Djalil.

"Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik," tutur Menteri Nuh.

Dalam hal ini, Menteri Nuh berkeinginan membuat sebuah terobosan, yaitu menyatukan semua informasi dari tiap departemen dengan konsep *information bridge*. Prof. Nuh lantas mulai merencanakan suatu sistem yang terintegrasi antar-departemen, sehingga Presiden SBY lebih mudah memantau kinerja masing-masing departemen.

## Berhasil Loloskan 4 RUU jadi UU

Prof. Nuh menjadi Menteri Kominfo dari tahun 2007 sampai 2009. Kendati hanya dua setengah tahun memimpin Kominfo, Prof. Nuh, demikian sapaan akrabnya berhasil merancang dan meng-gol-kan

**Awalnya saya belum berpikir tentang pornografi dan lain-lain. Makanya dibuatlah RUU ITE untuk melindungi dan memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik dan bukti-bukti elektronik**

sejumlah regulasi penting bagi Indonesia di sektor Komunikasi dan Informatika.

Dalam acara Temu Kangen Menteri Kominfo hari kedua, pada Selasa (3/08/2021), Prof. Nuh menceritakan bahwa saat itu dirinya ingin membuat teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan payung hukum. Mulailah dirinya bersama tim ahli menggodok RUU yang berhubungan dengan transaksi elektronik, yang mana sekarang dikenal dengan nama UU ITE; sebuah UU yang melampaui pemikiran masa itu, bahkan begitu relevan sampai saat ini dan tahun-tahun mendatang.

"Awalnya saya belum berpikir tentang pornografi dan lain-lain. Makanya dibuatlah RUU ITE untuk melindungi dan memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik dan bukti-bukti elektronik," imbuhnya dan menambah, "RUU lainnya baru dipikirkan dalam perkembangan selanjutnya."

Prof. Nuh juga kembali berkisah bahwa dirinya bersama tim membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan menyampaikannya kepada DPR RI Komisi 1.

Ada empat DIM yang diangkat, yaitu transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik, pos, dan pornografi.

Prof. Nuh dalam acara Temu Kangen tersebut mengakui bahwa di DPR, terdapat berbagai jenis orang, mulai dari yang sangat paham DIM yang dibuatnya bersama tim, hingga yang sama sekali tidak paham dan sering bertanya di luar jalur. Kendati demikian, ia tidak memperdebatkan hal tersebut, karena bukan golnya kesana. Ia justru memberikan penjelasan yang komprehensif, tanpa membuat para anggota DPR merasa digurui.

"Ketika mereka bertanya soal A, saya tidak langsung menjawab tentang A, apalagi menyerang mereka dengan berkata bahwa pertanyaan bapak keliru. Saya justru menjawab dengan mengangkat persoalan dan hal-hal yang berada di sekitaran A tersebut, untuk membuat mereka semakin memahami DIM yang diberikan, tanpa mereka merasa diajar," tutur Prof. Nuh dan melanjutkan, "Gol kita bukan pinter-pinteran, tetapi RUU ini lolos jadi UU. Selain itu, mereka adalah representasi masyarakat yang dipilih. Kita harus menghormatinya, walaupun ada di antara mereka yang tidak paham sama sekali."

Alhasil, dirinya dan tim pemerintah berhasil menggolkan empat RUU menjadi UU, yang mana hal tersebut merupakan legasi Prof. Nuh sampai saat ini, yaitu: UU No 11/2008 tentang ITE, UU No 14/2008 tentang KIP, UU No 44/2008 tentang Pornografi, dan UU No.38/2009 tentang Pos.

Memang benar bahwa keempat UU tersebut merupakan beberapa agenda besar peninggalan Menteri Sofyan A. Djalil. Namun keempat RUU tersebut kemudian diundangkan pada masa kepemimpinan Prof. Nuh sebagai Menteri Kominfo merupakan bukti bahwa Menteri Nuh memiliki komitmen dan kompetensi yang progresif dalam membangun bangsa.

Betapa tidak, bukan rahasia lagi bahwa meloloskan satu RUU menjadi UU tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi empat RUU. Tentu saja membutuhkan *effort* besar yang menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan ekonomi, sehingga benar kata pepatah bahwa hasil tak akan mengkhianati proses.

## Fokus pada Mata Rantai Terlemah

Pada masa kepemimpinannya, Menteri Nuh membentuk Dewan TIK Nasional (Detiknas) untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawal pembangunan infrastruktur TIK. Maka pada 10 November 2008, Menteri Nuh mulai merancang cetak biru Palapa Ring, yang mana hasilnya mulai tampak satu dekade kemudian.

"Pembangunan tol fisik harus sejalan dengan pembangunan tol udara, yaitu jaringan TIK, yang pada tahun-tahun terakhir ini kerap disebut sebagai transformasi digital. Kalau pada masa itu, istilah yang dipakai adalah TIK," imbuh Prof. Nuh.

Menteri Nuh juga menambahkan bahwa apapun istilahnya, intinya adalah bahwa dirinya bersama tim Kominfo kala itu tetap berfokus pada ketersediaan infrastruktur jaringan dan keterjangkauan informasi di daerah-daerah. Hal ini karena ia melihat bahwa ada tempat yang banjir fasilitas, tetapi ada juga tempat, bahkan banyak yang minim fasilitas TIK. Berbicara soal paradigma pembangunan, maka fokus utamanya haruslah pada mata rantai terlemah, dalam hal ini wilayah yang minim fasilitas TIK.

"Bila pada seutas rantai, terdapat mata rantai yang bisa mengangkat beban seberat 200 KG, lalu ada yang 100 KG, dan ada yang 50 KG, maka rantai tersebut hanya

bisa mengangkat maksimal 50 KG. Bila lebih dari itu, maka rantai akan terputus," tutur Prof. Nuh.

Maksud dari pernyataan ini ialah bahwa bahwa fokus pembangunan berkelanjutan harus diutamakan pada daerah-daerah "dhuafa" baik secara kewilayahan, suku dan etnik, serta ekonomi.

"Dhuafa itu ada beberapa jenis. Ada dhuafa secara kewilayahan, ada dhuafa secara suku dan etnik, serta ada dhuafa secara ekonomi. Nah, fokus kita ya pada ini (dhuafa)," ujar Prof. Nuh.

Dalam konteks dhuafa secara kewilayahan, Prof. Nuh pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kominfo berupaya memperkuat sistem pertelevisian, dalam hal ini TVRI di wilayah perbatasan negara seperti Kalimantan, dan beberapa wilayah tertinggal lainnya. Tujuannya untuk memperkuat jaringan informasi hingga pelosok sehingga wilayah-wilayah tersebut juga bisa menikmati kemerdekaan dan keterbukaan informasi.

"Kalau kaum dhuafa bangkit, maka Indonesia akan bangkit," ujar Prof Nuh.

Dirjen Postel kala itu, Basuki Yusuf Iskandar yang juga hadir dalam acara Temu Kangen Menteri Kominfo pun sedikit berkisah bahwa umumnya masalah monopoli diselesaikan pada masa kepemimpinan Menteri Nuh, walaupun pemikiran tersebut dimulai pada masa Dr Sofyan A. Djalil.

"Rata-rata diselesaikan pada zaman pak Nuh, masalah-masalah monopoli," tutur Basuki.

Selain itu, Basuki Iskandar juga mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Prof. Nuh juga diselesaikan permasalahan seputar kode akses.

"Bagi operator tertentu, kode akses adalah masalah mati dan hidup. Saya kira ga benar sama sekali," imbuhnya dan menambahkan, "Setelah diberlakukannya kode akses. Impact pada operator tidak ada. Kompetensi makin sehat. Bahkan Operator makin tajam memperkuat diri dengan membuat skema-skema *pricing* yang bagus sehingga bisa menarik pelanggan."

Basuki juga mengatakan bahwa pada masa Prof. Nuh, ada juga perluasan area yang cukup masif, sehingga pelanggan makin banyak dan slot pasar jadi luas.

Menyambung apa yang disampaikan Basuki Iskandar, Prof. Nuh mengakui bahwa salah satu pengalaman yang menarik saat menjabat sebagai Menteri Kominfo adalah menurunkan tarif pulsa dari termahal kedua di dunia menjadi yang termurah.

Diceritakan bahwa pada tahun 2008, tarif interkoneksi telepon/pulsa antar layanan di Indonesia dan sambungan luar negeri cukup mahal. Salah satu konsekuensinya, hanya kalangan menengah ke atas yang bisa menggunakan telepon/*handphone*.

"Ada datanya. Pada waktu itu, negara dengan tarif termurah adalah Hongkong, diikuti Thailand, India, Korea Selatan, dan Malaysia. Sedangkan Indonesia berada pada urutan kedua termahal setelah China," tutur Prof. Nuh.





Melihat permasalahan ini, Menteri Nuh lantas memanggil Direktur Telkom kala itu, Renaldi untuk mendiskusikan ihwal tersebut. Di hadapan Direktur Telkom, Menteri Nuh meyakinkan dan membuat hitungan bahwa pihak Telkom tidak akan merugi bila menurunkan tarif interkoneksi.

"Pak Ren. Anda elektro dan saya juga elektro. Tidak usah mengundang orang lain yg ahli karena kita juga adalah ahli. Mari kita diskusikan hal ini," cerita Prof. Nuh kala itu.

Kemudian Menteri Nuh merincikan di sebuah *white board* di ruang kerjanya terkait urusan kode akses, urusan interkoneksi, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari perincian tersebut adalah Telkom tidak akan rugi.

Sebagai informasi, interkoneksi merupakan transaksi antar-operator yang memungkinkan terjadinya panggilan *off net* atau antar-operator. Sementara tarif *on net* adalah tarif yang dibebankan pada penggunaan jaringan yang sama. Tarif *off net* dibebankan pada penggunaan lintas jaringan, misalnya, antar-operator.

Hal tersebut lantas membuat Direktur Telkom berkenan menerima saran Menteri Nuh untuk menurunkan tarif interkoneksi yang mana hal tersebut menghasilkan *win win solution* bagi Telkom di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain.

Kembali ke tahun 2021, dalam acara Temu Kangen tersebut, Prof. Nuh mengatakan bahwa yang penting ialah bahwa dirinya tulus melayani bangsa dan tidak memiliki kepentingan tertentu. Biasanya suatu kebijakan publik akan susah diwujudkan bila ada konflik kepentingan.

## Paradigma "dan" bukan "atau"

Dalam membangun bangsa, menurut Prof. Nuh, paradigma yang harus dipakai adalah paradigma "dan" bukan "atau."

"Kita perlu menggunakan *and paradigm*, bukan *or paradigm*," tutur Prof. Nuh pada acara Temu Kangen tersebut.

Ia menjelaskan bahwa tugasnya bukan hanya untuk mendukung pemerintahan, tetapi lebih dari itu mendukung pembangunan bangsa.

"Jadi paradigmanya harus digeser, dari sekedar untuk pemerintah, ke untuk negara," ujar Prof. Nuh dan menambah, "kalau hanya untuk pemerintah, itu kecil dampaknya."

Landasan ini didasarkannya pada kesadaran bahwa pemerintahan hanya berlangsung selama lima tahun dan akan berganti. Tapi negara dan bangsa akan ada sepanjang waktu.



"Kita tidak dihadapkan pada pilihan demi pemerintah atau negara, melainkan demi pemerintah dan lebih dari itu, demi negara," imbuh Prof. Nuh dan menambahkan, "Pemerintah ya. Negara ya. Karena pemerintah hanya berlangsung selama lima tahun. Namun, negara akan ada sepanjang tahun. Jadi, pemerintah dan negara. Bukan pemerintah atau negara."

Dalam upaya membangun bangsa, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang simultan. Disinilah Menteri Nuh menginisiasi manajemen sinergitas dan kolaboratif.

"Filosofi yang saya pakai adalah mengubah pandangan dari saya ke kami, dari kami ke kita," imbuhnya seraya menambahkan, "Maksudnya apa? Maksudnya ialah membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam upaya membangun bangsa ini, yang adalah milik semua anak bangsa tanpa terkecuali. Karena, tidak ada saya atau kami, yang ada ialah kita semua dalam satu paradigma pembangunan bangsa."

Prof. Nuh, dalam acara Temu Kangen, juga mengatakan bahwa urgensi teknologi digital saat ini sama seperti listrik pada tahun 1940-an.

"Sama seperti listrik pada tahun 40 an, saat ini orang butuh teknologi digital," tutur Prof. Nuh.

Oleh karena itu agaknya Kominfo perlu menggeser semua fase, dari yang sebelumnya teknologi digital hanya sebagai support menjadi *driver*, *enabler*, *transformers*, dan selanjutnya *disruptor*.

"Kita perlu menggeser fase-fase tersebut dari *support* kita geser jadi *driver*, dari *driver* kita geser jadi *enabler*, dari *enabler* jadi *transformer*, dan selanjutnya jadi *disruptor*," ungkap Prof. Nuh.

Oleh karena itu, penting bagi Kominfo untuk memetakan masyarakat mana yang ada pada level *support*, *driver*, *transformer*, dan *disruptor*.

Pemetaan menjadi penting agar langkah kebijakan publik yang diambil tidak salah. Misalnya bila masyarakat tertentu masih di *supporter* dan dipaksa ke *transformer*, hal itu akan sia-sia.



Maka daripada itu, pembangunan infrastruktur harus paralel dengan pembangunan SDM. Prof. Nuh sadar betul bahwa pembangunan infrastruktur TIK saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan SDM unggul.

Oleh karena itu, dalam ikhtiar membangun SDM unggul, Prof. Nuh kembali melanjutkan program beasiswa yang pernah dibuat Kominfo pada masa kepemimpinan Dr. Sofyan A. Djalil. Namun bedanya, fokus beasiswa pada masa kepemimpinannya ialah memberikan beasiswa S2 yang berhubungan dengan dunia digital. Hak ini dimaksudkan untuk mencetak lebih banyak talenta digital.

Tidak hanya eksklusif pegawai Kominfo, Menteri Nuh bahkan membuka beasiswa S2 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda yang berprestasi. Ia ingin mengajak generasi muda saat itu untuk bersama-sama mengukir sejarah pembangunan bangsa melalui aktualisasi dari SDM unggul yang saling bersinergi satu sama lain.

## ● Pendekatan Pluriformitas

Dalam salah satu sesi Temu Kangen, Prof. Nuh mengangkat tentang pentingnya paradigma holistik dalam

membangun negara, dan tidak hanya berpikir tentang etnik dan suku tertentu.

Untuk itu, Menteri Nuh sangat mengutamakan pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan TIK di Indonesia. Ia juga mengarsir bahwa Indonesia yang pluriformis ini butuh pendekatan yang juga pluriformis, bukan pendekatan uniformis yang mengutamakan penyeragaman.

Prof. Nuh mengelaborasi bahwa semangat tersebut sudah terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang melambangkan persatuan dalam perbedaan.

Hal ini selalu diterapkan Menteri Nuh dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, termasuk saat memantau pembangunan infrastruktur TIK di daerah-daerah yang "dhuafa" secara kewilayahan.

Ia selalu menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat. Justru kalau dilarang, apalagi diseragamkan, tentu saja pembangunan infrastruktur TIK tidak akan berjalan baik.

Salah satu contoh ialah ketika dirinya berkunjung ke Papua. Kala itu, orang Papua menyembelih babi sebagai bentuk ucapan syukur berdasarkan adat budaya di sana. Menteri Nuh sebagai seorang muslim tetap menghormatinya.

"Di sebelah mereka menyembelih babi. Tidak masalah. Itu adat budaya. Saya sebagai seorang muslim menyembelih kambing dari sini. Nilainya tetap sama: ucapan syukur," tutur Prof. Nuh dengan begitu bijaknya.

Itulah bedanya pendekatan politik dan budaya. Kalau pendekatan politik, uniformitas (keseragaman) yang harus ditonjolkan. Namun pendekatan budaya lebih fleksibel dan mudah diterima, karena aspek yang ditonjolkan adalah diversity (keragaman).

Dalam konteks membangun bangsa, demikian Prof. Nuh, orientasi pembangunan harus pada kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Dan kemanusiaan itu sifatnya melampaui SARA. Hanya melalui itu, pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa diupayakan secara periodik.

## Pentingnya *Public Trust*

"Pemerintah selalu salah, kadang benar," ujar Prof. Nuh yang menyentak semua peserta Webinar Temu Kangen Menteri Kominfo dan melanjutkan, "Sebaliknya, masyarakat selalu benar, kadang salah."

Hal ini dikatakan Prof. Nuh untuk menggambarkan situasi dimana masyarakat acapkali mengkritik kebijakan pemerintah, entah benar ataupun salah.

"Harus siap dikritik. Kita benar saja dikritik, apalagi salah," pungkasnya.

Hal ini terjadi karena, ada semacam gap antara program/kebijakan pemerintah di satu sisi dan *public trust* di sisi lain. Menurut Prof. Nuh, gap inilah yang harus diperkecil.

Pada acara Temu Kangen tersebut, Prof. Nuh juga mengatakan bahwa peran Kominfo,



selain mengimplementasikan transformasi digital, adalah mengedukasi publik.

"Sebaik apapun program pemerintah tapi public trust tidak dibangun. Tak ada guna," ujar Prof. Nuh.

Lantas bagaimana? Caranya, adalah dengan mencari titik-titik yang menjadi beban dari public trust dan mengubah liabilitas tersebut menjadi aset.

Bagi Prof. Nuh, kebijakan publik dan komunikasi kebijakan publik merupakan dua hal yang sama-sama penting.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu benar-salah dan baik-buruk.

"Di satu sisi ada kebenaran, ada kebaikan, dan ada keindahan. Di sisi lain, ada logika dan etika," papar Prof Nuh dan menambahkan, "Logika itu lari ke kebenaran. Maka pendekatannya akan menjadi keras dan kaku (*hard*). Sedangkan etika itu larinya ke kebaikan dan kebijakan. Maka pendekatannya adalah *soft*."

Oleh karena yang dibuat pemerintah adalah kebijakan, dan bukan kebenaran, demikian Prof. Nuh, kebijakan publik pemerintah harus lebih mengarah pada unsur kebaikan dan pendekatan *soft*.

"Contohnya pas lampu merah kita berhenti. Pas Lampu hijau kita jalan. Tapi ada orang yang pas lampu merah, dia jalan," Prof. Nuh membuat analogi, "Kalau demi kebenaran dan aturan, kita tabrak. Tapi kalau demi kebaikan kita rem dulu."

Biar semuanya baik-baik saja, meskipun saya benar tapi ga baik. Apalagi yang lewat tronton. Selesailah."

Pendekatan *soft* yang selalu dilakukan Prof. Nuh pada saat menjabat sebagai Menteri Koinfo juga diamini oleh Dirjen SDPPI, Ismail.

Dalam acara Temu Kangen tersebut, Dirjen Ismail juga mengisahkan masa lalunya bersama Prof. Nuh.

Dikatakan bahwa dirinya melihat secara langsung bagaimana cara komunikasi dan diplomasi Prof. Nuh. Bagaimana Prof. Nuh melakukan *soft diplomacy* dalam salah satu pertemuan internasional tingkat menteri bersama Sekjen International Telecommunication Union (ITU).

Dirjen Ismail juga menceritakan dengan bangga bahwa sesaat setelah Prof. Nuh memaparkan programnya di bidang TIK, sontak semua peserta memberikan *standing applause*.

Menutup sesinya, Prof. Nuh menyampaikan terima kasih, telah mengadakan acara reuni Menteri sehingga bisa menjaga hubungan harmonis antara pemimpin yang terdahulu.

Prof. Nuh juga menyampaikan bahwa jargon Rumah Digital yang akhir-akhir ini terus digaungkan sejatinya baik. Namun, jargon tidaklah cukup. Harus diturunkan ke aksi riil, karena tugas Koinfo adalah menjangkau yang tidak terjangkau.

"Kita harus menjangkau yang tidak terjangkau sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman dengan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika," tuturnya.

Adapun kegiatan "Temu Kangen Menteri Kuliah Bareng Prof. Nuh" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koinfo dalam rangka 20 tahun Kementerian Koinfo via aplikasi Zoom tersebut dihadiri oleh total 200 orang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat eselon 1 Kementerian Koinfo dan pihak internal Kementerian Koinfo.





# 20 Tahun Kementerian Kominfo

## Kala Jurus Pantun Jadi Angin Segar

Cerita Kominfo Era Tifatul Sembiring



**Kalau nampak  
sekuntum  
melati, boleh  
dibidik untuk  
difoto.**

**Kalau diskusi  
soal IT  
(Information  
Technology),  
serasa masih  
Menteri  
Kominfo**



tutur Tifatul Sembiring  
(Menteri Kominfo periode 2009-2014).

Mengenal Tifatul Sembiring bagi kalangan ASN di Kementerian Komunikasi dan Informatika bukan hanya tentang sosok yang menonjolkan kepiawaiannya dalam memimpin. Pak Tif - demikian sapaan akrabnya - adalah Menteri Kominfo RI periode 2009-2014 yang cukup dekat dengan seluruh *civitas*. Tak jarang di setiap momen tertentu, Pak Tif mengakrabkan diri dengan jajaran pejabat eselon hingga ASN dengan cara berpantun.

Ciri khas saat bersyair pantun memang melekat dan memberikan pesan yang bermakna tentang bagaimana mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur negara, memberikan semangat dan dorongan motivasi agar terus bekerja untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta komitmen mewujudkan visi dan misi pemerintah era Kabinet Indonesia Bersatu.

Berdarah Minangkabau dan jago berpantun, rasanya tepat jika banyak orang menyebutnya sebagai 'raja pantun'. Melantunkan pantun bagi Pak Tif, merupakan suatu bentuk *ice breaking* untuk mewarnai suasana di kala sedang menjalani aktivitas kerja, rapat, pertemuan formal maupun non-formal agar tercipta produktivitas dan kreativitas. Sisi lain dari berpantun sebenarnya adalah cara membiasakan diri kita untuk

melestarikan bahasa ibu. Terlebih lagi, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari bahasa Minangkabau.

Artinya bahwa, dengan menggunakan syair-syair pantun dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini, kita termasuk meninggalkan jejak digital untuk terus membumikan kebudayaan dan kearifan bangsa. Pak Tif adalah salah satu tokoh bangsa yang ikut melestarikan pantun dengan ciri khasnya sebagai putra Minangkabau. Tentunya, irama pantun dari berbagai daerah lain di Indonesia pun memiliki ciri khas tersendiri.

Berbicara tentang perjalanan dan karir Tifatul Sembiring selama menjadi Menteri Kominfo, tak puas rasanya mengenalkan sepak terjangnya jika tidak diawali dengan pantun. Tujuh tahun berlalu sejak mengakhiri jabatan sebagai Menteri Kominfo pada 30 September 2014, Pak Tif kembali dipertemukan dengan sahabat dan rekan seperjuangan melalui kegiatan Temu Kangen Menteri spesial persembahan 20 Tahun Kominfo. Sebagian di antaranya masih mengabdikan di Kementerian Kominfo hingga saat ini. Meski berjumpa secara daring, dua pantun dari Pak Tif telah mengobati rindu akan kebersamaan dan suka duka.

Tak hanya mengobati rindu. Dua pantun itu juga secara langsung memperkenalkan karir dan pengabdian yang terus berlanjut untuk negeri, yaitu dengan menjadi wakil rakyat. Tifatul Sembiring terpilih sebagai Anggota DPR/MPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sumatera Utara I periode 2014-2019.

Mantan Presiden PKS itu kembali terpilih menjadi wakil rakyat dari fraksi dan dapil yang sama periode 2019-2024. Selama menjadi Anggota DPR-RI hingga sekarang, beberapa jabatan yang diembannya antara lain Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Ketua Fraksi PKS MPR RI, dan Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) PKS Komisi VII DPR RI.

baik yang memberikan dukungan kepada SBY dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik yang berlangsung saat itu.

Sewaktu pasangan calon Presiden SBY dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih dalam pemilihan umum tahun 2004, portofolio calon menteri di kabinet SBY-JK sebenarnya telah dikantongi Tifatul. Sebagai kader dari partai koalisi, Pak Tif menolak tawaran SBY dan rekan sesama partai untuk masuk dalam kandidat calon menteri. Alasannya waktu itu masih ingin mengurus dan membenahi internal partai.

Pinangan SBY di periode kedua kepemimpinannya (2009-2014), akhirnya berhasil menarik Tifatul

Lima tahun menjabat Menteri Koinfo, prestasi dan kinerja Tifatul tidak terlepas dari kerja keras para jajarannya, sebut saja Sekretaris Jenderal Basuki Yusuf Iskandar yang juga sebagai Dirjen Postel kala itu, Dirjen Aplikasi Informatika Ashwin Sasongko, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Freddy Tulung, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Budi Setiawan.

Selain itu, juga jajaran Staf Ahli Menkoinfo seperti Henry Subiakto dan Kalamullah Ramli yang kemudian diamanahkan juga mengisi posisi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sejak Mei 2014, serta beberapa pejabat eselon I maupun eselon II lainnya.

Didampingi oleh jajaran eselon yang memiliki pengalaman panjang di sektor komunikasi dan informatika, Koinfo di masa kepemimpinan Tifatul bisa dikatakan mencapai puncak, baik dalam masa transisi pengembangan sektor TIK berikut infrastruktur yang dibangun dan penguatan komunikasi publik, di mana salah satu tugas dan peran Kementerian Koinfo sebagai *government public relations* atau humas pemerintah.

“Sekali lagi, saya tentu mengucapkan terima kasih bahwa itu prestasi bukan hasil saya sendiri. Tapi itu adalah dari kawan-kawan yang memang luar biasa berjuang waktu itu,” katanya.

**Di Koinfo, saya sangat bangga dengan teman-teman dan berterima kasih kepada semuanya yang luar biasa kalau memberikan saran dan masukan**

## Amanah 'Dipinang' Koalisi jadi Menkoinfo

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Tifatul Sembiring dikenal bersahabat baik dengan Kepala Negara. Jauh sebelum berkoalisi dalam panggung politik tanah air, Tifatul telah mengenal SBY saat menjelang lengsernya Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid. Pertemuan keduanya berawal ketika SBY menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pak Tif menjadi salah satu sahabat

menuju Istana Negara. Internal partai kala itu menginginkan jabatan Menteri Usaha Kecil dan Menengah. Namun, posisi itu sudah lebih dulu dilirik oleh Demokrat, partai pemenang pemilu. Melihat portofolio dan *background* pendidikan sebagai lulusan teknologi informasi dan elektro komunikasi, Tifatul akhirnya 'dipinang' SBY sebagai Menteri Koinfo.

“Alhamdulillah, saya puas dan senangnya itu karena diberikan portofolio yang sesuai dengan bidang saya. Di Koinfo, saya sangat bangga dengan teman-teman dan berterima kasih kepada semuanya yang luar biasa kalau memberikan saran dan masukan,” kenang Tifatul.

## Medali untuk Pegawai di Masa Transisi

Kehidupan setiap orang berbeda-beda. Dalam kuasa Tuhan, apapun bisa terjadi. Seperti yang dialami sekitar lebih dari 30 ribu pegawai eks Departemen Penerangan. Kita tahu bahwa dalam kepemimpinan Presiden Gus Dur dua lembaga negara dibubarkan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Masa transisi dari Gus Dur hingga SBY di periode keduanya masih kental dirasakan para pegawai. Mereka seakan *ngomong* sendiri, merasa terpuruk karena di usia pengabdian dengan golongan 4D dan 4E yang akan mendapatkan posisi jabatan tertentu bisa hilang begitu saja saat Deppen resmi dibubarkan.

Tifatul kala itu ingin membangkitkan kembali semangat para pegawai sehingga harus diwongke. Salah satu



cara yang dilakukan adalah memberikan apresiasi dengan memberikan 'medali' sesuai rentan waktu masa kerja di Kominfo. Pegawai yang sudah bekerja selama 20 tahun mendapatkan medali emas, 15 tahun medali perak, dan 10 tahun medali perunggu serta piagam dan hadiah lainnya berupa uang. "Mereka merasa diapresiasi, maka saya ingin mengangkat itu dulu supaya kita semangat kerja lagi."

Tak hanya Tifatul yang mencoba membangkitkan semangat pegawai, para jajaran eselon I dan II mempunyai cara yang berbeda. Ada yang mengisi waktu luang dengan aktif ngeband, seni musik, olahraga, bahkan lagu mars Kominfo pun diciptakan di era Tifatul. Menurutnya, kondisi SDM Kominfo yang masih terpuruk karena Deppen dilikuidasi akan berdampak buruk pada kinerja. Oleh karenanya, Pak Tif betul-betul memberikan peluang kepada seluruh pegawai agar terbebas dari belenggu masa lalu dan kembali menatap masa depan bangsa dan negara serta masyarakat dalam memberikan *quality of service*.

Pembenahan internal lembaga dan menguatkan kembali semangat kerja pegawai menjadi konsen Kominfo. Membenarkan situasi itu, Basuki Yusuf Iskandar ikut membenarkan budaya kerja dan budaya organisasi begitu terpuruk. Demoralisasi sebagai departemen yang pernah dibubarkan mempunyai efek yang panjang sehingga Kominfo bisa dikatakan cukup tertinggal jauh secara kualitas kerja dan kuantitas SDM.

"Melihat situasi ini kita harus ada perubahan juga, apalagi waktu itu Ditjen Postel gabung dengan Kominfo. Jadi ada dua *culture* yang harus kita *manage* secara bagus, selain juga ada masalah demoralisasi dari Departemen Penerangan karena pernah trauma dibubarkan oleh Gus Dur waktu itu," jelas Basuki

Awal Tifatul pimpin Kominfo, Basuki menduduki posisi Dirjen Postel dan merangkap Sekjen. Sebagai saksi akan dinamika internal lembaga, bisa dikatakan pelaksanaan masa transisi atau eksekusi untuk membuat perubahan atas tantangan *culture* dari Deppen ke Kominfo ada di era Tifatul. Karena sosok kepemimpinannya yang terjun langsung dalam masalah peningkatan budaya organisasi, dari mendukung kegiatan hiburan hingga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada ASN berprestasi dan yang memasuki masa purna bakti.

Mengutip seorang ahli manajemen, Tifatul mengatakan; *If there is no philosophy so it lead become no followers, if there is no vision it will become confused, if there is no strategies so it will become fall start, if there is no organization so it will become no coordination, if there is no reward so it will become anxiety.*

Pesan tersebut dalam kacamata Tifatul diterjemahkan sebagai suatu hubungan timbal balik, di mana pegawai bekerja berdasarkan visi yang terarah dan mendapatkan reward atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

## Dari PNBP hingga Desa Berdering

Berangkat dari pembenahan internal lembaga hingga memberikan apresiasi kepada pegawai untuk terus semangat dalam bekerja, Kementerian Kominfo era Tifatul sukses meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam beberapa tahun.

Mengutip jurnal dari Kementerian Kominfo yang dirilis pada 28 Februari 2014, Pak Tif dianugerahi sebagai Most Inspirational – Minister oleh Majalah Men's Obsession pada acara Men's Obsession Decade Awards 2004-2014. Penghargaan itu sebagai wujud keberhasilannya meningkatkan PNBP. Misalnya pada tahun 2013, Kementerian Kominfo berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp13,59 triliun lebih atau sekitar 110,94 % dari target yang ditetapkan.

Tifatul menekankan bahwa kesuksesan dalam melewati berbagai tantangan tidak akan dicapai tanpa adanya SDM yang solid dan saling berkolaborasi. Hal itulah yang menurutnya penting untuk diperhatikan dan menjadi amunisi dalam mencapai tujuan bersama.

Tips sederhana yang sering dilakukan adalah dengan mengajak para pimpinan eselon hingga pegawai lainnya untuk membuat kegiatan rutin yang sekadar hiburan

dan menyolidkan tim. Seperti mengikuti berbagai jenis lomba di saat momentum peringatan hari kemerdekaan. Kendati demikian, hiburan dan kesolidan yang tercipta semakin menunjukkan semangat kerja yang meningkat.

Bahkan di era kepemimpinan Tifatul, Kementerian Kominfo hanya memerlukan sekitar Rp. 2,8-3 triliun untuk membayar gaji pegawai. Namun pendapatan tetap harus digenjut.

Salah satu PNBP sektor Kominfo yang paling banyak pendapatannya dari biaya spektrum dan lelang 3G. Pak Tif menyebutkan bahwa satu kanal 3G bisa menghasilkan sekitar Rp.500 miliar di bidang radio dan televisi dengan syarat harus terdaftar. Selain itu, Balai Monitoring (Balmon) di seluruh daerah diminta untuk menertibkan semua industri radio dan televisi dalam upaya meningkatkan capaian-capaian organisasi.

Dari sisi lain, dana Universal Service Obligation (USO) sukses menghantarkan program Kominfo hingga masuk ke pelosok desa dan kecamatan, yakni melalui program Desa Berdering. "Pak SBY waktu itu menargetkan bahwa seluruh desa harus berdering, seluruh kecamatan harus terkoneksi dengan internet, dan kemudian Palapa Ring waktu itu sudah sampai di Maluku Utara," kata Tifatul.

Dikutip dari sumber berita kominfo.go.id pada 24 Mei 2012, program yang bekerjasama dengan operator seluler tersebut menjangkau 32.800 desa dan mulai dinikmati masyarakat, terutama dalam pengembangan teknologi informasi. Selain program Desa Berdering, Kominfo kala itu juga membangun 5.784 jaringan internet di semua kecamatan di Indonesia. Pak Tif menyebutkan, pengadaan jaringan internet di kecamatan sebagai upaya pemberdayaan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat yang sehat dan aman.

Sebagai bagian dari upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan dan penggunaan teknologi yang

sehat dan aman, Tifatul di setiap kunjungan ke berbagai daerah hingga perguruan tinggi kerap memberikan kuliah umum dan pencerahan mengenai ekosistem internet mempunyai nilai tambah di bidang ekonomi.

Selain menyoal PNBP dan program Desa Berdering, salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pak Tif yang dinilai cukup kontroversi adalah dengan mencabut Research In Motion (RIM) BlackBerry. Pasalnya, pada akhir Januari 2013, RIM membuat keputusan mengejutkan dengan mengganti nama perusahaan menjadi *BlackBerry* (techno. kompas.com 4/2/2013).

*BlackBerry* awalnya adalah merek dagang untuk produk dalam genggam nirkabel, yang awalnya berupa pager surat elektronik yang dirilis tahun 1999. *BlackBerry* kemudian berevolusi menjadi telepon genggam dan tersohor karena fitur *push mail* dan aplikasi pesan instan *BlackBerry Messenger*. Saat serangan terorisme 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS), atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11, semua jaringan operator seluler mengalami gangguan, jaringan *BlackBerry* tetap berjalan baik sehingga media massa di Amerika Serikat memuji kehebatan *BlackBerry*.

Bahkan di tahun 2003, Oprah Winfrey mengatakan *BlackBerry* adalah gawai favoritnya. RIM ini laku keras di Indonesia dan menjual tanpa pajak. Tifatul kala itu mengatakan bahwa perusahaan tersebut mau seenaknya sendiri, padahal pelanggannya di Indonesia yang resmi saja mencapai 5 juta ditambah pelanggan tak resmi mencapai 3 juta pelanggan. Akhirnya, utusan RIM pun datang dan terjadilah *win-win solution*.

## Jurus Pantun Tangkal Situs Dewasa

Merespon banyaknya pertanyaan mengenai langkah-langkah tegas dalam memblokir situs dewasa atau pornografi yang sempat membuat heboh, Pak Tif mengawali jawabannya dengan sebuah pantun.

Menurut Tifatul, tugas eksekutif yang merupakan pelaksana dari undang-undang secara jelas menjawab persoalan tersebut. Ada tiga UU yang mengatur mengenai pornografi, diantaranya UU No 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Tiga dasar UU itulah yang menurut Tifatul untuk menertibkan komunikasi dan menyelamatkan anak bangsa dengan mengusung slogan Kebebasan yang Bertanggungjawab. Tak hanya pornografi yang dilarang, perbuatan lain yang melanggar UU seperti SARA, penipuan, perjudian, serta perbuatan lain yang bersifat mengancam harus ditangkal.

Terlebih saat itu, Bareskrim Polri telah berhasil membongkar kasus bisnis daring video porno anak dan menangkap tersangka yang mengaku hanya sebagai pengumpul tautan video porno sejumlah 120 ribu lebih file dari berbagai situs gratisan di dunia maya. Itulah sebabnya upaya ekstra keras dilakukan oleh Kementerian Kominfo sejak Tifatul Sembiring.

Pada tanggal 10 Agustus 2010, Tifatul telah mencanangkan awal pemblokiran konten negatif internet, terutama konten yang bermuatan pornografi. Kebijakan tersebut merupakan yang pertama kali dalam

sejarah Kementerian Kominfo secara masif dan komprehensif, mengingat sebelumnya pemblokiran semata-mata hanya *by request* dan itupun sifatnya *ad hoc* serta temporer. Penertiban dilakukan selain untuk efek jera, juga untuk menyelamatkan anak bangsa.

Tifatul mengajukan pertanyaan begini, "Apa yang terjadi di internet dalam waktu hanya 1 menit? Anak-anak masuk ke jaringan internet tanpa pengawasan." Bahkan hal serupa terjadi di banyak negara, di mana ada anak yang dirundung di jagat maya hingga bunuh diri, ada yang diculik melalui blackmail, dan masih banyak lagi ragamnya. Oleh karena itu, melek digital menjadi penting dan mendesak untuk anak-anak. Ancaman nyata bukanlah dari luar, melainkan disintegrasi karena muncul dari dalam dan disebar melalui internet.

Melihat urgensi ini, tugas Kominfo menjadi sangat strategis karena erat kaitannya dengan era informasi. Benar bahwa, Kementerian Kominfo bukan tukang blokir, tetapi memiliki tugas dan peran sebagai operasional manajemen dengan Undang-Undang sebagai panduannya.

Pengalaman sebagai Menkominfo selama lima tahun membuat Tifatul memahami bagaimana caranya menghadapi legislatif. Dalam arti lain, ketika bertemu dengan DPR tidak perlu ngotot. Sebab, Kominfo bekerja layaknya orang berada di atas pucuk pohon kelapa. Meskipun "digoyang" kemanapun, Kominfo harus menghasilkan sesuatu. Bahkan, Pak Tif tidak jarang dikritik DPR. Sehingga menjadi seorang menteri baginya perlu daya akrobat beragam gaya. "Mesti pintar-pintar mengatur komunikasi ke atas (Presiden), ke samping (DPR), ke internal Kominfo sendiri, dan masyarakat," cerita Tifatul.

Pribadi seorang eks Menkominfo ini lebih menekankan pada aspek komunikasi agar tetap lancar, tidak saja melalui pantun, melainkan lebih dahulu menyamakan komunikasi.

Jika sudah mencapai kesamaan volume frekuensi, maka segala urusan kenegaraan dan hubungan eksekutif dan legislatif tentu aman terkendali.

"Negara yang diperhitungkan adalah negara yang mampu mengelola informasi dengan baik," demikian pesan yang disampaikan Tifatul.

Di penghujung acara, Tifatul berharap keluarga besar Kementerian Kominfo tetap bisa semangat dan tetap berbuat baik untuk bangsa di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia dan Indonesia. "*Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih,*" pantun Tifatul mengakhiri dialog siang itu.

**Mengapa soto dicampur bawang, supaya di lidah enak terasa.**

**Mengapa porno mesti dilarang, karena merusak anak bangsa**



# CHIEF RA



## 20 Tahun Kementerian Kominfo

# PNBP Gede dan Status WTP Itu “B A JE...”

Cerita Chief RA



**Istilahnya saya dulu tukang minta izin. Ditjen Postel yang menjadi cikal bakal SDPPI dan Kominfo ini kan isinya teman-teman semua, partner sejak saya masih di swasta. Nah setelah masuk 'kan jadinya saya yang memberi izin. Dengan begitu saya juga bisa merasa empati bagaimana relasi antara yang membutuhkan izin dengan yang memberi izin. Dari situ secara pelan-pelan saya banyak belajar...**



tutur Chief RA  
(Menteri Kominfo periode 2014-2019).

“Yang saya rasakan Saat Chief RA menjadi Menteri Kominfo adalah kita betul-betul kita mengalami percepatan yang luar biasa. Kementerian Kominfo menjadi bercitarasa korporasi. Kita bergerak dengan luar biasa cepat. *Mindset* kita dihajar habis oleh saya yang merasakan betul itu. Kita enggak lagi bisa bersantai-santai. Kalau sebelumnya semua yang kita lakukan proses *oriented*, maka kehadiran Chief RA mengubah kita menjadi *output oriented*, bahkan *outcome oriented*,” kenang Ismail, Direktur Jenderal SDPPI Kominfo.

Ismail mencontohkan proses perizinan yang dulu tidak pernah dibayangkan bisa cepat akhirnya bisa dipangkas menjadi satu hari. Ketegasan Menteri Kominfo (2014-2019) Rudiantara yang biasa dipanggil Chief RA membuat SDPPI bisa menggelar *one day service* untuk perizinan. Caranya adalah dengan mengikuti “cara Chief RA” dalam mengubah proses bisnis, yaitu dengan meminta surat pernyataan di depan bagi pemohon sertifikasi.

Dalam hal perizinan ini terjadi perubahan sangat cepat dalam hal *mindset* yang ditanamkan. Kita melakukan

perombakan kultur yang baru yang lebih melayani masyarakat. Masyarakat melihat hasilnya, *output oriented*, bukan hanya dengan proses, proses, dan sebagainya. Aturan-aturan yang selama ini Kominfo banggakan jumlahnya justru dianggap bukan merupakan sebuah pencapaian. Beliau juga tidak pernah bangga saat kita bisa mengajukan Rancangan Peraturan Menteri, misalnya. Justru kita masih dikejar lagi dengan target untuk memangkas regulasi lama. Satu peraturan harus dapat “membunuh” lebih banyak peraturan sebelumnya.

Hal berkesan lainnya, bagi Ismail, adalah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kominfo yang besarnya nomor dua secara nasional. Bagi Chief RA, PNBP yang besar itu tidak membanggakan. “Uang preman”, kata Beliau. *Nothing*, “gak penting”. Sukses kita diukur jika industri berkembang baik. Kami cukup stress mendengar pandangan tersebut, namun dalam hati membenarkannya. Kami tidak “berani” lagi membanggakan pencapaian PNBP tersebut. Jumlah PNBP yang gede itu bagi Chief RA adalah “B aja” alias “biasa aja”.

“Kalau dengar cerita dari Balai Monitoring yang tersebar di seluruh Nusantara, *Chief RA* telah menanamkan citra yang baik tentang seorang pejabat yang tidak mau mendapatkan pelayanan berlebihan di daerah. Pak Menteri Rudi hanya mau diantar jemput cukup dengan mobil Toyota Kijang milik Balmon dengan tanpa protokol yang berlebihan. Hebatnya lagi, setiap kunjungan di daerah, *Chief RA* selalu menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Balmon. Alhasil, kunjungan beliau ke Balmon lebih sering dibanding saya yang menjabat Dirjen-nya,” kenang Ismail.

“Intinya, saya melihat bahwa kepemimpinan *Chief RA* pada saat itu bagi Kominfo itu benar-benar sebuah keberkahan. Suatu kesempatan bagi kita semua, terutama yang berlatarbelakang pegawai negeri sipil atau ASN ini untuk berguru tentang pendekatan korporasi yang merupakan sebuah pendekatan baru. Dan itu berhasil,” pungkaskan Ismail.

## Merangkul Ekosistem

*Chief RA* merasa beruntung ketika diberi amanah untuk mengemban jabatan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sudah mengenal sebagian dari Kominfo.

“Istilahnya saya dulu tukang minta izin. Ditjen Postel yang menjadi cikal bakal SDPPI dan Kominfo ini kan isinya teman-teman semua, partner sejak saya masih di swasta. Nah, setelah masuk ‘kan jadinya saya yang memberi izin. Dengan begitu saya juga bisa merasa empati bagaimana relasi antara yang membutuhkan izin dengan yang memberi izin. Dari situ secara perlahan saya banyak belajar. Berubah memahami situasi itu penting,” papar Menteri Rudiantara.

*Chief RA* merasa bahwa ilmunya dengan teman-teman di Kominfo, terutama di Ditjen SDPPI kurang lebih sama. Umumnya “mbulet” fokus pada pengawalan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Maka bersama seluruh jajaran

Kominfo kemudian mengulik tentang model ISO OSI yang memiliki 7 *layer* penyelenggaraan jaringan komputer atau digital. Terlihat bahwa selama ini Kominfo “bermain” hanya pada *layer* bawah, seperti *layer* fisik, data, dan jaringan. Pada *layer* atas, yaitu *layer* aplikasi, belum banyak disentuh dengan regulasi dan *policy*. *Chief RA* percaya bahwa lapisan aplikasi tersebut merupakan rimba baru yang menyimpan potensi yang amat besar. Sesuatu yang baru yang akan memiliki *value added* yang sangat besar.

*Chief RA* juga merupakan menteri yang melakukan pendekatan terhadap seluruh ekosistem. Tak segan-segan Beliau belajar dengan langsung berguru ke orang yang ahli dan kompeten. Bahkan tak segan merangkul pihak-pihak yang kritis dengan mengajaknya bergabung untuk melakukan perubahan “dari dalam”, ikut dalam perumusan kebijakan dan eksekusi di Kominfo. Direktur ICT Watch, Donny BU, adalah salah satu contoh tokoh

*Chief RA* juga bercerita bagaimana Beliau mendapatkan “komplain” dari pejabat di kementerian lain karena mengajak serta tenaga ahli yang notabene seorang pelaku industri. Saat itu mereka menganggap bahwa ketika merumuskan kebijakan, rapatnya harus steril dari objek kebijakan. Namun *Chief RA* bersikukuh bahwa dengan kompetensi yang dibawa sang tenaga ahli justru akan memperkuat validitas perumusan kebijakan. Apalagi untuk isu *fintech* yang masih sangat baru, dibutuhkan masukan-masukan dari pihak yang kompeten.

Komunikasi yang dijalin dengan semua pihak juga merupakan pendekatan yang ditempuh *Chief RA*. Baginya, boleh saja regulasi dan aturan ditegakkan, namun pendekatan non-legal juga tidak boleh ditinggalkan. Contohnya adalah terhadap korban-korban

**Aturan adalah aturan, harus ditegakkan ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berempati. Saya bisa tetap berempati. Terhadap salah seorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, saya dan teman-teman komunitas melakukan interaksi kemanusiaan.**

dari *non-government organization* (NGO) yang dirangkul untuk merumuskan tata kelola internet dengan mengajaknya bergabung sebagai tenaga ahli. Bagi *Chief RA*, pengakuan akan pencapaian itu haruslah *earned*, bukan *claimed*.

pelaksanaan UU ITE atas pasal pencemaran nama baik. Bisa jadi secara teknis prosedural, orang bisa dinyatakan bersalah dan dipidana. Namun tidak ada buruknya untuk tetap melakukan pendekatan kemanusiaan.

“Aturan adalah aturan harus ditegakkan ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa tidak bisa berempati.



Saya bisa tetap berempati. Terhadap salah seorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, saya dan teman-teman komunitas melakukan interaksi kemanusiaan. Contohnya terhadap salah satu terpidana di Lombok, saya sampai tahu seluk-beluk keluarga dan kondisi ekonominya untuk kepentingan support kemanusiaan. Bukan dengan uang APBN," tutur *Chief RA*.

## Tim 45

Begitu masuk di Kominfo *Chief RA* juga mendorong Sekretariat Jenderal untuk meninjau kembali struktur sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu concern *Chief RA* adalah terhadap para lulusan S2 dan S3 yang pernah mendapat beasiswa dari dalam dan luar negeri. *Chief RA* ingin mereka mendapat peran agar dapat memaksimalkan pengetahuan dan kemampuan yang mereka dapat.

"Kominfo itu berlebihan dalam kekurangan sekaligus berkekurangan dalam kelebihan, terutama dalam konteks sumber daya manusia. SDM kita banyak. Namun kalau kita lihat hal-hal yang di-*deliver* itu mungkin belum sebanding dengan jumlah SDM-nya. Dalam hal ini kita "banyak dalam kekurangan. Namun sebenarnya kita juga banyak punya kompetensi yang belum dimaksimalkan. Untuk maksud itulah tim yang kemudian disebut Tim 45 ini diharapkan menjadi solusi atas kekurangan tersebut. Kita kan punya banyak lulusan pascasarjana yang dibiayai oleh pemerintah. Mengapa itu tidak kita optimalkan?" tutur Menteri Rudiantara.

*Chief RA* punya hitungan tersendiri dalam membentuk tim 45 yang isinya anak-anak muda pegawai Kominfo yang umumnya belum punya jabatan. Menurutnya, Tim 45 itu anggotanya berumur di bawah 40 tahun. Jadi dalam dua atau tiga tahun ke depan, atasan mereka mulai pada pensiun. Mereka lah yang akan ambil alih. Jadi kalau pun, skenario buruknya, istilahnya mereka



tidak disukai atau bahkan dimusuhi atau "disiksa" oleh atasan selama dua atau tiga tahun, menurut saya *it's okay*, tidak apa-apa. Anggap saja itu jamu. Demi perubahan di masa depan.

Bagi *Chief RA*, tidak boleh ada batasan antara atasan dan bawahan ketika sedang membicarakan substansi. Pangkat hanya membedakan kewenangan dan tanggung jawab. Tapi dalam proses untuk mencari solusi kita harus relatif mengesampingkannya. Baik atasan maupun bawahan harus menyadari keterbatasannya. Pepatah Jawa bilang: lebih baik *bisa rumongso* (bisa menyadari/merasa) daripada rumangsa bisa (merasa bisa).

## Pemangkasan Proses Perizinan

Berasal dari pelaku usaha yang sering berinteraksi dengan Kominfo dalam soal perizinan membuat pemangkasan besar-besaran jumlah dan alur perizinan juga menjadi prioritas utama *Chief RA*. Apalagi visi Presiden Joko Widodo juga dengan sangat konsisten mengamankan pemangkasan perizinan.

"Kita itu punya 1500 izin radio yang harus diperpanjang setiap lima tahun. Artinya setahun itu harus 300 perpanjangan izin radio. Gimana kita mau memperpanjang izin satu per satu dengan singkat? Padahal izin perpanjangan itu prosesnya sama dengan izin baru. Kita harus cek ke lapangan. Padahal radio kan bukan hanya di Jakarta," gugat *Chief RA*. "Akhirnya saya minta mendorong agar izin otomatis diberikan selama mereka membuat pernyataan bahwa secara teknis telah memenuhi persyaratan."

Ini membuat prosesnya lebih singkat dan simpel. Tidak dibutuhkan lagi pengecekan ke lapangan yang menimbulkan biaya juga. Setiap izin hanya butuh satu atau dua tanda tangan. Penandatanganan izin pun didelegasikan kepada direktur, bukan lagi menteri atau eselon satu. Izin selesai dalam satu hari dan dapat di-download sendiri oleh pemohon.

"Saya ingat pada suatu Jumat malam, Pak Menteri harus menandatangani ratusan izin sampai pegal karena satu izin itu dibutuhkan sekitar enam kali tanda tangan. Kalau ada 100 izin ya berarti 600 kali tanda tangan. Kasihan sekali. Maka saya berterima kasih sekali dengan *business review* terkait perizinan ini. Dulu dibutuhkan sampai sebelas pejabat yang harus menandatangani izin radio ini. Sekarang menjadi jauh lebih singkat," saksi Renny Silfianingrum, Kasubdit Layanan Radio, Direktorat Penyiaran.

"Karena pemangkasan ini, saya juga sempat dikomplain oleh KPID yang tadinya memiliki kewenangan untuk ikut dalam proses perizinan," kenang *Chief RA*.

## BAKTI

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan salah satu tonggak bersejarah yang diukir dalam masa jabatan Menteri Rudiantara. Pada tahun 2018, *Chief RA* mengubah status Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI.

"Bukan saya lho ya yang menciptakan BAKTI. Tokoh-tokohnya ada Pak Anang (Anang Latif, sekarang Direktur Utama BAKTI) dan Bu Indah (Fadhilah Mathar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI) yang banyak berperan sampai ke penentuan logo-logonya. Saya hanya berbekal ballpoint untuk menandatangani. Namun yang jelas, saya melihat BAKTI merupakan akselerator pembangunan infrastruktur IC. *Mindsetnya*, pola pikirnya, orang-orangnya, kompetensi, dan kapasitasnya harus berbeda dengan

yang ada di Kominfo. Kominfo tetap Kominfo, namun BAKTI adalah sesuatu yang berbeda dan berorientasi ke depan," papar *Chief RA*.

Dengan kepercayaan yang tinggi, terutama dalam soal anggaran, yang diamanahkan ke BAKTI saat ini, *Chief RA* memaknai sebagai tanggung jawab yang juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, tak ada lain harus mengedepankan *governance, governance, dan governance. Good corporate governance.*

"Kehadiran *Chief RA* ini bagi saya membawa banyak perubahan cara pandang sebagai PNS selama 20 tahun. Pada tahun 2015 ya saya ingat betul advis Beliau tentang bahwa kalau ada aturan kita tak bisa tabrak. Tetapi kalau tidak ada aturan, itu artinya *opportunity*. Akhirnya ini kejadian juga pada saat kami merancang proyek Palapa Ring Jilid II dengan skema KPBU pada tahun 2015. Pada saat itu aturannya belum begitu lengkap. Saya datang Kementerian Keuangan belum jadi aturannya. Ke Bappenas baru beberapa proyek KPBU. Berbekal inspirasi dari *Chief RA* kami jalan terus, melihatnya sebagai peluang. Alhamdulillah akhirnya Palapa Ring jalan dan kemudian baru keluar aturan aturan berikutnya yang



justru menguatkan apa yang sudah dilakukan di proyek Palapa Ring,” cerita Anang Latif, Direktur Utama BAKTI.

Anang juga terkesan dengan cara berkomunikasi Menteri Rudiantara yang sering menafikan sekat-sekat. Tak jarang Beliau, dalam kapasitas sebagai menteri, langsung menemui pegawai yang bukan eselon satu di kementerian lain untuk membahas tentang suatu substansi. Bagi Pak Menteri, kunci suatu isu seringkali justru berada di tataran level direktur ke bawah. Candaan Beliau: Negeri ini sebenarnya diatur oleh para Kasubdit, sedangkan Direktur dan Dirjen hanya meneruskan apa yang sudah di-draft di bawahnya.

“Cerita kekaguman mereka, eselon bawah, yang pernah ditemui secara langsung seorang menteri itu tak habis-habisnya ke saya. Mereka bangga. Belum pernah terjadi sebelumnya,” tutur Anang Latif.

## WTP

Dalam tahun kedua masa kepemimpinan Rudiantara, akhirnya laporan keuangan Kominfo mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Status tersebut

bertahan selama empat tahun sampai dengan akhir masa jabatan Beliau. Terhadap hal ini Inspektur Jenderal Kominfo, Doddy Setiadi, punya kesan: “Bagi *Chief RA*, predikat WTP itu bukan merupakan prestasi. Setiap kementerian ya wajar dan wajib untuk mencapai standar tersebut. Setiap kementerian ya memang harus WTP. Alhamdulillah sampai sekarang kami bisa mempertahankan dengan baik berkat kontribusi dan kerjasama dari seluruh jajaran di Kementerian Kominfo.”

Pada akhir masa jabatannya, *Chief RA* juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua bantuan semua pihak di Kominfo hingga bisa melewati amanah jabatan secara lancar sampai akhir.

“Saya juga bersyukur 5 tahun melewatinya tanpa di-*reshuffle*. Karena kan berapa kali itu ada *reshuffle*, dua kali kalau enggak salah. Ya saya syukuri itu saja. Kita tahu bahwa berbeda dengan korporasi yang betul betul mengandalkan kinerja, di jabatan menteri itu ada aspek non-teknisnya juga. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan teman-teman di Kominfo, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya,” pungkas *Chief RA*



**Kominfo itu berlebihan dalam kekurangan sekaligus berkekurangan dalam kelebihan, terutama dalam konteks sumber daya manusia. SDM kita banyak. Namun kalau kita lihat hal-hal yang di-deliver itu mungkin belum sebanding dengan jumlah SDM-nya. Dalam hal ini kita “banyak dalam kekurangan”. Namun sebenarnya kita juga banyak punya kompetensi yang belum dimaksimalkan.**





# 20 Tahun Kementerian Kominfo

## Wajah Baru Deppen dalam Desentralisasi Komunikasi

Johnny Gerard Plate



**... pada kesempatan ini, saya mengingatkan semua jajaran Kementerian Kominfo untuk tak melupakan jasa seluruh pejabat-pejabat Kominfo terdahulu, mulai dari para Menteri, ASN dan mitra-mitra Kominfo dari awal kementerian ini sampai sekarang....**



Seiring perjalanannya, pada bulan September tahun ini, Kominfo akan genap berusia 20 tahun. Menyongsong 20 tahun usia perjalanan Kementerian Kominfo membidangi komunikasi dan informatika, tentunya banyak pasang surut yang dialami. Dalam melangkahi masa lalu, masa kini, dan masa depan dari Kominfo, tugas yang diemban Menteri Johnny sejak didapuk sebagai Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019, tidaklah sederhana. Untuk itu Menteri Johnny mengajak seluruh jajaran kementerian yang ia pimpin untuk menjadikan Hari Ulang Tahun Kominfo ke-20 pada tahun ini sebagai momentum untuk merefleksi diri.

“Pertama, saya mengucapkan selamat menyongsong Hari Ulang Tahun, Kominfo. Saya enggak tahu yang ke berapa, 20 atau yang ke-15, karena sempat juga Kominfo itu dalam bentuk Kementerian Negara pada awalnya. Kemudian, berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Namun demikian, kesempatan hari ulang tahun ini bagus juga menjadi momentum refleksi kita,” kata Menkominfo.

Ia menuturkan, perjalanan Kominfo ini dimulai dari awal kemerdekaan. Jika melihat kembali ke belakang, menurutnya, sejak tahun 1945 dibentuk Kementerian Penerangan dan karenanya Kementerian Kominfo telah bermetamorfosa secara luar biasa. Dari peran penerangan dan secara perlahan beranjak menjadi Kementerian Infrastruktur yang baru ini.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengingatkan semua jajaran Kementerian Kominfo untuk tak melupakan jasa seluruh pejabat-pejabat Kominfo terdahulu, mulai dari para Menteri, ASN dan mitra-mitra Kominfo dari awal kementerian ini sampai sekarang. Termasuk mantan Menteri Kominfo, Almarhum Samsul Muarif yang sudah mendahului kita,” ajak Menteri Johnny.

## Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!

- Bung Karno

Menteri Johnny juga mengisahkan, dirinya ditunjuk menjadi Inspektur Upacara (Irup) mewakili Pemerintah dalam pemakaman mantan Menteri Penerangan Almarhum Harmoko, di Kalibata, Jakarta, Senin (05/07/2021).

Dalam benak Menteri Johnny, kedua pejabat negara itu telah mewarnai, meletakkan noktah-noktah hebat di dalam riwayat dan perjalanan metamorfosa Kominfo. Dalam perjalanan panjang itu dibentuk oleh banyak titik menjadi suatu garis dan ia mengaku hanyalah salah satu titik dari garis panjang perjalanannya Kementerian Kominfo.

"Saya menyambung di salah satu ujungnya. Untuk itu, jangan lupa kita mendoakan mereka semua yang sudah mendahului kita dan harapan, tentu karya, karsa, yang mereka buktikan bagi negeri, mendapat tempat yang layak dalam kehidupan dan kekekalan mereka di akhirat," imbuhnya mengingatkan.

Oleh karena itu, guna menyambung tugas dari para pendahulunya, Menteri Johnny mengatakan seluruh bagian dari Keluarga Besar Kementerian Kominfo. membutuhkan kolaborasi dengan ekosistem.

"Kominfo nggak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan mitra-mitranya. Saya ini hanya satu bagian dari 3.000an lebih organik

Kominfo. Tidak mungkin saya bekerja sendiri tanpa bergandengan tangan, bekerja bersama-sama dengan pejabat-pejabat dan Staf Organik Kominfo," kata Menkominfo.

### Metaformosa Peran

Keberhasilan yang diperoleh Kominfo saat ini, menurut Menteri Johnny adalah keberhasilan kolektif bersama dan seiring perkembangan mengalami metamorfosa. Dari yang dahulu dikenal sebagai Kementerian Penerangan sebagai perangkat yang sentralistik pada era itu, kini menjadi pemberi transmisi komunikasi dan kebijakan pemerintah serta kebijakan negara.

"Agar dipahami, dimengerti oleh rakyat, sehingga mereka bisa mengambil bagian di dalam gerak langkah kehidupan bernegara dan kehidupan pembangunannya. Begitu panjang perjalanannya menjadi sentral komunikasi pemerintah dan sentral komunikasi negara," paparnya.

Peran komunikasi pemerintah dan komunikasi negara ini berubah seiring dengan perubahan zaman dari era sebelumnya ke era reformasi. Jika dahulu Kementerian Penerangan dengan media komunikasi yang terbatas, maka sekarang fungsi penerangan itu sudah dilengkapi dengan media komunikasi tanpa batas yang melintasi ruang dan waktu, yaitu media sosial.

"Komunikasi dalam bentuk *top-down* sentralistik. Eranya pun luar biasa bedanya. Jika dahulu Sabang sampai Merauke yang kita nyanyikan atau lafalkan sulit dijangkau, kini jarak itu bisa ditempuh dalam hitungan sepersekian detik melalui komunikasi," ungkap Menteri Johnny,

Namun demikian, menurut Menteri Johnny, pandangan masyarakat terhadap *branding* Kominfo masih melekat tebal dengan *image* Kementerian Penerangan zaman dahulu. Oleh karena itu, Kominfo kini tak lagi menerangkan tentang harga cabai keriting, harga garam karena untuk menjelaskannya sudah menjadi tugas dari Kementerian Perdagangan. Pun begitu dengan persoalan inflasi, deflasi, masalah fiskal, penyampaian informasinya sudah menjadi tugas Kementerian Keuangan.

"Ada satu peninggalan *image* maupun pesan masyarakat yang harus diperhatikan dari hebat dan suksesnya para tokoh-tokoh Kementerian Penerangan sebelumnya, yang membuat memori masyarakat itu begitu kuatnya mengingat Kementerian Kominfo sebagai Kementerian Penerangan hingga hari ini," ungkapnya.

Riwayat Pandangan itu diakui Menkominfo masih melekat di benak masyarakat. Untuk itu, ia menilai sudah menjadi tugas penting Kominfo dalam memberikan komunikasi ke sektor-sektor, menindaklanjuti, mengorkestrasi serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik.

Dalam mengorkestrasikan komunikasi kepada masyarakat, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan sarana prasarannya untuk memastikan bahwa komunikasi publik istana yang disampaikan presiden atau yang ditunjuk oleh kepala negara tersampaikan. Salah satunya melalui konferensi pers.

"Tugas Kominfo saat ini adalah mengorkestrasi, menyiapkan sarana dan prasarana untuk dilakukan komunikasi publik yang saat ini sudah terdesentralisasi dan disampaikan oleh kementerian/lembaga maupun sektor terkait. Kominfo memfasilitasi dan menyiapkannya. Jadi, masyarakat



tidak tahu bahwa setiap kali ada konferensi pers atau pernyataan yang ditampilkan pada *news bar* atau *running text* TV atau apapun yang ada di media sosial, itu kan disiapkan Kominfo. Namun, juru bicaranya atau yang menyampaikan itu melalui sektor terkait," tandasnya.

Menkominfo menyatakan, orkestrasi dan komunikasi yang desentralisasi ini dilakukan sebagai bagian dari tugas-tugas penerangan negara dan pemerintahan yang dilakukan dalam *branding* yang baru.

"Demikian halnya pada saat mantan presiden, Ibu Megawati membentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika Informatika pada 20 tahun yang lalu. Kala itu, muncul satu gagasan teknologi digital yang harus dikelola dalam kehidupan bernegara," jelasnya.

Secara khusus, Kominfo berkembang mulai tahun 2005. Bergeser perannya dari Kementerian Penerangan menjadi Kominfo dengan wajah baru sebagai Kementerian Infrastruktur yang akan datang karena tugasnya adalah mengakselerasi terkait dengan infrastruktur di berbagai level jenis infrastruktur telekomunikasi, dari hulu sampai ke tingkat hilir.

Komunikasi sentralistik ke desentralistik ini membawa Kementerian Penerangan menjadi Kominfo saat ini dan pada saatnya nanti *branding*nya berubah sebagai Kementerian Digital dan Infrastruktur.

"Jadi ada pergeseran-pergeseran akibat terjadi pandemi Covid-19, sehingga Kominfo merampungkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 dengan empat fokus utama sesuai arahan bapak presiden," tutur Menteri Johnny.

Keempat Peta Jalan Indonesia Digital itu terdiri dari percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital dan terakhir menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.

## ***Big hug with a good heart for all of you. Ayo bekerja bersama-sama, setiap karya adalah keberhasilan bersama kita.***

Johnny G. Plate

"Keempat peta jalan ini dibuat untuk mempercepat transformasi digital. Nah, di situ metamorfosa aktivitas seluruh perangkat Kominfo juga harus kita lakukan. Satu hal, Covid-19 ini *blessing in disguise* bagi Kominfo, di mana kesiapan akan menentukan sekali pondasi dasarnya mengantar masyarakat Indonesia untuk memasuki ruang digital," tegas Menteri Johnny.

Menteri Johnny menilai, arahan presiden memberikan kesempatan pada Kominfo untuk menyiapkan masyarakat menjadi bagian dalam gerak baru atau gerak digital.

"Perubahan besar metamorfosa dari Kominfo ini harus dari kita semuanya, mulai dari menteri sampai yang bekerja di garis depan dan di garis belakang paham betul, karena pekerjaan yang tidak gampang. Belum ada benchmark-nya di dunia yang tepat saat ini tetapi kita harus siap melaksanakan," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta semua pegawai Kementerian Kominfo untuk memberi yang terbaik dalam bekerja. Ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jauhilah rasa curiga agar energi positif tercurah demi bangsa dan Negara.

"Saya juga meminta maaf bila suara saya begitu lantang karena saya lahir di daerah yang lokasi rumah antar penduduk berjauhan jaraknya sehingga harus berteriak keras. *Big hug with a good heart for all of you.* Karena saya baru 2 tahun, ayo bekerja bersama-sama. Setiap karya adalah keberhasilan bersama kita. Mudah-mudahan kita dapat meminimalisir kekurangan dalam bekerja," tutup Menteri Johnny mengakhiri pemaparannya.

SYAMSUL | SOFYAN | M. NUH  
TIFATUL | CHIEF RA | JOHNNY

# WORDS OF FAME

## 20 Tahun Kementerian Kominfo

# Tutur Bijak Sang Menteri

Oleh:

**Dyah Purwaningrum** | Analis Anggaran Ahli Madya | Biro Perencanaan Kemkominfo



***The wisdom of the wise and the experience of the ages are perpetuated by quotations.***



- Benjamin Disraeli

Ada falsafah Jawa yang mengatakan bahwa “Urip iku Urup” atau ‘Hidup itu Nyala’. Artinya hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan menjadi manusia yang hanya mencari cara untuk mendapatkan manfaat apalagi memanfaatkan orang lain. Dunia akan jauh lebih baik apabila setiap kita yang hidup dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak di sekitar, karena “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

Setiap peran yang kita lakoni tentunya memiliki *purposes*. Tenaga kesehatan, tenaga pengajar, pedagang, petani, nelayan, pekerja media bahkan sebagai ASN Kemkominfo sekalipun, kita sebaiknya mampu memberikan manfaat buat lainnya. Rasanya kita tidak harus menunggu diberi amanah

menjadi Menteri oleh Presiden RI agar mampu berkontribusi lebih untuk negeri. Barangkali dengan mencoba memahami, memaknai serta menerapkan prinsip, pemikiran, petuah-petuah bijak dalam kutipan yang kerap Menteri Sofyan Djalil (SD), Muhammad Nuh (MN), Tifatul Sembiring (TS), Rudiantara (RA) dan Johnny G. Plate (JP) gaungkan.

Lima Menteri Kominfo ini masing-masing mempertuan kutipan bijak yang terlalu memesonakan jika hanya untuk dikenang. Setiap kutipan yang disampaikan dalam pelbagai kesempatan rasanya masih dan akan selalu menarik untuk dijelajahi dan diteladani. Kebanyakan kutipan yang terserak itu sarat akan tafsir, pemikiran, dan nasihat dalam menjalani kehidupan secara pribadi maupun organisasi.



## Mindset

Mari mulai dengan keberanian untuk menghadapi sebuah perubahan pola pikir (*mindset*), dengan tidak berlama-lama tinggal di zona nyaman (*comfort zone*). Menteri RA menjelaskan tentang tuntutan untuk mengubah *mindset* dan terus mencari cara baru dimana berpikir di luar kotak (*'think outside the box'*) sudah tidak lagi mencukupi, yang lebih diperlukan adalah tidak mengkotakkan atau *"no box"*.

Lantas apa sebenarnya makna dari *'no box'*? Kalimat lengkap kutipan terkenal dari Ziad K. Adelnour pria berkebangsaan Amerika yang lahir di Lebanon dan merupakan penulis buku *Start-Up Saboteurs: How Incompetence, Ego, and Small Thinking Prevent True Wealth Creation* ini adalah *'Don't think outside the box. Think like there is no box.'* Dijelaskan bahwa anjuran *'think outside the box'* adalah salah karena hanya akan menciptakan perangkap pikiran yang membatasi serta tidak diinginkan, yang menghalangi kita untuk melihat apa yang justru mungkin terjadi.

Anggap saja terdapat kotak berisi segala hal yang telah kita pelajari selama kita hidup yang telah didasari oleh pengalaman baik menyedihkan atau menyenangkan. Ketika kita mengakui keberadaan kotak tersebut, kita membatasi ruang gerak kita sendiri untuk berpikir hal baik lain dan hanya terpaku pada si kotak berikut isinya. Sebaliknya, untuk melakukan karya hebat lainnya, berpikirlah dengan tidak mepedulikan adanya si kotak tadi. Jika ingin menciptakan ide terbaik, buatlah asumsi baru: *'there is no box'*.

Menteri RA pernah menjelaskan alasan kenapa selama periode kepemimpinannya, beliau berani tidak mengacuhkan (cenderung menabrak) peraturan yang eksisting. Peraturan dan regulasi memang harus ditegakkan, tetapi dalam pengimplementasian di lapangan, empati tetap bisa diberikan. Kebijakan urgen lain dapat diputuskan (oleh Menteri) guna

**Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!**

- Bung Karno

memberikan nilai tambah dengan mengindahkan atau mengganti peraturan yang telah ada, jika memang dinilai peraturan yang berlaku membatasi ruang gerak.

Akibat pandemi Covid-19, ruang gerak kita juga menjadi terbatas. Tetapi lantas jangan dijadikan alasan kita berhenti bekerja secara optimal. Jangan biarkan kotak berlabel "PPKM" atau bahkan *"refocusing anggaran"* yang berjilid-jilid membuat kita berhenti memberikan yang terbaik. Jangan merasa sesak atas tirisnya tabungan semenjak perjalanan dinas (perjadin) terhenti akibat kebijakan bekerja di rumah (WFH). Walau (kata orang bijak di Kemenkeu) tidaklah tepat menjadikan perjadin sebagai sandaran hidup ASN. Menurut kaidah penganggaran keuangan negara, pembiayaan perjadin berasal dari uang rakyat (APBN) sehingga pelaksanaannya harus tetap menjamin terwujudnya tata kelola pengelolaan keuangan negara yang bersih, profesional dan akuntabel walaupun perjadin merupakan bagian dari melaksanakan tugas negara.

## Bekerja untuk Negara

Jadi, pada hakikatnya kita semua (utamanya ASN) bekerja untuk negara. Yup! Kita bekerja untuk negara, bukan untuk pemerintah, bukan untuk kementerian dan bahkan bukan untuk atasan/pimpinan. Menurut Menteri MN, paradigma bekerja sekedar untuk pemerintah patut diubah menjadi

bekerja untuk negara. Karena pemerintah dan segala atributnya bisa berganti (setiap 5 tahun) atau digantikan, sementara negara untuk selamanya.

Negara yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari dampak pandemi Covid-19. Negara yang bertekad untuk tetap tangguh dan tumbuh. Di masa inilah, peran kita sebagai bagian dari abdi negara sangat diperlukan utamanya untuk memenuhi pekerjaan rumah (PR) *'janji kemerdekaan'*. Janji (kerja) sesuai Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara khusus, PR yang dipesankan Menteri MN kepada Kemenkominfo adalah janji kepada para kaum dhuafa yang secara bahasa berarti kaum yang lemah atau tidak berdaya. Yakni kelompok dhuafa tertentu dari sisi kewilayahan, sisi sosial dan dhuafa dari sisi ekonomi. Janji untuk memikirkan mata rantai yang terlemah dengan menjangkau yang tidak terjangkau, termasuk di dalamnya dhuafa sinyal telekomunikasi. Masa kini, arah pembangunan telekomunikasi adalah dari hilir ke hulu, dimana sebelumnya adalah hulu ke hilir. Kemenkominfo punya peran besar untuk mengurangi dan memitigasi hal tersebut. Dan, *pentahelix* bisa menjadi vital dalam penyelesaian PR *'Janji Kemerdekaan'* itu. Seperti dituturkan Menteri JP bahwa kunci keberhasilan kita adalah keberhasilan *collective*.

**The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.**

- J. Maxwell

tujuan secara fleksibel, kemudian pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan daerah. Sebagai faktor utama dari suksesnya implementasi *collaborative governance* adalah pengalaman, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan.

## Added Value

Lantas, Sumber Daya Manusia (SDM) seperti apa yang dapat menelurkan kepemimpinan yang kita butuhkan guna mencapai tujuan bersama 'Indonesia Emas' pada tahun 2045 nanti? Sebab negara maju adalah negara yang memiliki SDM bermutu yang juga ditentukan dari kualitas pendidikan. Benarkah sulit sekali mencari SDM yang qualified dan kompeten untuk menjadi pemimpin seperti kata Menteri SD? Lalu bagaimana dengan kualitas ASN Kemenkominfo?

Sebagaimana juga dituturkan Menteri RA, Kemenkominfo itu berlebihan dalam kekurangan tetapi juga kekurangan dalam kelebihan. Maknanya, terdapat banyak SDM tetapi *value* yang di deliver belum terlihat sementara SDM berkualitas yang jumlahnya sedikit (tetapi) kurang dimaksimalkan. Sementara imbuhan Menteri MN, regulasi yang lebih baik (*good policy*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan semakin mudah tercipta apabila SDM di pemerintah yang mengemban fungsi sebagai regulator lebih advance dari SDM yang tersedia di sektor swasta.

Selama kita yakin memiliki '*value*', apapun jabatan kita baik Menteri/Dirjen/Direktur atau masih staf level paling bawah sekalipun, karena urusan jabatan itu menempati posisi tertentu bagian takdir dan selama kita mampu

memberikan '*added value*' niscaya Indonesia pasti jadi bangsa besar. Kerjakan dengan baik pada (saat) jabatan apapun itu diamanahi kepada kita, dimana saja kita ditempatkan. Tidak ada sesuatu yang percuma. *Do the best*. Negara tidak pernah mempersoalkan apa latar belakang sosial kita, tetapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita berikan buat negara.

Menteri SD lebih lanjut menjabarkan bahwa bentuk dari *added value* bisa diberikan dari hal yang paling kecil, tidak perlu hal besar, selama memberikan nilai tambah sedikitnya bagi lingkungan terdekat. Jadi, hilangkanlah rasa gengsi dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang dipandang kecil dan bahkan cenderung sepele. Oleh karenanya, berinvestasi dan fokus pada pembangunan SDM yang berkarakter menjadi penting untuk mendukung masa depan Indonesia. Moreover, Menteri JP turut menyatakan dengan tegas bahwa Kemenkominfo hanya akan sukses *men-deliver* yang terbaik dengan dukungan dari dalam, keahlian dan pemahaman (SDM) menjadi prasyarat utama.

## Pentahelix

Dalam *pentahelix* banyak unsur diajak untuk berkoordinasi dan membangun simpul sinergi guna mempercepat akselerasi transformasi digital. Kata *pentahelix* sendiri memang terdengar elok dan terkesan rumit. Secara sederhana, 'penta' berarti lima sedangkan 'helix' artinya jalinan. Konsep yang diyakini jika para pemangku kepentingan dalam suatu kolaborasi *pentahelix* bekerja secara sinergi, maka akan melahirkan inovasi-inovasi dan ekonomi berbasis inovasi. Model kerja *pentahelix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan yaitu akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media dimana semua unsur tersebut dikelola dengan dasar pendekatan *collaborative governance*.

Pada *collaborative governance*, terjadi keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan lembaga publik lainnya dimana semua unsur terlibat satu sama lain untuk mencapai



**...ask not  
what your  
country can  
do for you—  
ask what  
you can do  
for your  
country.**

- John F. Kennedy

## Humanis

Peningkatan kualitas SDM pada masa kepemimpinan Menteri SD, difokuskan dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk pendidikan lanjutan ASN

Kemenkominfo. Banyak ASN yang bahkan masih berstatus CPNS pada masa itu mendapatkan beasiswa S2/S3. Kalau menurut Menteri MN, setiap SDM perlu diberikan apresiasi dan di "wongke" (bahasa Jawa: memanusiaikan manusia) karena apabila setiap kita menyadari bahwa apa yang kita ketahui tidak sebanding dengan apa yang tidak diketahui, tentu kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar.

Lanjut Menteri MN, kita perlu belajar pendekatan yang humanis tentang kesatuan waktu. Bahwasanya tidak elok jika kita hanya memikirkan masa kini tanpa memikirkan masa depan dan tanpa mempertimbangkan masa lalu. Karena apa yang telah kita capai di masa kini adalah hasil dari kerja keras (para pemimpin) masa lalu sebagai modal untuk meraih yang lebih lagi di masa depan. Masa depan memerlukan visi yang jelas, tanpanya kita akan *confused*. *Clear vision* adalah yang utama, harus paham apa yang akan kita tuju dengan terus menggelorakan semangat, optimis untuk masa depan.

Optimis bahwa pandemi Covid-19 pasti akan berakhir, sebab layaknya perang, tidak pernah ada hujan yang tidak berhenti, saran bijak Menteri SD. Malahan, menurut Menteri JP, pandemi ini justru harus dipandang a *blessing in disguise* dan dijadikan momentum untuk meneruskan perjuangan mengawal transformasi digital. Di masa pandemi inilah, kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dasar, utamanya internet yang handal semakin dirasakan. Dengan begitu besarnya anggaran yang diberikan kepada Kemenkominfo,

'janji kemerdekaan' itu akan segera dapat diwujudkan bersama. Sebagaimana pesan Menteri MN bahwa bertransformasilah dari saya menjadi kami, (lalu) kami menjadi kita. Terlebih, kata Menteri TS: "*we are stronger when we are connected*"



**Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.**

- R.A. Kartini





## Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna.

- Bung Hatta

### Logika. Etika. Estetika

Sekarang hanya diperlukan semangat, kerja keras dan kerja cerdas dari kita semua. Tugas Kemenkominfo tidak bisa disebut sederhana juga tidak boleh dibilang sangat sulit karena kita memiliki banyak program kerja yang sudah direncanakan dengan baik (silahkan dipelajari Renstra Kemenkominfo 2020-2024), tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Program kerja itu antara lain menambah BTS/lastmile di ribuan desa/kelurahan, pembangunan Pusat Data Nasional, penerapan Digitalisasi Penyiaran, optimalisasi spektrum melalui *farming* dan *refarming*, hingga gelaran akses internet di ribuan lokasi baru.

Internet menurut Menteri TS layaknya rimba raya, dimana utilitasnya perlu menjadi perhatian bersama. Demi menjaga NKRI, diperlukan literasi (serius) sebab national security threat bukan datang dari luar, tapi berbentuk national disintegration. Oleh karenanya, kita juga perlu mengedepankan logika, etika dan estetika sebagaimana disarankan Menteri MN. Walau masyarakat (umumnya) perlu dilepas berkreasi dalam memaknai kemajuan teknologi, akan tetapi sudah menjadi tugas Kemenkominfo memastikan kebebasan yang bertanggungjawab dalam penggunaannya guna

menyelamatkan (anak) bangsa. Memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik.

*Nonetheless*, tulisan ini hanya sebatas bahan diskusi warung kopi, bukan materi presentasi di Zoom Meeting yang semakin tidak mengenal zonasi waktu dan tempat semenjak pandemi. Esensi dari tulisan ini sekedar menyusuri kembali jejak dari kutipan-kutipan khas dan menarik para Menteri Kominfo yang krusial untuk dimaknai dan layak untuk diperjuangkan bersama agar kita (sebagai individu dan bagian dari entitas Kominfo) bisa memberikan yang terbaik buat negara. Yuk, kita berubah dan bersiap diri untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Nyalakan hidupmu!



**Dyah Purwaningrum**  
Analisis Anggaran Ahli Madya  
Biro Perencanaan Kemkominfo

# Lika Liku Perkembangan Aplikasi Informatika Indonesia





Pembentukan kembali Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika pada tahun 2001 tentunya membawa tantangan tersendiri sejak Departemen Penerangan dibubarkan pada tahun 1999. Ashwin Sasongko yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diminta untuk menjadi Plt. Deputi Telematika, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika merangkap Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi.

Tentunya bukan hal mudah untuk memimpin Kementerian yang baru terbentuk. Terlebih pada tahun 2001 belum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) asli rekrutan Kominfo. ASN yang ada merupakan leburan dari berbagai unsur dengan sebagian besar merupakan eks Departemen Penerangan yang telah dibubarkan. Sehingga Ashwin merasa perlu mengambil kebijakan manajemen untuk menempatkan terlebih dahulu orang-orang dari berbagai Lembaga. Kebijakan ini tentu ditempuh untuk menguatkan dan mempercepat kinerja Kemeneg Kominfo kala itu.

“Menggabungkan pekerjaan dan kegiatan yang sudah berjalan lama ke sistem baru itu tak mudah dioperasikan. Soal penggabungan senam pagi yang biasa dilakukan Kominfo pada hari Jumat dan Postel pada hari Selasa juga tidak mudah. Apalagi di tahun-tahun awal harus mengikuti aturan anggaran yang ketat, sementara Menteri Sofyan Djalil yang saat itu masih mengurus perdamaian Aceh tiba-tiba ‘menghilang’ dari kantor dan terbang ke Aceh untuk urusan tersebut,” kenang Ashwin dalam FGD 20 Tahun Kementerian Kominfo Seri I: Dari Penerangan Sampai Informatika, yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, 5 Juli 2021.

Ashwin pun menuturkan pada tahun 2001 masyarakat masih sulit membedakan antara jaringan akses internet dan eternit sebagai langit-langit rumah. Hal ini membuktikan bahwa di kala itu internet belum merupakan sesuatu yang lazim di masyarakat. Untuk menjawab perkembangan teknologi di berbagai sektor, Kemeneg Kominfo

mengambil orang-orang teknik dari lembaga yang biasa berkecimpung di bidang teknik.

“Salah satu contohnya mengambil dari kedeputan Aptel (Aplikasi Telematika, red.), maka dilaksanakanlah *e-government* atas perintah Presiden, dan keluarlah Inpres No. 3/2003 tentang *e-government*. Waktu itu juga membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama berasal dari eks Departemen Penerangan yang bidangnya penyiaran. Pada saat itu juga dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Republik Radio Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan SDM berasal dari eks RRI dan TVRI,” tutur Ashwin.

Menurut Ashwin, ketika RRI dan TVRI sudah menjadi LPP, semua alat dan perangkat elektronik termasuk sebagian besar SDM yang menguasai TIK berada di bawah LPP. Pada saat itu mulai terjadi konsolidasi SDM, antara lain dengan menerima karyawan baru dan mengurus aset.

Kesulitan lainnya adalah ketika Kementerian Kominfo pertama kali menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2006. Penggabungan antara pegawai lama dengan baru tentu perlu waktu adaptasi.

Ashwin juga melakukan reorganisasi, terutama di sektor Postel dan Penyiaran pada saat menjabat sebagai Dirjen Aplikasi Telematika pada tahun 2010 menjadi Dirjen Aplikasi Informatika pada periode 2011-2016). Model perubahan yang semula berangkat dari berbasis sektor menjadi berbasis proses sehingga terjadi pergeseran SDM pada badan yang berkaitan.

“Dampak dari sebuah reorganisasi, begitu Keputusan Presiden diteken, saya tidak otomatis menjadi Dirjen. Pak Tifatul Sembiring bisa mengusulkan siapa saja. Jika mengusulkan ganti nama lain, saya bisa diganti. Direktornya pun bisa diketik ulang melalui kepengkatan. Itulah uniknya sistem birokrasi,” ucap Ashwin.



## PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA ERA DIGITAL

Di saat sedang adaptasi pegawai lama dan baru, timbul pula desakan untuk meluncurkan *e-government* hingga akhirnya terbit Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

“Indonesia itu dari ujung ke ujung jaraknya hampir sama dengan jarak dari London ke Ankara. Belum ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang banyak gunung. Sinyal nggak bisa tembus gunung. Belum lagi infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun BTS (*Base Transceiver Station, red.*) antar gunung. Akses yang belum sempurna menjadi masalah teknis tersendiri. Bahkan 20 ribu desa masih menjadi target terpenuhinya jaringan di tahun 2021 ini,” ungkap Ashwin.

Ashwin juga menuturkan bahwa pemerintah melalui Teknologi Informasi dari Kominfo telah memelopori pembentukan Pusat Data Nasional. “*E-government* adalah penyediaan layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya G2C (*government to citizen, red.*) bisa berupa pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan

sosial, layanan imigrasi, dan lain sebagainya,” ucap Ashwin.

Hal lain yang menjadi pengalaman Ashwin ketika menjabat Dirjen Aplikasi Telematika di Kementerian Kominfo adalah pada saat mengurus pembuatan Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). RUU ini merupakan hasil kolaborasi antara Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi di Ditjen Postel, Departemen Perhubungan, dengan RUU tentang Transaksi Elektronik di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang kemudian disahkan sebagai UU No.11 Tahun 2008 dan menjadi undang-undang pertama di bidang TIK.

“Mengacu pada UU ITE, filosofi dan tujuannya yakni memastikan transaksi elektronik atau *e-commerce* berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi. Selain itu, UU ITE diharapkan juga mampu memberi kepastian hukum dan mencegah adanya konflik di dunia virtual. Dalam dunia pendidikan, UU ITE sangat berkaitan mengingat semakin



**“Tata kelola internet membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda dalam banyak aspek termasuk kapasitas hukum internasional, minat dalam isu-isu tata kelola internet tertentu, dan keahlian yang tersedia,”**

maraknya konten pornoaksi yang dapat dilihat dan diunduh oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun,” kata Ashwin.

Berdasarkan catatan sejak tahun 2010 hingga 2011, UU ITE memakan korban dengan mencuat kasus pengumpulan koin Prita Mulyasari dan kasus Baiq Nuril. Ketika UU ITE diserang habis-habisan, Kementerian Kominfo mempelajari filosofi hukum, terutama dari sisi rasa keadilan.

Untuk mengatasi *cyber crime* lintas negara, pada tahun 2011-2013 Kementerian Kominfo berupaya menembus *IT Council, International Telecommunication Union - World Conference on International Telecommunication (ITU-WCIT)* dan forum sejagad lainnya karena belum ada *international agreement* untuk keamanan internet (*cyber security*).

“Tata kelola internet membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda dalam banyak aspek termasuk kapasitas hukum internasional, minat dalam isu-isu tata kelola internet tertentu, dan keahlian yang tersedia,” ucap Ashwin.

Ashwin juga teringat bahwa sejak tahun 2004 terdapat gerakan bersama lima kementerian, yaitu Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenpan-RB, Kemenkumham, dan Kemendikbud. Gerakan lima kementerian ini diinisiasi oleh J.B. Kristiadi dengan Indonesia Goes *Open Source (IGOS)*.

“IGOS merupakan upaya peningkatan perangkat lunak sumber terbuka agar masyarakat (selain Pemerintah) memanfaatkan secara optimal sumber terbuka tersebut. IGOS bahkan pernah mau naik kelas ke tingkat *Asean Goes Internasional (AGOS)*, sayangnya terkendala dengan hilirisasi hasil riset atau proses mendekatkan hasil riset kepada para pengguna yang kala itu yang seringkali terkendala dengan hak paten sehingga IGOS hanya berjalan di tempat selama lima tahun sejak dideklarasikan pada 30 Juni 2004,” tutur Ashwin.

Sebagai penutup, Ashwin kembali menegaskan bahwa dunia TIK berkembang pesat di semua lini dan sektor, sehingga perkembangan IT perlu disikapi dengan dasar penelitian agar dampak positif teknologi dapat maksimal.





## Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

Catatan 13 Tahun UU ITE

**Josua Sitompul, SH., MM., PhD**

Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Madya

Secara umum, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 (UU ITE) memuat dua bagian besar pengaturan, yaitu penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan *cybercrime*. Pengaturan keduanya merefleksikan kebijakan-kebijakan progresif Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan pengaturan ruang siber, sebagaimana juga dihadapi negara-negara lain. Tanpa bermaksud mengesampingkan peran penting pengaturan *cybercrime*, artikel ini hanya membahas pengaturan yang pertama

Kesan *bricolage* dapat ditangkap dalam UU ITE karena undang-undang ini hanya mengatur aturan-aturan inti dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dengan mengakomodasi berbagai prinsip pengaturan dari beberapa instrumen internasional. Meskipun demikian, UU ITE merupakan undang-undang induk yang darinya lahir berbagai aturan teknis berdasarkan pengembangan konsep dasar dalam UU ITE.

Pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam UU ITE dan turunannya cukup sering menuai kontroversi. Undang-undang ini memuat terobosan hukum dan titik pijak (*stand point*) yang *anti-mainstream*. Kontroversi ini bisa dipahami karena hingga saat ini belum ada konsensus global mengenai *cyberspace* dalam hukum internasional dan bagaimana mengaturnya. Apakah *cyberspace* merupakan perluasan teritori suatu negara? Apakah *cyberspace* dapat dipersamakan dengan Antartika atau laut bebas? Bagaimana hukum internasional yang selama ini diterapkan dalam ruang fisik juga dapat diterapkan di ruang virtual?

Terlepas dari kontroversi tersebut, UU ITE telah memberikan pengaruh fundamental yang positif dalam sistem hukum di Indonesia dan secara progresif memperbaiki praktik penyelenggaraan transaksi elektronik. Berikut refleksi pribadi penulis mengenai beberapa nilai progresif dalam UU ITE.

### Kehadiran Virtual

Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelaku usaha multinasional mengurangi kehadirannya di teritori satu negara dan memperbanyak kehadirannya di berbagai yurisdiksi. Konsep *mainstream* yang berlaku ialah hukum



nasional dapat diterapkan apabila seseorang atau objek hadir secara fisik di teritorinya. Mempertahankan prinsip ini secara ketat dapat menyebabkan kepentingan pengawasan dan penegakan hukum Indonesia terbengkalai.

Terobosan hukum dalam Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku dalam berbagai aktivitas elektronik di *cyberspace*. Setiap individu maupun entitas hukum yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam UU ITE tunduk pada hukum Indonesia terlepas dari lokasi perbuatan tersebut, sepanjang perbuatan yang dimaksud berdampak di dalam wilayah hukum Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian, UU ITE menerima konsep bahwa kehadiran virtual dari subjek (individu atau pribadi hukum) dan objek (informasi atau dokumen elektronik) di teritori Indonesia merupakan dasar yang sah bagi Indonesia untuk memberlakukan hukumnya.

Secara konkrit, kehadiran virtual ini diterapkan dalam konsep pendaftaran yang diusung dalam Permen Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. PSE Lingkup Privat asing, tanpa perlu hadir secara fisik, wajib mendaftar sepanjang penyelenggara tersebut memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia atau melakukan usaha di Indonesia. Lebih jauh, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1/2020 mengatur bahwa alamat surel seseorang dimaknai sebagai domisili elektronik

#### **Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dimaksudkan untuk mendirikan pilar-pilar penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pertama, transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat diterima sebagai transaksi yang sah. Sejalan dengan hal tersebut, UU ITE memberikan kejelasan waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik serta kejelasan kapan transaksi elektronik terjadi.

Kedua, UU ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sejak 1980-an, data komputer sudah mulai diakui dan diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi penerimaan tersebut masih terbatas dalam beberapa bidang hukum tanpa pengaturan standar teknis penerimaannya. UU ITE menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti elektronik. UU ITE menerima digital forensik sebagai metode ilmiah untuk memastikan integritas dan ketersediaan data dalam penerimaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Ketiga, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, bahkan dapat memiliki fungsi layaknya tanda tangan basah. Keempat, UU ITE menegaskan bahwa penyelenggara bertanggung jawab terhadap sistem elektroniknya. Selaras dengan tanggung jawabnya, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, UU ITE juga mengatur nama *domain* dan perlindungan data pribadi. Pilar-pilar tersebut dibutuhkan dalam mengembangkan perekonomian atau perdagangan digital termasuk mentransformasi berbagai aktivitas fisik masyarakat menjadi aktivitas elektronik.





#### Dari PP 82/2012 menjadi PP 71/2019

PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjabarkan lebih lanjut pilar-pilar tersebut di atas ke dalam regulasi teknis. Boleh dikatakan, atmosfer idealis normatif terasa menyelimuti berbagai rumusan ketentuan PP 82/2012. Para penyusun peraturan ini berusaha untuk mengatur secara rinci komponen sistem elektronik dan kewajiban penyelenggara dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Dalam kurun waktu tujuh tahun sejak diundangkannya PP 82/2012, regulasi turunan UU ITE, khususnya peraturan Menteri Kominfo, mulai mengambil bentuk dan arah yang semakin konkrit. Kemudian, PP 71/2019 yang menggantikan PP 82/2012 memberikan nuansa dan arah progresif. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan lokalisasi data, pendaftaran, perlindungan data pribadi, pemutusan akses, dan *e-government*.

#### a. Lokalisasi Data

Mungkin dari seluruh ketentuan PP 82/2012, Pasal 17 ayat (2) merupakan norma yang paling problematik. PSE untuk pelayanan publik diwajibkan menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Tujuan kebijakan lokalisasi data diatur secara eksplisit, yaitu untuk memenuhi kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Norma pasal tersebut mendapatkan kritikan dari beberapa pemerintah negara sahabat dan PSE multinasional. *Concern* utama yang mereka sampaikan ialah kebijakan lokalisasi data tidak sejalan dengan *trend* pengaturan dan kebutuhan penerapan komputasi awan. Selain itu, kebijakan yang dimaksud tidak kondusif bagi perdagangan internasional, dan tidak ramah terhadap bisnis. Kemudian, ruang lingkup PSE untuk pelayanan publik tidak definitif.

Sebenarnya, kebijakan lokalisasi data merupakan kebijakan yang diterapkan banyak negara, baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan kebijakan dalam norma PP 82/2012 tersebut juga merupakan rasionalisasi yang diterapkan di beberapa negara. Uni Eropa pun menerapkan kebijakan lokalisasi data secara implisit dalam rangka perlindungan data pribadi warga negaranya.

PP 71/2019 telah memberikan solusi dengan menyeimbangkan kepentingan Indonesia dan kebutuhan PSE. Kepentingan PSE Lingkup Privat dipenuhi dengan memberikan fleksibilitas dalam melakukan pemrosesan data atau menyelenggarakan pusat data, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kepentingan Pemerintah Indonesia juga diakomodir dengan memberikan kewajiban bagi PSE Lingkup Privat untuk memastikan efektivitas pengawasan oleh kementerian/lembaga dan penegakan hukum oleh instansi penegak hukum. Parameter objektif yang digunakan untuk mengukur



efektivitas tersebut adalah kewajiban PSE Lingkup Privat dalam memberikan akses kepada otoritas Indonesia untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. Permen Kominfo 5/2020 sudah mengatur dengan detail persyaratan permintaan akses. Prinsip legalitas, nesesisitas,

proporsionalitas, dan *checks-and-balances* juga sudah diintegrasikan dalam norma-norma permintaan akses.

#### b. Pendaftaran

Dalam berbagai fora internasional, membangun trusted digital environment merupakan tujuan penting dalam tata kelola cyberspace. Sejalan dengan tujuan itu, pendaftaran merupakan kebijakan strategis Pemerintah dalam membangun cyberspace nasional yang aman dan bertanggung jawab serta ekosistem yang dapat dipercaya dalam melakukan perdagangan elektronik. PP 82/2012 mengusung konsep pendaftaran sukarela, sedangkan PP 71/2019 mengaturnya sebagai kewajiban baik bagi PSE Lingkup Privat maupun PSE Lingkup Publik.

PSE Lingkup Privat, baik nasional maupun asing, diwajibkan memiliki legalitas dalam melakukan usahanya di Indonesia dan mendaftarkan sistem elektroniknya. Dengan mekanisme pendaftaran, pengguna internet di Indonesia dapat mengetahui bahwa sistem elektronik yang mereka gunakan sudah dikenali oleh Pemerintah dan penyelenggaranya menyelenggarakan sistemnya secara sah. Dalam hal terdapat permasalahan, PSE Lingkup privat dapat dihubungi dan dimintai pertanggung jawaban.

#### c. Pelindungan Data Pribadi

Aspek progresif dari PP 71/2019 juga dapat dilihat dari pengaturan pelindungan data pribadi.

Prinsip utama pelindungan data pribadi dalam Pasal 26 UU ITE ialah penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan. Sebenarnya, penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Sehingga, ruang lingkup pengaturannya tidak hanya pada persetujuan tetapi juga aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam rangka melindungi hak pribadi sebagai salah satu hak konstitusional.

PP 71/2019 mengatur prinsip-prinsip dan legal basis pemrosesan data pribadi yang meliputi prinsip keabsahan, transparansi, dan keadilan dalam pemrosesan data pribadi. Selain itu, diatur pula prinsip pembatasan tujuan dan penyimpanan. Yang sama pentingnya ialah prinsip minimisasi data dan akurasi dalam pemrosesan data pribadi, termasuk prinsip integritas dan kerahasiaan. Sedangkan legal basis dalam pemrosesan data pribadi tidak hanya persetujuan, tetapi juga pelaksanaan kontrak, pelindungan kepentingan vital subjek data, kewajiban hukum pengendali, kepentingan publik, dan kepentingan yang sah dari pengendali. Baik prinsip

maupun legal basis yang dimaksud mengadopsi konsep pengaturan yang sudah diterima di banyak negara maju.

#### d. Pemutusan Akses

Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses tidak diatur secara tegas dalam UU 11/2008. Meskipun demikian, pemutusan akses tetap memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 40 ayat (2) UU 11/2008, yaitu Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Diseminasi, distribusi, atau transmisi konten dilarang menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan yang dimaksud. Pada tahun 2014, Kementerian Kominfo menerbitkan suatu peraturan menteri tentang penanganan situs internet bermuatan negatif berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU ITE.

Paradigma dan rasionalisasi pemutusan akses mendapatkan penguatan dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU 19/2016, yaitu dengan memberikan kewajiban dan kewenangan bagi Pemerintah. Pemerintah dikenakan kewajiban melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan konten yang dilarang. Ruang lingkup konten yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai





peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewajibannya, Pemerintah diberikan kewenangan melakukan pemutusan akses termasuk memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang. Kewajiban dan kewenangan tersebut merupakan dua sisi dari satu mata uang.

Permen Kominfo 5/2020 memperjelas dan memperkuat ruang lingkup pemutusan akses. Pertama, pemutusan akses dapat dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan pendaftaran. Kedua, pemutusan akses dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penggunaan konten yang dilarang. Ketiga, pemutusan akses diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan pemberian akses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana.

Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 saat ini sedang diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon tidak mengajukan petitiu agar kewenangan pemutusan akses dinyatakan tidak konstusional. Sebaliknya, mereka mengajukan permohonan terkait aspek akuntabilitas, yaitu sebelum melakukan pemutusan akses, Pemerintah mengeluarkan "keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis". Permohonan yang menekankan pada penerbitan surat keputusan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani secara basah tidak selaras spirit pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### e. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

UU ITE juga memberikan dasar hukum untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan UU ITE dan turunannya, konsep *e-government* yang mendapatkan momentum signifikan berdasarkan Inpres 3/2003 mengalami transformasi yang lebih konkrit. Penerapan dan pewujudan SPBE yang diatur dalam Perpres 95/2018 dan satu data Indonesia yang diatur dalam Perpres 39/2019 dapat direalisasikan.



**Bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, termasuk pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Di lain pihak, satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan w dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pemerintah.**

### Melihat ke Depan

UU ITE tidak sempurna tapi dapat digunakan sebagai regulasi inti secara optimal dalam mentransformasi penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Regulasi turunan UU ITE masih akan terus lahir dan berkembang. Penyusunan regulasi PSE Lingkup Publik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE dan satu data Indonesia, klasifikasi permainan interaktif merupakan beberapa regulasi yang diharapkan dapat lahir dalam waktu dekat. Regulasi-regulasi tersebut menjadi bagian keluarga UU ITE yang dapat digunakan untuk mencapai transformasi digital yang dicita-citakan Indonesia.





## Beda Masa, Beda Cerita

**Dimas Aditya Nugraha**  
Pranata Humas Ahli Madya

“**A popular government without popular information or the means of acquiring it is but prologue to a farce or tragedy, or perhaps both.**”

Pernyataan tersebut dikutip Marguerite H Sullivan, mantan *public relations* Presiden Bush, di bukunya yang bertajuk *A Responsible Press Office, An Insider Guide* tahun 2002. Kalimat dari James Madison, Presiden Keempat Amerika Serikat, yang dikenal sebagai bapak “*open government*” dan “*Freedom of Information Act*”.

Sesuai judul, isinya bercerita tentang bagaimana menjalankan fungsi komunikasi dan informasi pemerintah kepada masyarakat. Ditulis bahwa kendati pemerintah populer, yaitu terpilih melalui pemilihan umum yang sah, namun tanpa informasi yang juga populer, maka ragam program kebijakan pemerintahan hanya akan menjadi bahan lelucon semata.

Bisa jadi hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa setiap masa kepemimpinan negara, juga daerah, memosisikan komunikasi dan informasi sebagai bagian penting dari kesuksesan roda pemerintahan.

Sebut saja Presiden Joko Widodo yang tak kurang sekian kali memberikan arahan pada humas pemerintah. Mulai dari menjelaskan “beda masa beda cerita, beda tantangan beda penanganan, hingga teguran bahwa humasnya tak juga -terdengar- bersuara.

### Tantangan Perubahan

Reformasi 1998, menjadi momentum bagi kian pentingnya fungsi komunikasi dan informasi bagi pemerintah. Demokrasi yang ditandai dengan pemilihan umum, mendorong terciptanya berbagai hal. Mulai dari kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat; pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan; hingga kian tegaknya pilar demokrasi keempat yaitu media.

Dukungan pemerintah terhadap kebebasan informasi terlihat dengan disusunnya undang-undang sebagai payung hukum yang memberi kewajiban bagi negara dan hak untuk warga negara. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) rampung pada 2008 dan efektif berlaku dua tahun kemudian (2010).

UU KIP menuntut adanya sebuah lembaga pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mulai dari perubahan paradigma aparat penyelenggaranya, sampai pada berjalannya sebuah sistem fungsi komunikasi dan informasi yang berjalan efektif serta efisien.

Membentuk sebuah sistem komunikasi pemerintah yang baru, bukan masalah sederhana. Setidaknya hal tersebut terekam



dalam dokumen “Bunga Rampai Kehumasan”, Lembaga Informasi Nasional (LIN) Edisi 1/2002.

Dokumen tersebut mencatat, pada 3 April 2002, 85 pejabat pemerintah mulai dari Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Departemen, Non Departemen, Mabes TNI dan Polri, serta BUMN telah membuat sebuah kesimpulan dan rumusan yang dimaksud untuk dapat menjawab tuntutan reformasi. Khususnya menangkap perubahan paradigma baru dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi politik pemerintah.

Mereka mencoba mengevaluasi dan mengubah pola komunikasi politik pemerintah Orde Baru yang lebih berorientasi “*Top Down dan Linear*” serta individu-individu yang tidak memiliki *need of achievement*, penyebab ketidakcocokan kebutuhan dan kemampuan informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Melupakan pola pendekatan kekuasaan, pendekatan penguasaan media, pendekatan kelembagaan, dan dengan cara penyampaian informasi yang kurang transparan dengan alasan keamanan atau belum mendapat persetujuan pimpinan.

Sepakat mengubahnya menjadi komunikasi pemerintah yang lebih menekankan pada: pertama, manajemen strategis, yang meliputi penyusunan visi, misi, analisa SWOT, tujuan, sasaran dan program aksi yang kongkret dalam komunikasi politik yang dibangun dengan pihak lain.

Kedua adalah dengan manajemen isu. Disadari bahwa pemerintah kurang mengelola isu-isu dengan baik dan

akurat, sehingga gagal dalam memenangkan konten atau muatan dari misi yang sedang dikomunikasikan. Padahal saluran dan sarana komunikasi yang tersedia amat sangat mungkin diwujudkan pemerintah dengan kekuasaannya.

Ketiga adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam memperlancar arus keluarnya informasi, tanpa perlu menyetop dan menutup-nutupi apalagi mengaburkan fakta yang ada. Karena menurut para pejabat ini, cepat atau lambat, informasi tersebut akan diketahui oleh publik.

Dan yang keempat adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berpikir layaknya seorang *public relations* yang profesional. Dan semua itu akan keluar dalam satu suara yang sering disebut sebagai “Juru Bicara Pemerintah” sebagai bagian dari *Government Public Relations* (GPR).



## Cerita Negara Besar

Indonesia negeri sejuta budaya: Sabang Merauke, Miangas hingga pulau Rote. Begitu banyak ragam Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Belum lagi demografi wilayah dan sebaran penduduk, begitu beraneka. Saking multinya, komunikasi di Indonesia tak bisa dilakukan hanya dengan satu gaya.

Cerita ini yang selalu muncul tentang perjalanan komunikasi pemerintahan. Sebut saja perihal jejaring Departemen Penerangan yang konon bisa menyampaikan informasi harga cabai ke pelosok nusantara dalam hitungan hari saja. Mungkin tak aneh ketika mendengar bahwa hanya ada tiga ksatria yang jejaringnya sampai ke pelosok kecamatan: penyuluh Keluarga Berencana (KB), penyuluh agama, dan tentu saja juara kita, Juru Penerang alias *Jupen* yang melegenda. Sosok Juru Penerangan yang serba tahu semua informasi, kerap menjadikan mereka sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat.

Kisah ini mulai mengalami penyesuaian zaman ketika otonomi daerah menjadi pilihan baru buah dari reformasi dan demokratisasi. Desentralisasi menjadi kata kunci bagaimana wewenang harus didistribusikan ke pelosok negeri agar layanan pemerintah kian dekat dan dirasakan masyarakat. Hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah praktis terurai dan butuh dirajut kembali.

Otonomi daerah UU No 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004, sangat berpengaruh terhadap struktur kelembagaan dan fungsi instansi di tingkat pusat. Semenjak daerah memiliki hak untuk membentuk struktur organisasi pemerintahan berdasarkan prakarsa dan kebutuhan sendiri. Instansi pemerintah pusat, termasuk Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), seolah-olah mengalami putus komunikasi dengan provinsi maupun kabupaten/kota.



Keberadaan kantor wilayah (kanwil) di provinsi dihapus. Kantor departemen (kandep) yang semula menjadi saluran komunikasi departemen dengan daerah, ditarik menjadi lembaga lokal yang bernaung di bawah pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

Beberapa lembaga informasi memang dibentuk di daerah dengan berbagai versi nama, di antaranya Badan Informasi Daerah (BID), Badan Informasi dan Komunikasi (BIK), Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK), Kantor Informasi dan Komunikasi, Kantor Komunikasi dan Kehumasan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Informasi Daerah, dan nama lainnya. Namun tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga informasi baru itu tidak lagi mengikuti tupoksi Depkominfo, namun mengacu pada tugas yang dibebankan pemerintah daerah kepada lembaga tersebut.

Bagaimana nasib *Jupen* nan melegenda? Tentu saja status kepegawaiannya ikut juga "diotonomi-daerahkan". Dan ceritapun menjadi tak terkendali.

Upaya merajut "hubungan yang putus" antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan. Buahnya di jaman Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Frasa "Narasi Tunggal" dan "orkestrasi komunikasi" menjadi kata kunci. Pemerintah adalah tunggal. Karenanya harus satu irama. Memainkan nada yang sama agar harmonis dan tak sumbang di telinga pendengarnya.

Kementerian Kominfo mendapat legalitas sebagai pengatur orkestrasi. Menjadi simpul penghubung, koki pemasak informasi, dan dirigen pengatur irama diseminasi. Cerita ini masih berlanjut hingga kini.

## Hubungan Pemerintah dan Media hingga Juru Bicara

Lain lagi tentang hubungan pemerintah dan media. Ceritanya bisa jadi lebih berwarna, hangat, dan mirip *roller coaster*. Setidaknya hal tersebut seperti digambarkan Suprawoto, mantan Sekjen Kementerian Kominfo dalam artikel berjudul "Mengapa Media Selalu Curiga" di koran *Seputar Indonesia* tahun 2009.

Ia menuliskan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa setiap pemerintah yang berkuasa, pada awalnya selalu memberikan janji kemerdekaan terhadap pers. Namun dalam perjalanannya justru malah berbeda.

Suprawoto menulis, Presiden Soekarno menjamkannya dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, setelah Belanda pergi dan pers mulai "bicara", hubungan kian "menghangat". Jaman Presiden Soeharto juga berjanji melalui UU Pers No 11 tahun 1966 pasal 4. Namun ceritanya berubah menjadi "budaya telepon" berujung "pendisiplinan".

Paska reformasi 1998, hubungan pemerintah dan media juga diwarnai upaya pembelajaran di kedua pihak. Di satu sisi, mengedepankan tanggung jawab sosial, di sisi lain atas nama kebebasan bersuara.

Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan yang identik sebagai lembaga yang membelenggu pers. Namun, ketika pers mulai menggelitik, simpatisan pendukung Presiden Wahid pernah meminta klarifikasi atas pemberitaan dan pemuatan karikatur. Terjadi pula di jaman Presiden Megawati dimana ia pernah menggugat "Rakyat Merdeka" karena pemberitaan yang terus menerus dan tidak adil.

Pembelajaran tersebut berbuah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mana pemerintah mencoba membangun hubungan yang lebih profesional dengan media. Pahami bahwa media menjadi pemain penting

yang diperebutkan, meminjam istilah Brian Mc Nair (2003), oleh aktor politik dalam era "*mediated communication*".

Arus informasi, kontestasi isu, hingga diskusi dan debat publik dipertarungkan dalam media. Bahkan berujung pada upaya monopoli dan mengakuisisi kepemilikan media guna memenangkan pertarungan wacana.

Di masa ini, mulai diperkenalkan istilah "juru bicara". Konon meniru "*west wing*" Amerika Serikat yang tugasnya memang mengorkestrasi informasi presiden dan pemerintahan yang ditujukan, utamanya, untuk media. Juru Bicara dianggap menjadi solusi "narasi tunggal" yang bisa menutup celah miskoordinasi, beda data, dan riuhnya suara.

Hubungan tersebut terus dipupuk hingga saat dengan format yang terus menyesuaikan kebutuhan. Di era Presiden Joko Widodo, peran juru bicara muncul di berbagai lapisan birokrasi.

Mungkin bersesuaian dengan yang disebutkan Timothy E Cook dalam bukunya "*Governing With The News, Chapter Governing by Publicity*" (1998). Ia menyebutkan beberapa institusi dari pemerintah yang melaksanakan peran publisitas sebagai bagian dari komunikasi politik kepada stakeholdernya masing-masing. Diantaranya: lembaga kepresidenan, lembaga birokrasi, lembaga peradilan, dan anggota kongres.

Di era ini, mulai dikenal kedeputan informasi di Kantor Staf Presiden (KSP), Tim Komunikasi Presiden (TKP), Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dan bahkan tiap menteri pun digadang untuk menjadi juru bicara program kementeriannya di hadapan media maupun publik.

Mencoba menjalankan tugas humas pemerintah berdasarkan model David Zarifa & Scott Davies (2005) dalam makalahnya berjudul *Balance of Powers: Public Opinion on Control in Education*, secara bersamaan. Mulai dari fungsi **a) Information Officer** yang hanya memberikan informasi dan komunikasi searah;

**b) Government Information Officer**, komunikasi dua arah, *mutual dependent relationship*, dan

**c) A weapon of Power**, persuasi sebagai basis dari kekuatan.



### Teknologi dan Banjir Informasi

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang pesat, berdampak juga pada pengelolaan komunikasi dan informasi. Menjadi kian cepat dan seketika, akses mulai terbuka dan merata, serta kanal menjadi beragam menyesuaikan selera yang memanjakan penikmatnya.

Pemerintah harus bekerja semakin keras karena pertarungan menjadi terbuka. Bukan lagi memperebutkan isu di media, namun bersaing dengan pemilik informasi dan pembuat konten yang kian menyasar khalayak secara spesifik.

Belum lagi dampak kehadiran media sosial yang membuat ragam cara dalam mengakses informasi. Pun setiap sumber cerita tampak menjadi pakar di segala bidang. Bisa bercerita dengan sekadar modal data dan argumentasi untuk memuaskan pembaca. Ujungnya, berita bohong, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang semakin menjadi.

Komplet sudah tantangannya: banjir informasi, kredibilitas, hingga pemerataan akses informasi di masyarakat. Cerita yang masih harus dijalani dan belum berhenti. \*



## Media Pemerintah, Perlukah?

Oleh, Dimas Aditya Nugraha  
Pranata Humas Ahli Madya di Kementerian Komunikasi dan Informatika

“**Dulu, kehadirannya kerap dianggap sebagai propaganda.**

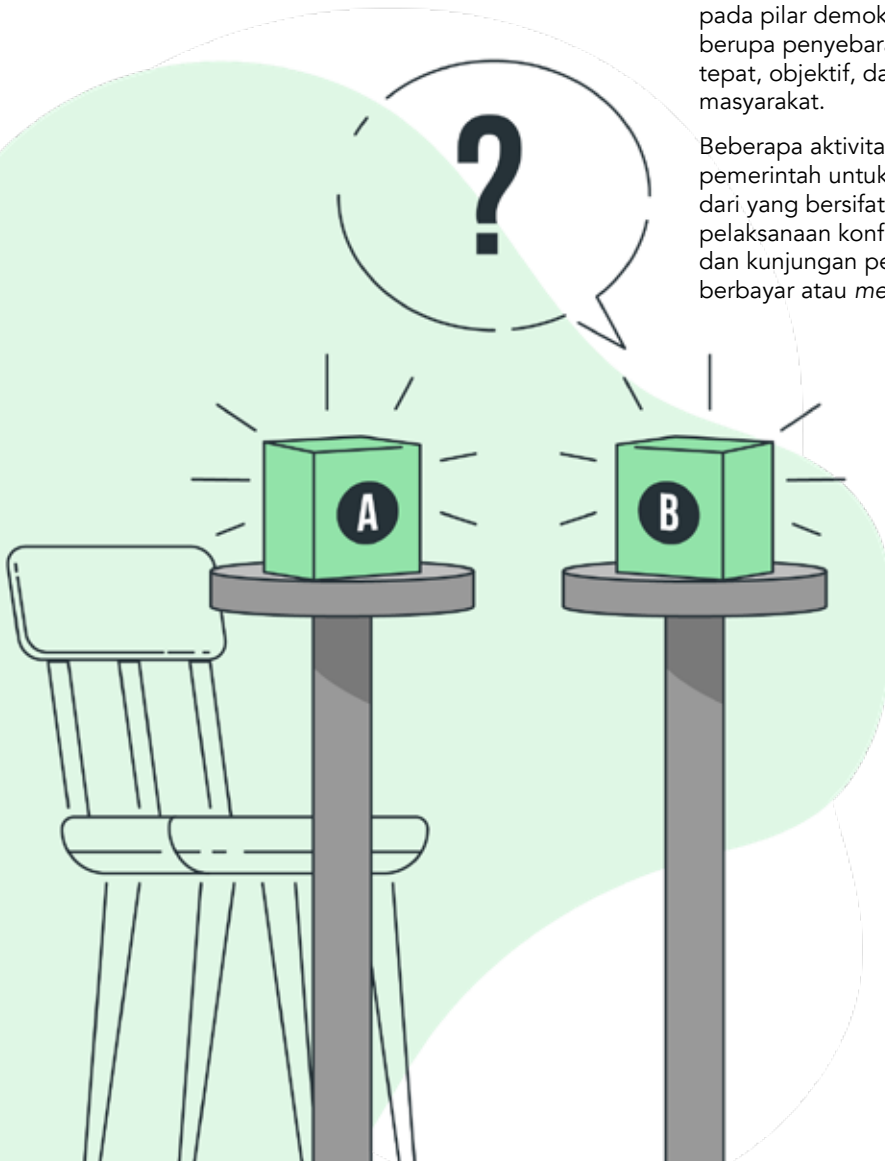
**Namun di era overload information dan banyaknya hoaks seperti saat ini, bisakah peran media pemerintah bertransformasi?**

**M**edia massa atau pers kerap dipandang sebagai *fourth estate* atau kekuatan keempat dalam pilar demokrasi. Menjadi anjing penjaga (*watchdog*) bagi pilar *trias politica* lainnya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kendati demikian, media atau pers juga berperan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Menjadi penyambung suara, telinga, dan jendela masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Karenanya, pemerintah juga kerap membangun hubungan dengan media melalui berbagai aktivitas *Media – Government Relations*. Selain membangun transparansi dan akuntabilitas pada pilar demokrasi, juga mendapat manfaat berupa penyebaran informasi yang cepat, tepat, objektif, dan berkualitas baik kepada masyarakat.

Beberapa aktivitas, umum dilakukan instansi pemerintah untuk berelasi dengan media. Mulai dari yang bersifat *win-win strategies*, semisal pelaksanaan konferensi pers, *media briefing*, dan kunjungan pers, hingga dengan pendekatan berbayar atau *media placement* di media massa.





### Kanal Resmi Pemerintah

Apa yang ada dalam benak Anda ketika mendengar frasa “Media Pemerintah”? Bisa jadi yang terbayang adalah kegiatan kehumasan, informasi pembangunan, pencitraan, atau mungkin kemasan formal ala pemerintah. Mungkin juga masih tersisa memori Departemen Penerangan zaman Orde Baru yang menggunakannya sebagai upaya propaganda pemerintah.

Bisa jadi benar. Namun, mungkinkah bila ada sebuah media yang dikelola secara profesional layaknya *media mainstream* yang posisinya jelas dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah?

Terlebih melihat kehadiran internet dan media sosial sebagai pilar kelima demokrasi atau the *fifth estate*. Dimana pilar tersebut mendorong keterbukaan dan transparansi. Membuat informasi tak kenal batas ruang, waktu, dan sumber. Dihantarkan dengan hitungan detik ke ranah pribadi. Bahkan menjadi kabur mana informasi yang sudah, sedang, belum terjadi. Dan terkadang siapa pemilik informasi menjadi *sumir*, sulit membedakan mana fakta dan berita palsu.

Di bawah ini setidaknya ada lima (5) argumentasi yang dihadirkan penulis mengapa pemerintah perlu mengelola secara profesional kanal resmi yang misinya menyampaikan informasi program dan kebijakan pemerintah.

**Pertama, sumber resmi pemerintah.** Tahukah Anda bahwa menurut riset Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) 2018 bahwa 91,8% jenis hoaks yang sering diterima oleh masyarakat adalah tentang

informasi sosial politik? Dimana informasi palsu tersebut membahas mulai dari isu kontestasi pemilihan umum hingga pengelolaan pemerintahan.

Dengan adanya kanal resmi pemerintah yang dikelola secara profesional layaknya media arus utama, maka masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel tentang program dan kebijakan pemerintah.

**Kedua, solusi antihoaks dengan pendekatan jurnalisme ala pemerintah.** Beberapa teori menyebutkan bahwa hoaks adalah sebuah penyimpangan dari jurnalisme. Berita palsu hadir bak berita jurnalistik yang menyampaikan kemasan peristiwa terkini, menarik, dan signifikan serta bertujuan mempengaruhi orang.

Upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi publik dengan pendekatan jurnalisme, merupakan bentuk antisipasi krisis isu yang ada di masyarakat. Masyarakat memerlukan informasi yang jelas, cepat, dan berkualitas baik dari pemangku negeri ini. Kian terlayani informasi tersebut, dapat diyakini bahwa berita palsu tak lagi punya ruang beredar secara luas.

**Ketiga, kompetisi media berjejaring.** Data “*Digital Media Landscape Indonesia 2021*” dari Dable.io menyebutkan bahwa pertarungan merebutkan pembaca di *media online* dan media sosial berlangsung ketat. Dominasi 10 media berjejaring semakin menancapkan posisinya di lintas pencarian informasi digital. Sebut saja grup Kompas Gramedia, Viva, MNC, Transmedia, Tempo Media Group, Arkadia, KLY, Pikiran Rakyat Media Network, GVM, serta detiknetwork menguasai 200 besar pencarian alexa dan *red volcano*.



Sementara bagaimana dengan kanal *media online* atau situs pemerintah? Tak kurang dari 86 situs kementerian lembaga dan 500an situs pemerintah daerah, tak muncul datanya dalam daftar urut situs pencari. Konten, rilis, foto diproduksi, namun kanal kurang ditujukan untuk bersaing dengan media arus utama. Lantas, mana suaranya?

**Keempat, “perang digital” butuh pengelolaan profesional.**

Banyak pihak membanggakan angka penetrasi internet Indonesia. Semisal data yang dikeluarkan oleh wearesocial.com setiap awal tahunnya. Disebutkan bahwa negeri dengan 17ribu lebih pulau ini sudah mampu memberikan akses internet pada 73,7% atau 202juta dari 270juta penduduknya. Disebutkan pula bahwa 98,2% penduduk pengguna ponsel, mengakses internet melalui telepon pintar.

Apa arti data tersebut? Perebutan pembaca informasi terjadi di kanal digital. Lebih spesifik, menggunakan telepon pintar. Lantas berapa banyak instansi pemerintah yang sudah mengadopsi strategi digital? Paham beriklan di media sosial? Menggunakan *Search Engine Optimization* (SEO)? Menggunakan acuan *traffic*, *reach*, *impresi*, dan *engagement*? Sementara media tak main-main dalam investasi di teknologi dan promosi digital. Pun menghadirkan kanal agregasi yang memanjakan pembaca dengan ragam sudut pandang serta kualitas konten yang diatur berdasarkan kebutuhan personal tiap pembacanya.

Kelima, strategi konten vs strategi kanal. Teori “*Who says what, to whom, in which channel, with what effect*” dari Lasswell kerap digunakan dalam memetakan unsur penting dalam komunikasi. Untuk aspek “*Who says what, to whom,*” tampaknya pemerintah sudah mulai serius dalam menghasilkan ragam konten menarik di berbagai jenis platform. Tentu saja dengan kadar yang berbeda di tiap instansinya. Mulai dari kualitas dan kuantitas level 1 hingga 10. Peta audiens pun semakin berlapis disasar dengan pendekatan berbeda.



Namun demikian, pemerintah dirasa lupa dalam memaksimalkan kanal utamanya. Seakan hanya sekadar mengisi konten di platform yang ada: situs, media sosial A, B, dan C. ikut meramaikan konten di kanal publik tersebut. Tak ada yang salah. Namun bagaimana bila ada pertanyaan dari masyarakat: “Dimana kami bisa mendapatkan informasi pemerintah secara utuh dan terpercaya?” Bisa-bisa, kita akan menyebutkan nama 86 instansi K/L dan 500an kanal pemerintah daerah.

**Kehadiran kanal resmi pemerintah dalam bentuk media, kian penting dirasakan di era keterbukaan semisal saat ini. Tak hanya menjadi pembeda dengan kanal lain, namun juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi program dan kebijakan pemerintah.**

**Saatnya pemerintah memiliki kanal media resmi dan terpercaya. Dikelola dengan profesional dan mengedepankan teknologi dalam penyampaiannya. Sekarang atau kian tertinggal. Masyarakat membutuhkan!**



## Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio

Dari Masa Ke Masa

**Adis Alfiawan**

Direktorat Penataan Sumber Daya,  
Ditjen SDPPI

**“ Kita mungkin sering menggunakan istilah “sefrekuensi” untuk menggambarkan situasi ketika kita merasa sangat cocok dengan kawan kita. Tapi, tahukah Anda, apa sebenarnya itu “frekuensi”?**

Frekuensi sejatinya adalah sebuah ukuran terhadap suatu objek, sama seperti tinggi, berat, panjang, dan lebar. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan frekuensi secara umum sebagai jumlah siklus suatu peristiwa per detik. Dalam konteks telekomunikasi, definisi teknis dari istilah frekuensi adalah jumlah getaran dari objek bernama gelombang elektromagnetik yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Setiap gelombang elektromagnetik dapat merambatkan informasi dari satu titik ke titik yang lain. Semakin banyak gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam periode waktu 1 detik, maka semakin banyak juga informasi yang tersalurkan. Sederhananya, gelombang elektromagnetik dengan nilai frekuensi tertentu dapat dipahami sebagai sebuah media pengiriman dan/atau penerimaan informasi, sama seperti kabel tembaga dan kabel serat optik.

Sebagai sebuah ukuran, “frekuensi” memiliki satuan “Hertz” untuk mengenang jasa Heinrich Hertz, seorang fisikawan berkebangsaan Jerman yang berhasil membuktikan kepada dunia melalui sebuah eksperimen bahwa frekuensi tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai konstanta matematis seperti di dalam formula *Fourier Transform*, tetapi merupakan sebuah objek fisik yang nyata.

Jika kemudian istilah “frekuensi” tersebut ditambahkan 2 istilah lain yakni “spektrum” dan “radio” membentuk sebuah frase “spektrum frekuensi radio”, maka maknanya menjadi kumpulan dari sejumlah frekuensi mulai dari nilai terendah 3 kHz sampai dengan nilai tertingginya 3000 GHz. Hal ini mengacu pada tabel di dalam *Radio Regulations (RR)* yang diterbitkan oleh *International Telecommunication Union (ITU)*, sebuah kitab aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara di dunia jika ingin menggunakan spektrum frekuensi radio agar mendapatkan manfaat yang optimal. Seiring perkembangan teknologi dari masa ke masa, khususnya di bidang elektronika, misalnya inovasi *chipset* dan antena yang semakin canggih namun ukuran fisiknya dapat terus diperkecil, maka spektrum frekuensi radio semakin dirasa vital perannya bagi suatu negara. Spektrum frekuensi radio bahkan

disepakati bersama oleh seluruh negara di dunia sebagai sumber daya alam yang sifatnya terbatas (*limited natural resources*). Hal tersebut dideklarasikan antara lain di dalam Konstitusi ITU (Article 44) dan Pembukaan (*Preamble*) *Radio Regulations*. Indonesia juga mencantumkan deklarasi tersebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Didorong oleh semakin langkanya ketersediaan spektrum frekuensi radio karena nilainya yang terus meningkat, baik nilai ekonomis maupun nilai strategisnya bagi setiap negara, maka regulasi yang mengaturnya pun diharuskan untuk terus beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Tujuan pertama yakni untuk menjamin agar spektrum frekuensi radio digunakan secara efisien dan seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi beragam keperluan, tidak hanya pertahanan dan keamanan, tetapi juga untuk menunjang aktivitas perekonomian di segala bidang. Tujuan kedua, komunikasi dari beragam jenis keperluan tersebut tetap dapat berjalan lancar dan tidak terganggu/terinterferensi.

Berbicara mengenai regulasi tata kelola spektrum frekuensi radio, Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) yang pertama diterbitkan adalah di tahun 1996. Pada saat itu, regulator spektrum frekuensi radio di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) di bawah Kementerian Parpostel. TASFRI edisi pertama tersebut kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2001 untuk selaras dengan *Radio Regulations ITU* edisi tahun 1998. Pada saat itu, Ditjen Postel bagian dari Kementerian Perhubungan.

Setelah kemudian pada tahun 2005, Ditjen Postel dilebur bersama dengan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) untuk membentuk Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), diterbitkanlah TASFRI edisi ke-3 yang substansinya mengikuti *Radio Regulations ITU* edisi tahun 2008. Sampai dengan saat ini, total telah terbit 5 edisi TASFRI dari 4 nama institusi yang berbeda, yaitu Kementerian Parpostel, Kementerian Perhubungan, Departemen Kominfo, dan Kementerian Kominfo. Pada saat penggantian nomenklatur instansi dari Departemen Kominfo menjadi Kementerian Kominfo, Ditjen Postel juga mengalami reorganisasi menjadi 2 satuan kerja, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

Dari sisi kelembagaan tata kelola spektrum frekuensi radio, terbentuknya Ditjen SDPPI merupakan angin segar karena *business process* manajemen spektrum frekuensi radio mendapatkan ruang yang lebih luas untuk dikembangkan, baik dari sisi personalnya maupun dukungan anggarannya. Reorganisasi tersebut menunjukkan betapa spektrum frekuensi radio telah dipandang sebagai sebuah sumber daya nasional yang perlu dikelola dengan fokus yang lebih tajam dan sistematis. Hal ini tidaklah heran karena salah satu indikatornya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio berada di orde Triliun rupiah setiap tahunnya, bahkan sejak tahun 2013, capaiannya sudah *double digit*. Kontribusi terbesar PNBP dari pungutan BHP spektrum





frekuensi radio tersebut berasal dari hasil proses lelang frekuensi. Momentum lelang frekuensi pertama di Indonesia yang terjadi di tahun 2006 juga ditandai dengan pertambahan target PNPB BHP spektrum frekuensi radio yang dibebankan kepada Depkominfo sebesar 120% dari target sebelumnya di tahun 2005, artinya target naik lebih dari dua kali lipat.

**Proses lelang frekuensi pada tahun 2006 tersebut merupakan puncak gunung es dari momentum besar perbaikan tata kelola spektrum frekuensi radio, khususnya di sisi pelayanan perizinan. Sebelumnya, proses perizinan spektrum frekuensi radio relatif belum memiliki pola dan arah kebijakan yang jelas, salah satunya ditandai dengan masih bercampurnya dua jenis penetapan Band Plan berbeda di pita frekuensi radio 2,1 GHz antara Band Plan untuk sistem 3G UMTS yang berbasis standar GSM dan Band Plan untuk sistem 3G PCS yang berbasis standar CDMA.**

Sebelum lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz dibuka pada awal tahun 2006, terlebih dahulu dilakukan penataan pita frekuensi radio 2,1 GHz. Salah satu yang paling berat adalah memindahkan Telkom Flexi dan Indosat StarOne yang semula bekerja di pita frekuensi radio 1900 MHz ke pita frekuensi radio 800 MHz. Pada saat itu, pelanggan Telkom Flexi telah cukup masif. Dampak pemindahan frekuensi Telkom Flexi di tahun 2006 waktu itu adalah pelanggan Telkom Flexi diberikan kompensasi untuk menukarkan secara cuma-cuma perangkat *handphone*-nya yang masih tipe *Single Band* (hanya bekerja di pita frekuensi radio 1900 MHz) ke perangkat sejenis bertipe *Dual Band* (selain bekerja di pita frekuensi radio 1900 MHz, juga dapat beroperasi di pita frekuensi radio 800 MHz).

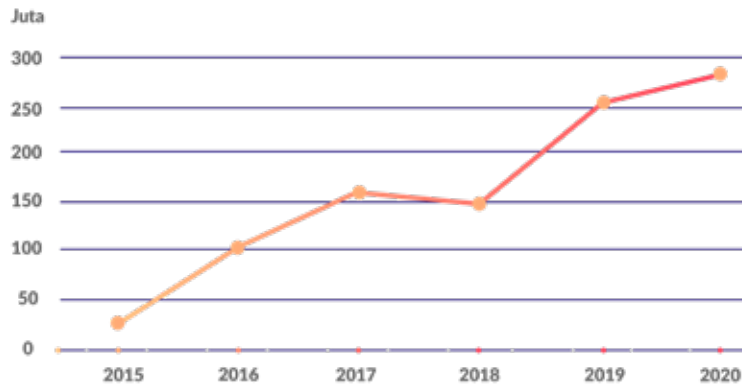


Berangkat dari momentum lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz di tahun 2006 tersebut, kemudian tata kelola spektrum frekuensi radio terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan hingga saat ini. Setelah lelang frekuensi di tahun 2006, kemudian disusul dengan beberapa kali lelang frekuensi lain seperti misalnya lelang pita frekuensi radio 2,3 GHz di tahun 2009, pita frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz di tahun 2017, serta yang terakhir kemarin adalah pita frekuensi radio 2,3 GHz di tahun 2021. Lelang frekuensi juga menstimulasi masuknya perencanaan target penyediaan spektrum frekuensi radio khususnya untuk jenis layanan *mobile broadband* ke dalam tataran kebijakan yang lebih strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Sejak RPJMN periode tahun 2015-2019 yang menetapkan target *bandwidth* minimal untuk layanan *mobile broadband* (3G/4G) sebesar 350 MHz, hingga saat ini target terus meroket hingga mencapai angka minimal 1.310 MHz *extra bandwidth* di era 5G. Target minimal tambahan *bandwidth* sebesar 1.310 MHz untuk layanan *mobile broadband* di era 5G tersebut ditetapkan sebagai salah satu target RPJMN periode tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, dan kemudian diadopsi lebih lanjut di dalam Rencana Strategis Kementerian Kominfo periode tahun 2020-2024 dalam bentuk Peraturan Menkominfo Nomor 2 Tahun 2021.



## Pertumbuhan Pelanggan 4G



(Sumber: Kemkominfo, 2021, diolah dari laporan kinerja operator seluler)

Peningkatan nilai strategis dan ekonomis dari spektrum frekuensi radio sebagai suatu sumber daya alam juga salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna layanan *mobile broadband* atau sederhananya adalah layanan seluler. Sejak GSM dan CDMA di era 2G dan 3G, masyarakat yang menikmati layanan seluler kemudian terus bertumbuh signifikan di era 4G sejak dilakukannya penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 1800 MHz. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan pelanggan 4G sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jika melihat grafik tersebut, terlihat bahwa saat ini, pelanggan 4G jumlahnya telah melebihi jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut hasil sensus BPS pada September 2020 berada di angka 270,2 juta jiwa. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, satu orang dapat memiliki lebih dari satu nomor SIM *card*, terlebih di era pandemi COVID-19 dewasa ini ketika hampir seluruh aktivitas masyarakat berpindah dari ruang fisik ke ruang digital.

Melihat perannya yang semakin krusial, spektrum frekuensi radio juga tidak ketinggalan turut menjadi bagian dari momentum besar penyusunan Omnibus Law pertama dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang tahap perumusan hingga penerbitannya dituntaskan di tahun 2020. UUCK memuat sejumlah modernisasi kebijakan terkait dengan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio. Orientasinya adalah *forward looking* sehingga fleksibilitas menjadi kata kunci pengaturan di era 5G yang akan menandai

lompatan besar transformasi digital bangsa Indonesia ke depannya. Sebagai informasi, saat ini pengaturan terkait dengan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio di UUCK tersebut telah terdapat aturan pelaksanaannya, antara lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) dan Peraturan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (PM 7/2021).

Modernisasi kebijakan pertama yang menjadi terobosan di dalam UUCK dan aturan-aturan turunan pelaksanaannya yaitu kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru seperti 5G. Kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio ini memperkaya dan memperluas kebijakan *Spectrum Sharing* yang telah berlaku sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP 53/2000).

Di dalam PP 53/2000, *Spectrum Sharing* direpresentasikan dengan istilah kebijakan “penggunaan bersama” spektrum frekuensi radio. Contoh mudahnya adalah ketika kita nge-*tune* ke frekuensi 150,9 MHz (biasa disebut juga dengan 105,9 FM) di dua kota berbeda, misalnya Bandung dan Surabaya, maka kita akan terhubung dengan 2 stasiun radio FM yang berbeda. Di Bandung, kita akan mendengarkan radio Ardan, sedangkan di Surabaya kita akan mendengarkan radio EBS. Artinya, dengan frekuensi yang sama yaitu 105,9 MHz di antara 2 wilayah geografis berbeda (terpisah jarak relatif cukup jauh), dimungkinkan adanya 2 pancaran gelombang radio yang juga berbeda.

Di dalam PP Postelsiar, kebijakan *Spectrum Sharing* diperkaya dengan konsep baru yang dinamakan “kerja sama” penggunaan spektrum frekuensi radio. Tujuannya untuk memberikan ruang gerak bagi pengguna frekuensi, khususnya pelaku usaha, untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari spektrum frekuensi radio. Dengan adanya kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut, maka kebutuhan *bandwidth* jaringan seluler yang semakin bertambah secara signifikan di era 5G dapat diatasi meskipun jumlah operator seluler di Indonesia termasuk yang obesitas dibandingkan negara lain. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menerima manfaatnya karena kualitas layanan seluler yang dinikmatinya akan meningkat, sekaligus memunculkan layanan-layanan baru yang akan bermanfaat bagi industri di sektor lain, seperti misalnya otomotif.

Selain itu, kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio juga akan membuka kesempatan yang lebih luas dalam mengakses suatu frekuensi meskipun frekuensi tersebut telah ditetapkan kepada satu pihak. Contoh yang paling dekat adalah adanya kebutuhan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk persinyalan kereta cepat Jakarta – Bandung yang rencananya akan menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz. Fakta bahwa

seluruh pita frekuensi radio 900 MHz telah ditetapkan izinnya kepada tiga operator seluler, membutuhkan terobosan regulasi agar Proyek Strategis Nasional (PSN) kereta cepat dapat direalisasikan, tanpa mengorbankan operator seluler dan masyarakat sebagai pelanggan dari operator seluler tersebut.

Selain kerja sama penggunaan, juga terdapat modernisasi kebijakan lain terkait dengan tata kelola spektrum frekuensi radio, yaitu perluasan pengaturan untuk pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan penegasan kewenangan Pemerintah yang dapat mencabut izin penggunaan spektrum frekuensi radio dari suatu pihak jika terbukti pemanfaatannya tidak optimal atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar. Hal lain yang juga diperbaiki di dalam UUCK terkait tata kelola spektrum frekuensi radio adalah upaya untuk memperjelas aturan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio hanya diwajibkan kepada pihak yang berstatus pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain menutup celah pembacaan yang multitafsir, ketentuan tersebut juga turut mendorong implementasi kebijakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio karena kekhawatiran pelaku usaha yang bekerja sama akan dikenai BHP yang “*double charging*” telah ditiadakan.



Dari secuplik penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang sangat strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Spektrum frekuensi radio terbukti menjadi *enabler* munculnya inovasi berbasis teknologi sehingga perannya sangat vital bagi transformasi digital, baik di sisi masyarakat, sektor perekonomian, maupun pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah. Karena perannya yang demikian krusial, pengaturan terhadap spektrum frekuensi radio sudah sepatutnya terus dilenturkan agar senantiasa adaptif terhadap tuntutan perkembangan teknologi sesuai zamannya, tanpa meninggalkan kendali Negara terhadap sumber daya alam tersebut yang telah digariskan di dalam UUD 1945. Spektrum frekuensi radio bagaikan oksigen yang menjaga denyut nadi bangsa Indonesia terus bergerak maju dan tumbuh guna meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung bersama setiap upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya dengan menyukseskan program digitalisasi penyiaran TV agar bangsa Indonesia dapat senantiasa kompetitif dengan negara lain, baik di kawasan regional maupun global.



# INTERAKSI KEMENTERIAN KOMINFO DAN INDUSTRI PENYIARAN INDONESIA



## Oleh: Gilang Iskandar

Sekretaris Perusahaan Grup Surya  
Citra Media (SCM)

Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi  
Swasta Indonesia (ATVSI)

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan dengan ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



**T**ugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi. Penyiaran televisi dan radio termasuk kedalam lingkup kerja Kemenkominfo terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan penyiaran.

Pelaksanaan tupoksi Kemenkominfo mengalami dinamika hebat sejak reformasi tahun 1998. Selain sempat dibubarkan, juga sempat menjadi portofolio Kementerian Negara. Semua berpangkal kepada “stempel” yang melekat di Departemen Penerangan sepanjang sejarah orde baru, yang dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi yang mengusung nilai demokrasi. Namun setelah melalui berbagai dinamika hebat itu, Kemenkominfo bisa eksis sampai saat ini. Hal ini tidak lain karena adanya kebutuhan negara atas peran suatu kementerian yang menangani bidang komunikasi dan informatika. Di lain pihak, juga karena kemampuan jajaran Kemenkominfo beradaptasi dengan tuntutan reformasi dan kemajuan perkembangan bidang komunikasi dan informatika baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional.

Seperti halnya Kemenkominfo, industri penyiaran Indonesia juga mengalami dinamika sejak

reformasi. Mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan merespon perkembangan industri penyiaran dalam waktu yang bersamaan, bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ada rentang waktu di mana media menikmati kebebasan sehingga muncul adagium “sekali merdeka, merdeka sekali”. Namun pada akhirnya industri media termasuk penyiaran menyadari bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus diutamakan yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan media itu sendiri.

Inilah konteks diperlukannya kembali peran Kemenkominfo yaitu untuk membuat keseimbangan pemenuhan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan berbagai elemen media termasuk penyiaran. Peran yang paling menonjol adalah pembuatan regulasi atau kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Namun berbeda dengan era sebelumnya, dalam era demokrasi seperti saat ini, kemampuan Kemenkominfo dalam menyerap dan mengolah aspirasi para pemangku kepentingan menjadi taruhan berhasil atau gagalnya penerapan suatu regulasi atau kebijakan.

Sudah berkali-kali terbukti jika Kemenkominfo dan atau para pemangku kepentingan komunikasi dan informatika menerapkan kacamata kuda, kepala batu, dan kuping kual, maka penyusunan atau penerapan suatu regulasi atau kebijakan yang diambil pemerintah akan sulit terlaksana bahkan gagal. Mestinya Kemenkominfo sudah makin canggih dalam menyerap dan mengolah aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan komunikasi dan informatika sehingga tercapai keseimbangan kepentingan negara dan para pihak tersebut.

Keyakinan akan kemampuan Kemenkominfo ini beralasan didasarkan atas berbagai hal, diantaranya: 1. Berbagai pengalaman Kemenkominfo sejak reformasi hingga saat ini, 2. Keterbukaan dan mudahnya akses informasi termasuk dari dunia luar, 3. Jajaran Kemenkominfo hidup dan besar di tengah masyarakat sehingga bisa memahami dengan baik kebutuhan masyarakatnya, 4. Usia dan pengalaman panjang Kemenkominfo sejak republik ini lahir dan berdiri, baik sebagai Departemen, Kementerian, Kementerian Negara dengan berbagai nama atau sebutan.

Industri penyiaran ditopang oleh 3 (tiga) A atau Segitiga Industri Penyiaran (*Broadcast Industry Triangle*) yaitu *Audience* (Pemirsa/Pendengar/Masyarakat), *Advertiser* (Pengiklan), dan *Authority* (Pemerintah/Regulator Penyiaran). Antar komponen ini saling berhubungan dan terkait erat satu sama lain. Media penyiaran eksis bila mendapat apresiasi dari masyarakat terutama yang menjadi pemirsa atau pendengar. Dalam industri penyiaran aspek ini bisa dilihat dari *Rating* dan *Share*. Besar kecilnya *rating* dan *share*, bisa menjadi cermin besaran apresiasi pemirsa atau pendengar terhadap suatu stasiun televisi atau radio. Dan angka *Rating* dan *Share* ini akan menjadi referensi utama bagi Pengiklan (*Advertiser*) dalam memutuskan berapa banyak beriklan di suatu stasiun televisi atau radio.



Angka *Rating* dan *Share* ini juga akan menjadi dasar bagi pengiklan untuk menghitung besaran Biaya Iklan Per Kepala (*Cost Per Rating Point/CPRP*). Di lain pihak, penyelenggaraan penyiaran harus sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang ditetapkan Kemenkominfo dan atau Regulator Penyiaran seperti Komisi Penyiaran Indonesia sesuai Tupoksi masing masing. Di seluruh dunia industri penyiaran khususnya penyiaran televisi memang diatur sangat ketat (*Highly Regulated*) menyangkut konten tentang HVS yaitu Horor (Mistik), *Violence* (Kekerasan), *Sex* (Pornografi). Hal ini karena dampak negatifnya kepada pemirsa yang bisa mempengaruhi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang melahirkan aksi meniru atau mencontoh dari apa yang ditonton di layar televisi.

Kemudian aspek teknis dan infrastruktur juga diatur agar tidak terjadi saling mengganggu (interferensi) para pengguna frekuensi. Industri penyiaran merupakan salah satu pengguna frekuensi. Ada pengguna lain seperti industri penerbangan, transportasi laut, telekomunikasi, radar, atau juga TNI dan POLRI. Salah satu peran Kemenkominfo adalah mengatur hal ini, agar penyelenggaraan dan pemakaian frekuensi bisa berjalan dengan baik dan teratur. Dalam segitiga industri penyiaran ini, peran dan fungsi Kemenkominfo sangat strategis untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kepentingan negara dengan kepentingan para pihak dalam industri penyiaran.

Saat ini industri media dan Kemenkominfo semakin berkembang pesat baik dalam hal teknologi, sistem, sumber daya manusia, dan lain lain. Interaksi yang baik selama ini antara para pemangku kepentingan komunikasi dan informatika dengan Kemenkominfo, selayaknya terus dipelihara bahkan ditumbuhkembangkan. Dari interaksi yang baik inilah akan terjadi pertukaran informasi yang pada akhirnya akan menimbulkan pemahaman satu sama lain baik posisi, sikap, kepentingan dan prioritas dari masing masing pihak.

Hubungan dan interaksi yang baik ini bisa saja menimbulkan kesalahpahaman pihak pihak tertentu sehingga dianggap sebagai kolusi. Padahal berbeda sama sekali, karena pada hakikatnya Kemenkominfo dan para pihak dalam industri media khususnya penyiaran memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Hanya saja pendekatan dan kondisinya yang berbeda satu sama lain, sehingga diperlukan interaksi dan komunikasi berkelanjutan dan intens agar dicapai suatu titik temu atas suatu isu.

Mengapa harus komunikasi berkelanjutan dan intens? Karena memang dinamika terus terjadi sehingga titik temu pada suatu waktu atau isu, bisa saja harus ditinjau lagi pada waktu atau isu yang lain sehingga perlu dicari titik temu yang lain lagi. Ini membutuhkan kesabaran (*patience*) dan daya tahan (*endurance*) dari para pihak termasuk Kemenkominfo.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, seluruh pemangku kepentingan penyiaran dan Kemenkominfo harus bergandengan dan bahu membahu dalam peran dan fungsi masing masing agar bangsa ini segera terbebas dari wabah Covid-19. Dan di lain pihak agar media penyiaran Indonesia mampu bertahan melewati masa krisis akibat pandemi ini.

Hubungan yang harus dibangun dan dipelihara adalah kemitraan, bukan dominasi satu atas yang lain. Ada unsur saling memerlukan antara media dan pemerintah. Karena itulah harus terus saling mendukung. Akan sangat baik bila media penyiaran televisi dan radio Indonesia, dapat terus melayani masyarakat melalui siaran hiburan dan informasi baik saat ini di tengah maraknya serbuan media platform digital dari luar negeri, maupun masa yang akan datang.





Industri Ekonomi  
Digital Indonesia,

# Bertumbuh Bersama

Oleh: Dyan Shinto  
Ekopuri Nugroho

Direktur Kebijakan Publik dan  
Hubungan Pemerintah Grup  
Perusahaan GoTo



## Hadir untuk Memberikan Solusi Mobilitas Masyarakat di Ibukota

**Sekitar 10 tahun yang lalu**, masyarakat perkotaan di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mobilitas dan logistik. Kala itu Nadiem Makarim, *founder* Gojek, sering bepergian menggunakan jasa ojek pangkalan langganan yang selalu diandalkannya untuk bepergian hingga membantu mengantarkan barang dan makanan sesuai pesanan, yang menurutnya sangat membantu kehidupannya sehari-hari. Dari pengalaman ini, Nadiem melihat peluang dan potensi besar dari para pelaku ojek yang dapat sangat diandalkan untuk membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Nadiem pun mempertemukan “Ojek” dengan teknologi untuk membuka peluang pemanfaatan jasa Ojek secara lebih luas. Hingga pada akhirnya, Gojek didirikan pada tahun 2010 sebagai *call center* untuk pemesanan jasa ojek.



(Kiri: Kantor Pertama Gojek, Kanan: Call-Center Pertama Gojek)

Pertama kali hadir di sebuah kantor kecil di wilayah Jakarta Selatan dengan karyawan yang hanya berjumlah belasan, Gojek mengalami peningkatan permintaan secara drastis, yang dan membuktikan bahwa layanan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Memahami adanya keterbatasan akses dan kesempatan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Gojek mengidentifikasi bahwa teknologi dapat menjadi instrumen bagi masyarakat untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas. *Platform* digital dapat menjadi solusi untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan membuka akses untuk semua orang. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasinya hanya dengan tiga jasa, yaitu GoRide, GoFood, dan GoSend. Tahun 2016, Gojek mulai melakukan ekspansi terhadap produk-produknya, hingga saat ini secara bangga Gojek telah menjadi aplikasi *on-demand* terdepan di Asia Tenggara dan pelopor model ekosistem multi-

layanan yang menyediakan akses ke berbagai layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan lainnya.

Ketika aplikasi Gojek pertama kali hadir, industri teknologi dan ekonomi digital Indonesia masih belum sehangat saat ini. Jumlah perusahaan teknologi berbasis *platform* dan *startup* juga masih sangat minim, sehingga kehadiran Gojek memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), yang saat itu dipimpin oleh Bapak Rudiantara atau yang biasa kami sapa hangat dengan Chief RA, telah memberikan iklim yang sangat positif bagi kami untuk berkembang. Beliau memberikan dukungan pada *startup* untuk terus maju dan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi Indonesia sehingga jumlah *startup* bertambah sangat pesat dan mendapatkan kepercayaan dari investor serta masyarakat.



Sedikit bercerita, saya telah berkecimpung di industri teknologi sejak tahun 2013, di mana saya bergabung dengan Google Indonesia sebagai *Head of Public Policy and Government Relations*. Saya melihat sendiri perkembangan besar dari dunia teknologi di Indonesia yang semakin maju dan meyakini peluang serta kesempatan besar dari industri ini. Tahun 2017-2018, saya memandang Gojek sebagai sebuah platform yang dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat, menghubungkan pemberi jasa dan konsumen, dan menyediakan jutaan lapangan kerja bagi mitra Gojek dan pelaku UMKM. Tak hanya itu, Gojek merupakan perusahaan yang dibangun dan dibesarkan oleh anak bangsa dan dapat menjadi sebuah kebanggaan Indonesia di mata dunia.

Hal ini membuat saya jatuh hati dan merasa bahwa Gojek merupakan tempat yang tepat bagi saya untuk bertumbuh, bersama-sama dengan anak bangsa lainnya, untuk memberikan dedikasi terbaik dan semangat kami dalam memajukan industri teknologi tanah air.

Saat ini Gojek telah memiliki lebih dari 20 produk, dimiliki oleh 1 dari 2 orang masyarakat Indonesia, membuka kesempatan bekerja bagi 2 juta mitra driver dan hampir 1 juta Mitra Usaha (96% adalah UMKM) di seluruh Asia Tenggara. Gojek juga telah melakukan ekspansi di Singapura dan Vietnam, sehingga menjadi salah satu pemain terdepan dalam penyediaan jasa melalui aplikasi.

### *Tumbuh Bersama Mitra, Perkuat Ekonomi Digital Indonesia*

Sejak awal perjalanannya sebagai *call center* pada tahun 2010, Gojek telah berevolusi secara signifikan hingga mampu mengakomodasi jutaan pesanan per harinya, bahkan ketika Anda selesai membaca kalimat ini, Gojek sudah menyelesaikan ribuan order baru di lebih dari 20 layanan kami sekarang.

Perkembangan yang Gojek alami hingga saat ini merupakan salah satu buah keberhasilan dari kerja keras Kominfo dalam melakukan transformasi digital secara multiaspek. Program ambisius Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet di lebih dari 5.000 daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) terus digencarkan dan mulai memberikan hasil yang menggembirakan. Lalu proyek "Palapa Ring", suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai

35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer, juga berhasil dioperasikan sejak akhir 2019. Di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate, saat ini Kominfo juga sedang mengembangkan jaringan telekomunikasi 5G secara komprehensif yang dapat menjadikan adopsi dan inovasi teknologi semakin terakselerasi untuk mendukung transformasi digital di empat sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Dari aspek sumber daya manusia digital, Kominfo juga telah meluncurkan berbagai gerakan nasional seperti Program 1000 *Startup* dan *Digital Talent Scholarship* yang berusaha untuk mendorong terwujudnya ekosistem *startup* digital yang kolaboratif dan inklusif dengan visi menciptakan solusi bagi permasalahan bangsa memanfaatkan teknologi digital. Tentu saja aspek yang juga menjadi salah satu kunci kemajuan

ekonomi digital dari Kominfo adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang progresif dengan menerapkan *light-touch approach* dalam mengatur industri sektor teknologi. Salah satu contohnya adalah relaksasi terhadap lokalisasi data melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019.

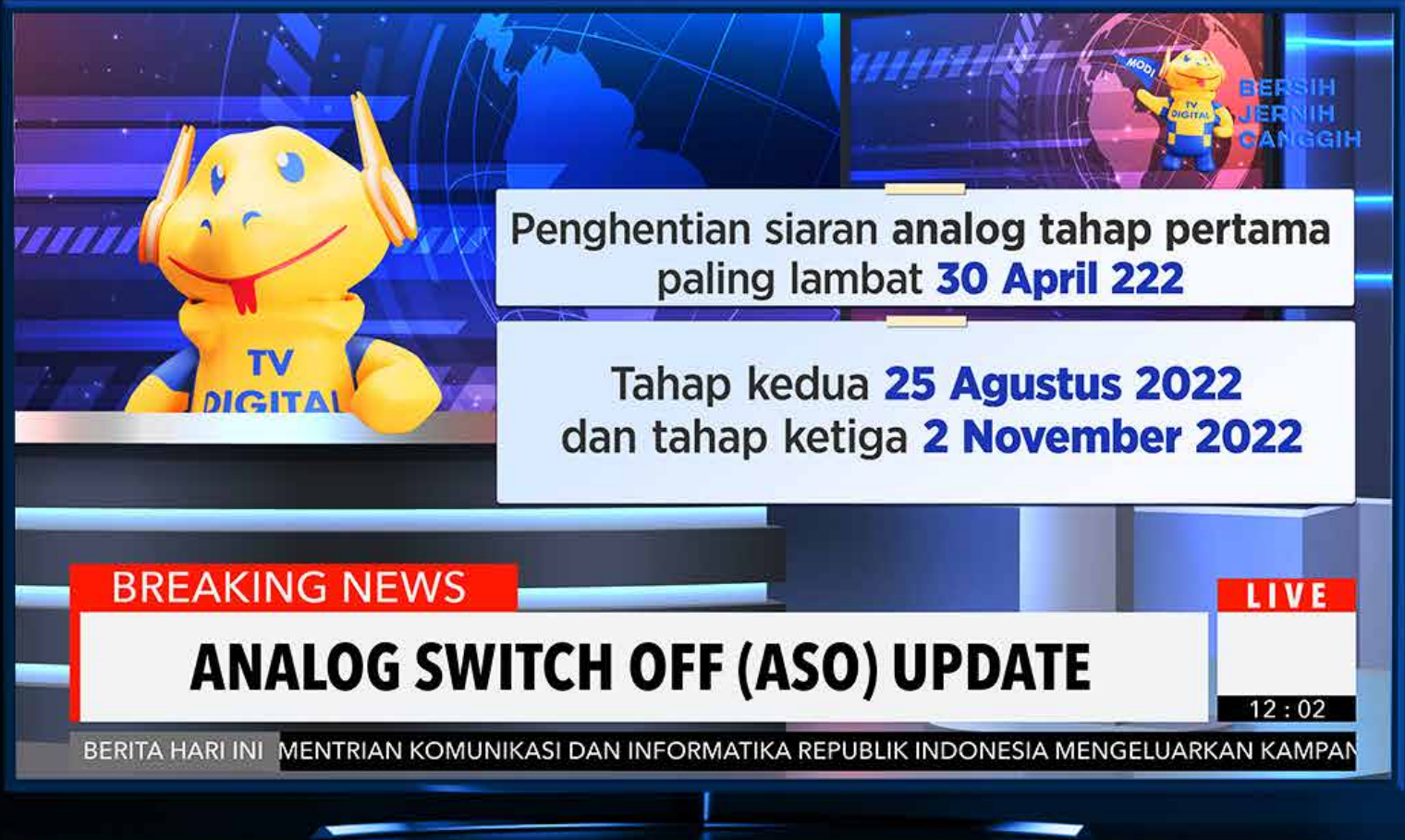
Hubungan antara Kominfo dan Gojek merupakan sebuah simbiosis mutualisme yang akan selalu saling mempengaruhi. Saya ingat pada tahun 2015 silam, Kominfo, atas permintaan beberapa kementerian terkait, pernah melakukan pemblokiran aplikasi Gojek selama satu hari. Hal ini terjadi karena adanya disrupsi atas layanan transportasi online yang kala itu belum memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dengan diskusi yang konstruktif oleh seluruh pemangku kepentingan, Kominfo dan kementerian terkait mencabut larangan tersebut dan melakukan penyesuaian aturan main yang dapat diterima oleh semua pihak. Hanya dengan pemikiran yang maju dari sisi pemerintah, hal ini dapat dilakukan dengan begitu baik pada saat itu. Kejadian ini menandakan babak baru Indonesia atas terbuka lebarnya peluang ekonomi digital dalam memajukan bangsa Indonesia.

Pada bulan Mei 2021 ini, Gojek dan Tokopedia resmi bergabung menjadi GoTo Group untuk membentuk sebuah ekosistem untuk kehidupan sehari-hari dan menjadi juara teknologi #1 di Indonesia yang akan menaungi lebih dari 2 juta mitra driver, 11 juta mitra usaha, 100 juta pengguna aktif, dan berperan terhadap 2% GDP nasional. GoTo menggabungkan layanan *e-commerce*, *on-demand* dan keuangan, menciptakan platform pertama di Asia Tenggara yang menyediakan ketiga layanan esensial tersebut dalam satu ekosistem. Penggabungan ini merupakan titik penting dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia, dan peristiwa ini tidak akan dapat terjadi tanpa dukungan penuh dari Kominfo yang sejak awal menitikpkan pesan untuk tetap fokus memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya pengembangan UMKM lokal. Perjalanan 20 tahun Kominfo hingga saat ini telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar dalam industri ekonomi digital baik di kawasan maupun di dunia, termasuk salah satunya menjadikan Indonesia di lima besar negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia, yaitu mencapai 2.229 startup per April 2021. Namun, masih banyak potensi ekonomi digital yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah dan ekosistem GoTo. Saya berharap seluruh kesuksesan yang telah diraih bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari cita-cita bangsa yang lebih besar untuk menyongsong masa Indonesia Emas di tahun 2045.





## Lakukan Penyesuaian, Kominfo Tetapkan Tiga Tahapan Analog Switch Off (ASO)



Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian terhadap jadwal penghentian siaran televisi analog atau *Analog Switch Off (ASO)* dari lima menjadi tiga tahapan. Semula tahap pertama ASO akan dilakukan di enam wilayah siaran pada 17 Agustus 2021, namun melalui beberapa pertimbangan, maka diputuskan untuk dijadwalkan ulang bersama dengan tahapan-tahapan ASO berikutnya. Meskipun mengalami penyesuaian, target pelaksanaan ASO tetap dilakukan paling lambat 2 November 2022.

"Lima tahap penghentian siaran analog akan disesuaikan melalui perubahan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penyiaran. Penyesuaian tahapan dan jadwal ASO dilakukan tanpa melampaui tanggal yang diamanatkan ketentuan perundang-undangan," tutur Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ismail.

Plt. Dirjen Ismail menyebutkan bahwa penyesuaian jadwal pelaksanaan ASO dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa hal yaitu fokus pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pada pemulihan kondisi pandemi Covid-19; masukan dari masyarakat dan elemen publik lainnya; serta kesiapan teknis para pemangku kepentingan untuk melakukan migrasi ke siaran TV digital.

Perubahan jadwal dan tahapan ASO ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dimana Kementerian Kominfo telah merancang tiga tahap ASO yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2 November 2022.

Tahap & Tanggal	Jumlah Wilayah Siaran	Jumlah Kabupaten/Kota
30 April 2022	56 Wilayah	166 Kabupaten/Kota
25 Agustus 2022	31 Wilayah	110 Kabupaten/Kota
2 November 2022	25 Wilayah	63 Kabupaten/Kota

ASO tahap I akan berlangsung di 56 wilayah siaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, hingga 30 April 2022 waktu setempat. Untuk Tahap II paling lambat pada 25 Agustus 2022 waktu setempat di 31 wilayah siaran, termasuk di antaranya Sulawesi Selatan 5, Kalimantan Tengah 6, Nusa Tenggara Timur 2, DI Yogyakarta, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan DKI Jakarta. Sedangkan Tahap III akan mengatur ASO di 25 wilayah siaran antara lain di Jawa Tengah 5, Kalimantan Barat 6, Nusa Tenggara Barat 5, Maluku 2, Sulawesi Tengah 3 dan Papua 9.

Plt. Dirjen Ismail menegaskan penyesuaian jadwal ASO tidak dimaksudkan untuk menunda persiapan peralihan dari siaran analog ke digital, melainkan bertujuan agar transisi menuju ASO sebagai proses yang berjalan baik bagi semua pihak.

"Persiapan seluruh aspek teknis secara matang menjadi sangat penting untuk dilanjutkan. Penundaan waktu ASO tahap

pertama hingga ke 30 April 2021 tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan siaran televisi digital dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," ujarnya.







## ASO Tuntas

2 November 2022

Meskipun dilakukan penyesuaian jadwal tahapan, target pelaksanaan penghentian siaran televisi analog (ASO) tetap dilakukan paling lambat pada 2 November 2022. "Penyesuaian tahapan dan jadwal ASO yang baru tentunya dilakukan dengan tanpa melampaui tanggal yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan," tegas Plt. Dirjen Ismail.

Batas akhir proses peralihan dari siaran televisi analog ke digital merupakan amanat Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaan terkait.

Pasal 60A UU Cipta Kerja mengamanatkan penyelesaian siaran televisi analog ke digital dalam kurun waktu 2 tahun sejak undang-undang disahkan. Pada 2 November 2022, seluruh stasiun siaran televisi analog di Indonesia harus diakhiri dan digantikan dengan siaran televisi digital. Sehingga dengan digitalisasi televisi di Indonesia, maka simulcast akan berakhir dan dimulainya *full digital broadcasting*.

Sumber Foto : Antara Foto



## Sosialisasi Tahapan ASO

Selain persiapan teknis terkait ASO, Kementerian Kominfo juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait proses penghentian siaran televisi analog ini. Dengan semakin banyak yang terlibat dalam proses tersebut, diharapkan bisa mendukung setiap tahapan ASO sehingga bisa berjalan dengan baik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi ini menjadi tanggung jawab bersama agar bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.



“Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan ekosistemnya dan bersama penyelenggara penyiaran untuk **mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton siaran digital,**”

Selain meningkatkan pemahaman, hal yang tidak kalah penting menurut Menkominfo adalah senantiasa mengantisipasi mispersepsi yang mungkin saja terjadi di masyarakat.

“Program ASO adalah usaha berskala nasional dan melibatkan rantai ekonomi yang lintas industri mulai dari penyiaran, elektronika, perdagangan, media, sampai dengan telekomunikasi dan ekonomi digital,” paparnya.

Kementerian Kominfo berharap kegiatan sosialisasi dilakukan di wilayah penerima manfaat ASO sehingga masyarakat setempat dapat semakin siap untuk menikmati siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suaranya jauh lebih baik dari siaran analog.

# 20 Tahun Kominfo

## Dalam Lensa



### Sofyan Djalil

Menkominfo RI 2004 - 2007

Menteri Sofyan Djalil saat memimpin konferensi pers di Media Center Lembaga Informasi Nasional tahun 2003. Lembaga Informasi Nasional (LIN) dibentuk setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan pada tahun 2000, dan di tahun 2005 terjadi peleburan antara Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi





## Mohammad Nuh

Menkominfo RI 2007 - 2009

Menteri Mohammad Nuh saat menghadiri Kerja Sama Penerbitan Prangko Indonesia - Jepang pada Maret 2008. Prangko ini menandai hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang memasuki usia ke-50, yang dimulai pada tahun 1958, sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang dan Persetujuan Pampasan.

Menteri M. Nuh didampingi Ashwin Sasongko yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi (sebelumnya Aplikasi Telematika) saat menggelar konferensi pers tentang IT di Jakarta.







## Tifatul Sembiring

Menkominfo RI 2009 - 2014

Salah satu dokumentasi foto Menteri Tifatul Sembiring saat memimpin Rapat Kerja Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR RI. "Saat rapat itu, teman-teman selalu siapkan. Sekjen biasanya di samping memberikan bahan-bahan, feeding. Seorang menteri itu harus pandai mengatur komunikasi, baik vertikal maupun horizontal. ke atas itu ada Presiden, ada wakil Presiden, Menko, kementerian lain. ke samping itu ada DPR, rekan-rekan lain, komunitas, APJII, dll. Ini kita seimbangkan, bismillah aja. Ini pengalaman berharga saya sebagai Menteri," kenang Pak Tif dalam acara 20 Tahun Kementerian Kominfo: Temu Kangen Menteri yang digelar secara virtual, Rabu (04/08/2021).



Menteri Kominfo Tifatul Sembiring (kedua kiri), Dirjen IKP Kemkominfo, Freddy H Tulung (kanan), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri), dan Wagub Sumbar Muslim Kasim (dua kanan) menabuh drum tanda dibukanya Pekan Informasi Nasional 2014 di Padang, Sumbar, Sabtu (24/05/2014). Pelaksanaan PIN ke-6 berlangsung dari tanggal 23-27 Mei 2014 dan mengangkat tema "Melalui Pekan Informasi Nasional Kita Perkokoh Persatuan Dan Kesatuan Dalam Bingkai NKRI Menuju Masyarakat Indonesia Yang Produktif".



Menteri Tifatul Sembiring mendistribusikan bantuan kendaraan penyuluhan informasi publik roda dua dan roda empat, yang lebih dikenal dengan istilah M-Pustika (Mobil dan Motor Pusat Teknologi Informasi Komunitas) ke sejumlah provinsi terpencil, di Jakarta, Rabu (6/02/2013). Pemerintah memberikan bantuan berupa 10 kendaraan roda dua dan 10 kendaraan roda empat kepada sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan penyebaran informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah yang akurat, cepat, mudah, dan merata.



### Tifatul Sembiring

Menkominfo RI 2009 - 2014

Menkominfo Tifatul Sembiring saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (8/3/2013).

MoU yang berlaku selama tiga tahun tersebut dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan ITS dan tiga PTN di Indonesia yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Sebelas Maret Solo, dan Universitas Hasanuddin Makassar.



### Tifatul Sembiring

Menkominfo RI 2009 - 2014

Uniknya, usai menghadiri rangkaian kegiatan Kuliah Umum "Kreativitas di Bidang IT dan Peluang Ekonomi", Menteri Tifatul Sembiring (baju hitam kuning, kelima dari kanan) menyempatkan bermain futsal dengan para mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Kunjungan Menteri Tifatul ke ITS ini dilakukan dalam rangka Penandatanganan MoU kerja sama pendidikan, yang meliputi pertukaran tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, serta pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya itu, ITS dan Kemenkominfo juga turut bekerjasama dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan ICT di Indonesia.



## Rudiantara

Menkominfo RI 2014 - 2019

Sambutan Menteri Rudiantara pada Peresmian Base Transceiver Station (BTS) 4G, di Desa Tolo'oi, Kab. Sumbawa, Provinsi NTB, Sabtu (17/03/2018). Menteri Rudiantara menegaskan BTS 4G merupakan program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi di daerah-daerah terpencil. Pembangunan BTS diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi serta mempromosikan hasil produksinya secara tepat, termasuk dalam bidang pertanian. "Jika sebelumnya, masyarakat hanya bisa menelepon dan kirim SMS, sekarang sudah bisa kirim foto, bisa menggunakan medsos. Apalagi mau panen jagung, sekarang bisa dipotret saja, dan tunjukkan ini siap dipanen, itu salah satu manfaatnya," kata Menteri Rudiantara.



## Rudiantara

Menkominfo RI 2014 - 2019

Peresmian pengoperasian jaringan Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Proyek "tol langit" ini terbagi menjadi tiga paket, yaitu Paket Barat, Tengah, dan Timur, yang meliputi wilayah Merauke, Sorong, Rote, Penajam Paser Utara, Jakarta dan Sabang. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi juga melakukan konferensi video dengan Bupati Merauke Danlantal, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Walikota Sorong, Wakil Gubernur NTT, Bupati Kabupaten Rote Ndao, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta Wakil Walikota dan Sekda Sabang.







## Johnny G. Plate

Menkominfo RI 2014 - Sekarang

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate berfoto bersama siswa/siswi Seminari Pius Kisol usai melakukan dialog di Desa Tanah Rata, Kec. Kota Komba, Manggarai Timur, NTT, Jumat (20/12/2019). Menteri Kominfo pada acara dialog tersebut mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan tugas kepada dirinya untuk mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan telekomunikasi internet (agar) seluruh rakyat Indonesia bisa mengakses internet lebih cepat, sehingga satu sama lainnya dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat yang berujung semakin meningkatnya kualitas hidup bangsa Indonesia.



Petugas Medis melakukan screening terlebih dahulu kepada peserta vaksin sebelum melakukan penyuntikan Vaksin COVID-19 yang bertujuan untuk pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum tubuh menerima suntikan Vaksin COVID-19. Pemeriksaan awal yang dilakukan antara lain meliputi pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan apresiasi atas inisiatif UNIKA Atma Jaya dan Yayasan Atma Jaya dalam menyelenggarakan program Vaksinasi COVID-19 massal ini. Menurut Menkominfo saat ini sudah ada sekitar 13,3 juta vaksin dosis pertama yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mendorong agar vaksinasi terus meningkat, sehingga pada bulan Agustus 2021, lebih dari 2 juta dosis vaksin tersalurkan kepada masyarakat. Jika semua itu terlaksana dengan baik, maka di bulan November atau Desember akan menghasilkan *herd immunity* secara nasional.

Kisah ini ditulis oleh **Sri Indrati Noviarsari**, atau yang akrab dipanggil lin, seorang pegawai Biro Hubungan Masyarakat yang telah bergabung di Kemkominfo sejak awal kementerian ini berdiri dengan nama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi.

lin sering kali ditugaskan pimpinan untuk meliput kegiatan-kegiatan Menteri. Berbekal peralatan kamera seadanya, ia berpindah ke sana kemari, mendokumentasikan dari berbagai sudut di tengah padatnya jadwal Menteri Kominfo. Tak jarang ia diminta untuk ikut mendokumentasikan kegiatan Menteri hingga ke pelosok daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar). Melalui tulisan ini, lin mencoba membagikan kisah menarik yang ia alami selama belasan tahun bertugas meliput kegiatan Menteri sejak era Tifatul Sembiring, Menkominfo periode 2009 - 2014.





## Pak Tif yang selalu murah senyum

Saya liputan untuk Menkominfo Tifatul Sembiring selama tahun 2012 hingga tahun 2014. Saat itu saya masih menggunakan kamera digital dengan lensa standar dan tanpa blitz tambahan, yang artinya saya harus memfoto dari jarak dekat fotonya dekat dengan objek, sekaligus latihan mental. Untungnya Pak Menteri tidak pernah protes atau menolak untuk di foto.

Memfoto Pak Menteri, dari sudut manapun semuanya bagus.

Sebenarnya sempat kepikiran, Bapak kenal saya nggak ya? Hmm...belum pernah sekalipun saya bicara langsung dengan Pak Menteri, apalagi minta foto berdua. Tapi ya sudahlah, yang penting foto dan berita kegiatan Pak Menteri naik ke portal. Saat itu yang ada di pikiran saya hanya "ambil foto, selesaikan tugas liputan."

## Meliput dengan sembunyi-sembunyi

Saya meliput Kegiatan Menkominfo Rudiantara sejak tahun 2015 di usia 45 tahun. Foto-foto di atas saya ambil ketika meliput Chief RA kegiatan Peletakan Batu Pertama Palapa Ring Paket Tengah di Pulau Morotai Selasa 22 November 2016.

Sebelumnya di tanggal 21 November 2016 Menkominfo melakukan kunjungan ke Pulau Kolorai dengan menggunakan Kapal Patroli Patkamla Galela. Menkominfo dan rombongan tiba di desa Kolorai bersama Kabag Humas dan Protokol Setkab Pulau Morotai Akri Y Wijaya, di desa Koloray. Menteri Kominfo, Rudiantara bersama Bupati Morotai, Samsuddin A Kadir, mengunjungi Keramba Ikan Kerapu dan bermain dan berfoto dengan anak-anak Desa Kolorai.

Ada kebanggan dan sukacita dapat mengunjungi desa yang sangat jauh dari Jakarta, yang mendengar namanya pun baru kali pertama. Melihat anak-anak yang berkumpul dengan sukacita menyambut tamu yang datang, terbit penyesalan "kenapa nggak bawa coklat yang banyak saat itu ya". Mereka tetap penuh tawa walaupun jauh dari kemewahan ibukota. Siapapun yang pernah meliput Chief RA pasti tahu, beliau tidak terlalu nyaman dengan kamera dan pantulan lampu blitz yang meliput kegiatan, terutama jika kegiatan tersebut berupa rapat dengan mitra kerja. Tak jarang, saya diminta keluar dari ruangan beliau, bahkan ditanya "Ngapain di sini?" Ini membuat kita seringkali sembunyi-sembunyi dari pandangan Bapak saat meliput kegiatan.



Terimakasih sudah menjadi Menkominfo dan memimpin kami. Terimakasih karena bapak menganggap kami seperti keluarga. Meski sering kali kami diminta keluar ruangan dan berhenti mendokumentasikan kegiatan Bapak, namun Bapak selalu ringan hati jika diajak foto selfie, berpose dengan kami sehingga kami dengan bangga dapat mengupload di media sosial kami.







## Tetap Dipercaya Pimpinan

Usia saya sudah memasuki 50 tahun saat pergantian kepemimpinan Menkominfo dari Rudiantara ke Johnny G. Plate. Di usia yang sudah tidak muda ini lagi, saya masih dipercaya oleh pimpinan untuk bertugas meliput kegiatan-kegiatan Menteri.

Satu hal yang membuat saya bangga adalah di antara foto-foto yang saya ambil pada kegiatan hari Nusantara Ecovention Ancol Jakarta, 13 Desember 2020, masih digunakan oleh Kantor Berita Nasional, meski dengan fasilitas kamera tanpa blitz dan lensa yang standar.\

Bangga rasanya di usia 50 tahun ini saya masih diberi kesempatan untuk meliput kegiatan Menteri. Saya hanya berharap semoga hasil kerja saya selama ini tidak mengecewakan. **Terima kasih, Pak Menteri.**





**Bangga rasanya di usia 50 tahun ini saya masih diberi kesempatan untuk meliput kegiatan Menteri. Saya hanya berharap semoga hasil kerja saya selama ini tidak mengecewakan.**

**Terima kasih, Pak Menteri.**





# Prospek Satu Tahun Transformasi Digital Nasional

Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19. Dari istilah yang sering kita dengar seperti *work from home*, *physical distancing*, *stay at home*, dan masih banyak lagi yang menuntut kita untuk beradaptasi dengan situasi ini. Bahkan untuk merayakan hari kemerdekaan di tahun 2020 dan 2021, terpaksa harus dilakukan secara virtual, tidak ada karnaval, lomba-lomba hari kemerdekaan, hingga berbagai kegiatan lainnya. Kita harus perketat protokol kesehatan sebagai cara paling ampuh menyudahi pandemi.

Meskipun pandemi telah memberikan banyak sekali perubahan, utamanya masalah kesehatan. Namun pandemi juga harus dijadikan sebagai momentum melakukan akselerasi, berkolaborasi

dan saling meningkatkan etos kerja serta menyesuaikan perkembangan zaman.

Pada tanggal 3 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arahan melalui Rapat Terbatas untuk perencanaan transformasi digital nasional. Arahan Kepala Negara sangat jelas dan memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang.

“Kita tahu bahwa pandemi Covid-19 ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemi maupun *next* pandemi mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktifitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke *online* dan digital. Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang,” demikian yang disampaikan Presiden dalam Ratas di Istana Negara, Senin (03/08/2020).





Guna membangkitkan semangat untuk melakukan transformasi digital nasional, Presiden Jokowi mengutip survei dari IMD *World Digital Competitiveness* tahun 2019, bahwa Indonesia masih berada di peringkat 56 dari 63 negara terkait daya saing digital.

“Memang kita di bawah sekali, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di Asian. Misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapore di posisi nomor 2. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen kehadiran pemerintah dalam meningkatkan daya saing digital Indonesia di kancah internasional, alokasi anggaran di sektor komunikasi dan informatika untuk pembangunan ekosistem digital di tahun 2021 pun ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2020 – 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2021.

“Pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp.30,5 triliun (termasuk melalui TKDD), difokuskan untuk mengakselerasi

transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara berharap alokasi anggaran itu untuk mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).



## Kominfo Jawab

### 5 Arah Presiden

Dalam rangka mempercepat akselerasi transformasi digital dengan dukungan anggaran TA 2021, Presiden Jokowi mengejutkan hal tersebut melalui lima arahan.

**Pertama**, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet. **Kedua**, persiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.

**Ketiga**, percepat integrasi pusat pusat data nasional. **Keempat**, siapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan **kelima**, hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.

Presiden menekankan untuk dilakukan, dipersiapkan, dan ditingkatkan dengan kerja cepat dan kerja kolaborasi. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kemudian menginstruksikan civitas Kementerian Kominfo dan ekosistem mitra kerja untuk mewujudkan arahan tersebut. Maka inilah prospek transformasi digital dalam setahun terakhir.



# 1 Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet.

Dimulai dari pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah 3T oleh pemerintah dan *non* 3T dari operator seluler. Pada 22 April 2021, Menkominfo Johnny G. Plate telah meletakkan batu pertama atau *groundbreaking* pembangunan BTS 4G tahun 2021 di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan membangun 4.200 BTS di tahun 2021 dan 3.704 BTS di tahun 2022 di seluruh wilayah 3T di Indonesia, yang dilakukan dalam 5 paket. Adapun rincian 5 paket tersebut sebagai berikut:

**Paket 1** sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776).

**Paket 2** sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)

**Paket 3** sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)

**Paket 4** sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)

**Paket 5** sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)

Program lain dalam pembangunan infrastruktur digital adalah menyediakan akses internet di desa/kelurahan di wilayah 3T. Sebagai contoh penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan yang di tengah pandemi Covid-19 ini membutuhkan jangkauan internet.

Menurut Menteri Johnny, jumlah fasyankes yang mencakup rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia sebanyak 13.011. Masih terdapat 708 fasyankes yang belum tersedia akses internet dan ditargetkan pada kuartal I tahun 2021 akan diselesaikan.



## 2 Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Melalui Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI pada 1 Februari 2021 lalu, Menteri Johnny menyatakan bahwa Kementerian Kominfo telah menyerahkan *Roadmap Indonesia Digital 2021-2024* kepada Presiden Joko Widodo, sebagaimana dalam rangka menindaklanjuti arahan mengenai transformasi digital nasional yang salah satunya menyusun roadmap di sektor-sektor strategis.

*Roadmap Indonesia Digital 2021-2024* mencakup empat sektor strategis, yakni mewujudkan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Guna menyukseskan hal tersebut, Kementerian Kominfo melibatkan mitra kerja, termasuk kementerian/lembaga, sektor swasta dan masyarakat.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong realisasi transformasi digital Indonesia, yang didalamnya tidak kurang dari 100 kegiatan yang harus dilakukan," kata Menteri Johnny.



## 3 Percepat Integrasi Pusat Data Nasional.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, Menkominfo Johnny G. Plate telah menyiapkan dengan matang berbagai aspek dalam mengintegrasikan Pusat Data Nasional (PDN).

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo telah mengantongi beberapa daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan PDN. Persiapan awal yang dilakukan adalah meninjau lahan yang strategis dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Dalam kunjungannya ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Menteri Johnny menyatakan setidaknya ada 4 daerah yang diproyeksi akan menjadi tempat lokasi PDN dengan berbagai kesiapannya.

"Jakarta sudah siap, Batam juga di dalam *sort-list* yang prioritas. Ibu Kota Negara baru pasti harus kita bangun, dan terakhir kita sedang melakukan telaah akhir pilihannya dan Labuan Bajo mempunyai potensi besar menjadi pusat data nasional keempat nasional," jelasnya.



## 4 Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.

Pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital memang sudah menjadi fokus Kementerian Kominfo dalam beberapa tahun terakhir. Fokus dalam pengembangan SDM talenta digital itu semakin ditingkatkan melalui arahan Presiden Jokowi.

Setidaknya kita ketahui bahwa Kementerian Kominfo menyiapkan SDM talenta digital dari level dasar (*basic*), menengah (*intermediate*) hingga level atas (*advance*). Dengan pendekatan yang lebih humanis melalui pelatihan-pelatihan dari hulu ke hilir, SDM talenta digital diharapkan menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital.

Oleh karenanya, dari level *basic* dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital yang menasar seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utama dari gerakan ini untuk memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya menjaga ruang digital yang sehat dan produktif. Pada 20 Mei 2021, Presiden Jokowi telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang bertujuan untuk mendorong masyarakat makin cakap digital.

Pada tahun 2021, Program LDN diselenggarakan melalui 20 ribu pelatihan melalui modul dan kurikulum yang menasar empat pilar, yakni *digital ethics*, *digital safety*, *digital skill*, dan *digital culture*. "Ke depan nantinya setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia," ujar Menkominfo.

Sedangkan untuk pengembangan talenta SDM digital di level menengah, dilakukan melalui program pelatihan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program ini dihadirkan dan didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix, yakni pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha dan media. Tahun ini, Kementerian Kominfo menargetkan 100 ribu peserta, telah direkrut 60 ribu peserta dan tersisa 40 ribu diantaranya hingga akhir tahun nanti.

Kemudian di level *advance*, Kementerian Kominfo menginisiasi program pelatihan *Digital Leadership Academy* (DLA). DLA merupakan program peningkatan kapasitas pemimpin di tanah air di bidang digital. Oleh karenanya, program DLA dikhususkan bagi pimpinan tinggi di pemerintahan baik pusat dan daerah, DPR/ DPRD, pimpinan di perguruan tinggi, hingga C-Level di perusahaan swasta dan rintisan digital. Di tahun 2021 ini, program DLA menargetkan 300 peserta yang akan mengikuti pelatihan bersama mitra empat perguruan tinggi terbaik di dunia, yakni Nasional University of Singapore (NUS), Tsinghua University, Harvard University, dan University of Oxford.



## 5 Regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.

Menteri Johnny menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan arahan Presiden ujungnya untuk terwujudnya capaian pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan tiga skema pendanaan meliputi *Universal Service Obligation (USO)*, *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)* sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.

Menkominfo Johnny G. Plate meyakini melalui tiga skema pembiayaan tersebut mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat akan pentingnya implementasi digitalisasi dalam setiap aktifitas baik dari segi tata kelola, kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor penting lainnya.

**“Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal,”**

Menteri Johnny saat menghadiri secara virtual kegiatan *The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region*, dari Jakarta, 2 November 2020.





Melihat pentingnya arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi digital nasional, Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan bahwa meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak akan menghentikan semangat pemerintah dalam menuntaskan konektivitas digital di Indonesia.

Selain program dan langkah-langkah strategis seperti yang dijelaskan di atas, dukungan untuk transformasi digital juga dilakukan melalui sinergitas program lainnya, seperti menyiapkan ekosistem pendukung untuk migrasi TV analog ke digital, mendorong dan mendukung Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta menjadi Institut Digital National University (IDN-U), menargetkan proyek Satelit Multifungsi Satelit Indonesia Raya (Satria-1) beroperasi di tahun 2023, serta berbagai program dan langkah-langkah strategis lainnya sebagai wujud komitmen membangun Indonesia Digital Nation dan untuk Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju.

# Semarak

## #17anSerudiRumah

## #BersamaKominfo

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan perlombaan virtual untuk menyemarakkan hari Kemerdekaan. Pada tahun 2021 ini, ada beberapa kompetisi virtual yang meramaikan jagat media sosial, antara lain:

**SEMARAK 17an**  
#BERSAMAKOMINFO #17ANSERUDIRUMAH

**Total Hadiah  
Jutaan Rupiah**

17 AGUSTUS TAHUN EMPAT LIMA  
HARI MERIAHKAN HARI 171 BERSAMA SAMA

CUKUP DI RUMAH SAJA  
HEBAYAKAN HUT KE-76 REPUBLIK INDONESIA

Periode lomba: 10-17 Agustus 2021  
Pengumuman pemenang: Kamis, 19 Agustus 2021

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**Twibbon**  
Menyambut HUT RI ke-76

• Peserta upload foto dengan twibbon di akun Instagram masing-masing

• Peserta Wajib Follow Sosial Media Kominfo (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook dan Tiktok)

• Gunakan caption kreatif dan unik tentang bagaimana kamu memaknai Hari Kemerdekaan

• Akun tidak boleh di-private

• Akses twibbon melalui [kominfo.id/twibbon17an](https://kominfo.id/twibbon17an)

• Tag @kemenkominfo, mention 3 akun

• Penggunaan hashtag #17anSerudiRumah #BersamaKominfo #IndonesiaTumbuh #IndonesiaTumbun

• Ketik "done twibbon" di kolom komentar post ini jika sudah unggah foto.

**BONUS**  
Foto Terbaik akan ditampilkan di Media Kominfo KE-76 edisi Agustus 2021

**Hadiah**

Terbaik 1: 250.000  
9 Hadiah Hiburan: 100.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



### Kompetisi Sepeda Hias Virtual Menyambut HUT ke-76 RI

- Peserta **Wajib Follow Sosial Media Kominfo** (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook dan Tiktok)
- Gambar sepeda yang bisa dihias dan contoh, ada di highlight instagram story @kemenkominfo "17anKominfo"
- Peserta bebas berkreas dengan gambar yang sudah disediakan
- Unggah melalui instagram story milikmu
- Tag @kemenkominfo dan hashtag #17anSerudiRumah #IndonesiaTangguh #IndonesiaTumbuh
- Akun tidak di-private
- Simpan sepeda hias kreasimu di highlight instagram story dengan judul cover "Sepedahias"
- Ketik "done sepeda" di kolom komentar post ini jika sudah unggah instagram story dan buat highlight

**Hadiah**

Juara 1	250.000
Juara 2	150.000
Juara 3	100.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

### Memasukkan Paku ke Botol Menyambut HUT ke-76 RI

- Peserta **Wajib Follow Sosial Media Kominfo** (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook dan Tiktok)
- Motion ada pada highlight instagram story @kemenkominfo "17anKominfo"
- Peserta capture paku yang bergerak tepat sesuai gambar
- Unggah hasil capture di instagram story milikmu
- Tag @kemenkominfo dan hashtag #17anSerudiRumah #IndonesiaTangguh #IndonesiaTumbuh
- Simpan hasil capture di highlight instagram story dengan judul cover "PakuBotol"
- Akun tidak di-private
- Ketik "done ikut lomba story paku dalam botol" di kolom komentar post ini jika sudah unggah story dan buat highlight

**Hadiah**

Juara 1	250.000
Juara 2	150.000
Juara 3	100.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

### Aktivitas Seru di Rumah Menyambut HUT ke-76 RI

- Peserta upload foto tentang kegiatan yang dilakukan di rumah menyambut HUT ke-76 RI melalui akun instagram masing-masing
- Peserta **Wajib Follow Sosial Media Kominfo** (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook dan Tiktok)
- Gunakan caption untuk menceritakan kegiatan tersebut dengan kreatif dan unik
- Akun tidak boleh di-private
- Tag @kemenkominfo, mention 3 akun
- Penggunaan hashtag #17anSerudiRumah #AAktivitas17an #BersamaKominfo #IndonesiaTangguh #IndonesiaTumbuh
- Ketik "done foto" di kolom komentar post ini jika sudah unggah foto

**BONUS**  
Foto Terbaik akan ditampilkan di Malam Kominfo NEXT edisi Agustus 2021

**Hadiah**

Juara 1	500.000
Juara 2	350.000
Juara 3	250.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

### Kompetisi Gapura Hias Virtual Menyambut HUT ke-76 RI

- Peserta **Wajib Follow Sosial Media Kominfo** (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook dan Tiktok)
- Gambar gapura yang bisa dihias dan contoh, ada di highlight instagram story @kemenkominfo "17anKominfo"
- Peserta bebas berkreas dengan gambar yang sudah disediakan
- Unggah melalui instagram story milikmu
- Tag @kemenkominfo dan hashtag #17anSerudiRumah #IndonesiaTangguh #IndonesiaTumbuh
- Akun tidak di-private
- Simpan gapura hias kreasimu di highlight instagram story dengan judul cover "Gapurahias"
- Ketik "done gapura" di kolom komentar post ini jika sudah unggah story dan buat highlight

**Hadiah**

Juara 1	250.000
Juara 2	150.000
Juara 3	100.000

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA





**Sebarikan Semangat Nasionalisme Lewat VIDEO MUSIK KREATIF**

**#SAMASAMAINONESIA**  
**#BERJUANGBERKREASI**  
**#SAMASAMAINONESIA**  
**#BERJUANGBERKREASI**



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



# AYO MAINKAN!

🔍 #BerjuangBerkreasi



- Ketik **#BerjuangBerkreasi** di TikTok mu
- Kamu akan menemukan contoh video untuk berpartisipasi pada campaign ini

Nyanyikan salah satu lagu nasional versimu, atau Dunakan lagu/playlist lagu kesukaanmu dan bagikan lewat video

- Jangan lupa gunakan tagar **#BerjuangBerkreasi** pada caption videomu

Periode:  
**6 - 17 Agustus 2021**  
Pengumuman:  
**22 Agustus 2021**

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



## INI CONTOH VIDEO YANG BISA KAMU BUAT DI AKUN TIKTOK MILIKMU



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA





# INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH



# Tangguh Hadapi Pandemi, Menkominfo Ajak Warga Semarakkan Kemerdekaan Lewat RDI

Rumah Digital Indonesia merupakan wujud ekspresi dan inovasi Indonesia untuk menunjukkan semangat peringatan kemerdekaan agar tetap menyala di tengah pandemi. Sehingga, semangat kemerdekaan senantiasa terpancar dari setiap individu yang berada di berbagai pelosok tanah air.

"RDI merupakan wujud dari ketangguhan dan kecepatan Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara dalam beradaptasi terhadap keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Untuk itu, marilah kita rayakan ini secara bersama-sama dalam ruang digital sebagai manifestasi kemampuan masyarakat kita dalam beradaptasi dengan Covid-19, tetapi tetap semangat dan meriah merayakan 17 Agustus," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate ketika menjadi pembicara dalam Konferensi Pers Virtual tentang Bulan Kemerdekaan dan Rumah Digital Indonesia dari Jakarta, Jumat (30/07/2021).

Menkominfo menilai, perayaan kemerdekaan sangat penting diperingati setiap tahunnya oleh seluruh masyarakat di dalam negeri. "Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang terkandung dalam kegiatan ini sangat penting gelorakan kembali. Merayakan hari kemerdekaan kita tetap mempertahankan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme," tuturnya.

Lebih lanjut, Menkominfo memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Rumah Digital Indonesia, dalam menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. "Kominfo memberikan dukungan yang kuat pada perayaan 17 Agustus yang dilaksanakan secara digital karena ini adalah pilihan yang paling baik," ujarnya.

Mengingat banyak hal positif yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika menggunakan mengakses laman RDI, tak lupa Menteri Johnny mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam merayakan hari kemerdekaan melalui aplikasi tersebut.





la menyatakan, masyarakat dapat mengikuti berbagai hal perlombaan yang identik dengan hari kemerdekaan secara virtual, memperkenalkan daerahnya masing-masing, dan mendapatkan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan digitalisasi.

"Memberikan kesempatan kepada kita untuk meng-*explore* nusantara dari gadget dan handphone yang kita miliki. Karenanya, Rumah Digital Indonesia menjadi gagasan yang cerdas, gagasan yang luar biasa. Mengapa demikian? Ini menjadi bagian penting yang secara khusus di dalamnya tersedia ruang untuk memungkinkan kegembiraan bagi masyarakat menyongsong dan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun," ungkap Menkominfo.

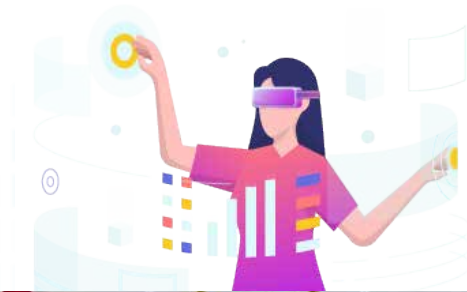
Utilisasi platform digital, kata Menkominfo, menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas Kementerian Kominfo. Menurutnya, hal itu sejalan dengan semangat untuk mendorong inovasi teknologi sebagai bagian dari solusi yang membawa manfaat bagi negeri, masyarakat dan bangsa.

"Satu tarikan nafas yang sama dalam objektif dan tugas pokok Kominfo. Oleh karena itu, Kominfo mendukung penuh kegiatan ini. RDI adalah kecepatan adaptasi kita di dalam memanfaatkan teknologi digital, merayakan hari kemerdekaan kita, tetap mempertahankan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, tetapi sekaligus tersedia ruang untuk ekspresi kegembiraan," tuturnya.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan virtual dalam Rumah Digital Indonesia berlangsung selama sebulan penuh mulai dari tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2021. Pemilihan platform digital memungkinkan untuk mengundang masyarakat secara keseluruhan dengan meminimalkan kontak fisik guna mencegah penularan Covid-19. "Dapat merayakan kegembiraan dan kekhidmatan 17 Agustus dan bulan kemerdekaan itu sendiri. Namun demikian, apabila ada kontak fisik, setiap individu diwajibkan memakai masker ganda untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sekaligus sebagai proteksi diri agar tidak tertular," tutur Menkominfo.

Menteri Johnny menegaskan inovasi dan produktivitas perlu terus ditingkatkan, khususnya di bidang digital. "Agar Indonesia semakin terkoneksi menuju Indonesia Digital, Indonesia Maju," tandasnya.

Konferensi pers yang disaksikan sekitar 8.900 pemirsa melalui kanal Youtube Kemkominfo TV dan Sekretariat Presiden itu juga menghadirkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden, Putri Tanjung.



# 7 Program Utama

Rumah Digital Indonesia merupakan kolaborasi bersama Kementerian Kominfo, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Kementerian Luar Negeri.

Acara pembukaan Rumah Digital Indonesia berlangsung pada 1 Agustus 2021 mulai pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Puncak Perayaan kemerdekaan berlangsung tanggal 16 Agustus 2021 mulai pukul 19.00 WIB. Masyarakat di seluruh Indonesia dapat menyaksikan Rumah Digital Indonesia melalui laman [rumahdigitalindonesia.id](http://rumahdigitalindonesia.id) secara gratis mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2021.

Dalam Rumah Digital Indonesia setiap pengakses dapat mengikuti event dan festival untuk memeriahkan Peringatan ke-76 Kemerdekaan Indonesia dengan tema "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh". Perayaan secara digital itu pertama kalinya dihadirkan melalui arena virtual 360 di Indonesia dengan 7 program utama.



Tampilan depan situs  
[rumahdigitalindonesia.id](http://rumahdigitalindonesia.id)



Pertama, pembukaan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dilanjutkan dengan Bincang Bangsa. Selanjutnya, di 16 Agustus 2021 ada siaran langsung Upacara Detik-detik Proklamasi, Pidato Kenegaraan, Selebrasi Kemerdekaan, dan Komedi Lokal bersama tokoh publik.

Kedua, Arena Lomba yang biasa berlangsung selama peringatan kemerdekaan. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, hingga panjat pinang secara virtual. Ketiga, Ruang Seni dan Budaya yang membuat pengunjung bisa menikmati berbagai konten kesenian dari berbagai penjuru nusantara. Seperti tarian daerah, pembacaan puisi serta syair, pertunjukan teater/drama/monolog, film pendek, hingga penampilan musik daerah maupun nasional



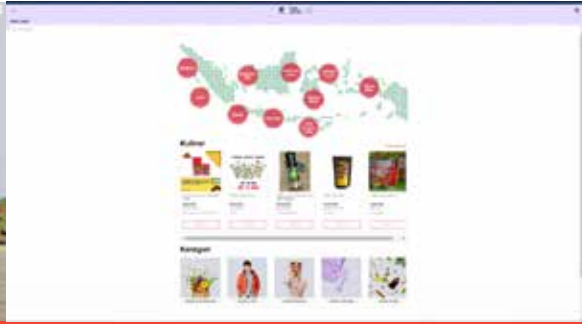
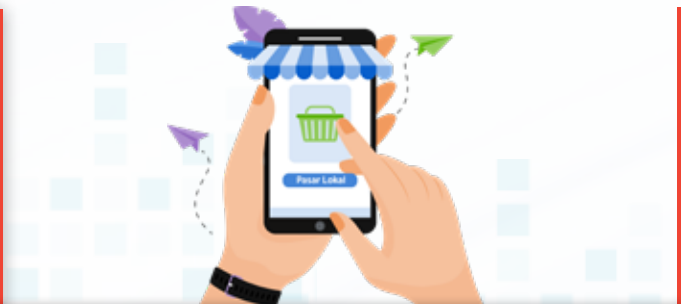
Rumah Digital Indonesia juga membuka kesempatan kepada semua warga Indonesia yang ada di dalam negeri atau luar negeri untuk ikut memeriahkan Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap hasil karya berupa video dikirimkan ke tautan [bit.ly/joinvideokreasiHUTRI76](https://bit.ly/joinvideokreasiHUTRI76) sebelum tanggal 20 Agustus 2021. Karya terpilih ditampilkan di Ruang Seni & Budaya RDI dan bisa ditonton seluruh masyarakat Indonesia.

Keempat, Ruang Komunitas yang menyediakan beragam konten perayaan unik kemerdekaan. Bahkan telah dirancang segmen 'Cerita Kemerdekaan' serta fitur filter foto Perayaan ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia serta filter Rumah Digital Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk kreasi visual.



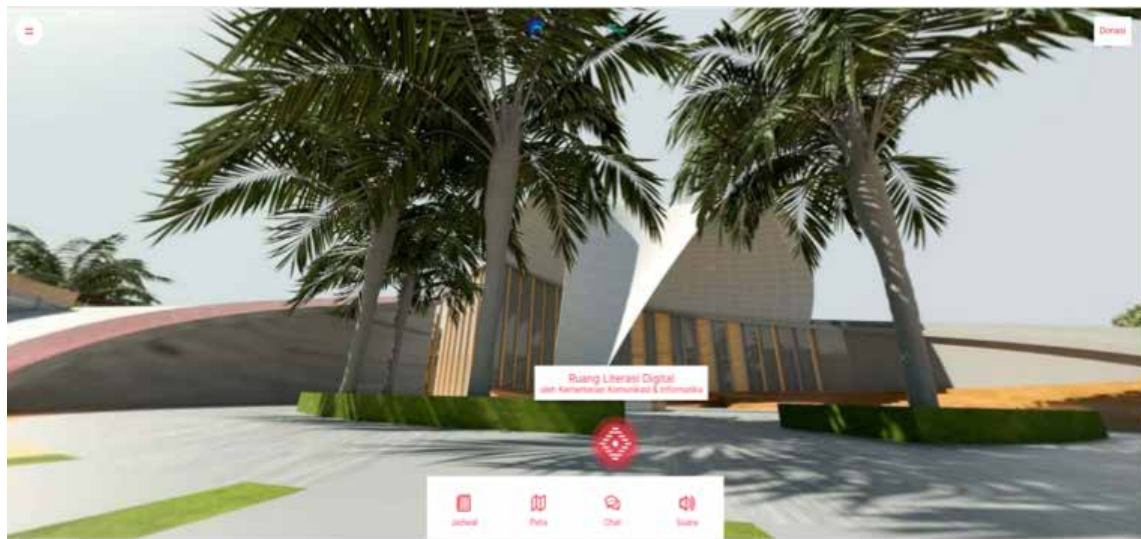


Kelima, RDI memberi kesempatan pelaku UMKM unggulan dari 34 provinsi untuk mengenalkan produk mereka kepada masyarakat melalui pasar lokal dan bazaar virtual serta terhubung dengan marketplace.



Pasar Lokal yang menjual beragam produk khas daerah dari seluruh Indonesia

Selain itu, adapula Ruang Literasi Digital yang menghadirkan berbagai konten mengenai pemanfaatan internet untuk kegiatan positif dan produktif. Lewat ruang itu diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang menyenangkan, sehat, aman dan beretika.



"Berbagai konten mengenai pemanfaatan internet akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui RDI. Di dalamnya ada program untuk melatih kecakapan digital, membangun digital *culture* masyarakat di tingkat yang paling dasar (*basic skill*), etika digital, dan kemampuan yang terkait dengan keamanan digital," papar Menkominfo.

Menteri Johnny menjelaskan, keempat program tersebut bertujuan untuk membekali masyarakat menguasai teknologi dan mengisi ruang digital dengan konten positif dan produktif.

"Jangan sampai ruang digital kita diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat karena sekarang ini banyak sekali hoaks, disinformasi, misinformasi, malinformasi, yang membuat kita sulit untuk berkembang dan bangkit memanfaatkan ruang digital," imbuhnya.

Bahkan, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyampaikan agar infrastruktur digital yang telah dibangun di seluruh tanah air dimanfaatkan dan dikuasai.

"Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun besar-besaran oleh operator seluler dan juga Kominfo di seluruh wilayah Indonesia tidak kita kuasai. Karenanya, ruang literasi digital ini juga ditujukan untuk mendorong pasar lokal UMKM menguasai ruang digital kita yang memang berhubungan langsung dengan digital onboard dari UMKM," tegas Menteri Johnny. Selanjutnya, tersedia pula Petualangan Nusantara dan Wajah Indonesia. Dalam Petualangan Nusantara pengakses bisa memanfaatkan fitur berupa peta interaktif mengenai informasi pada setiap provinsi yang meliputi destinasi wisata, kuliner khas daerah. Sementara untuk Wajah Indonesia terdapat tampilan sosok pahlawan lokal yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa dan berdampak bagi daerahnya.



"Petualangan Nusantara dan Wajah Indonesia"

Rasakan  
keseruanannya!

<https://www.rumahdigitalindonesia.id/>

Revitalisasi  
**Monumen Pers**  
Sebagai Refleksi Perjalanan

---

20 Tahun  
Kementerian Kominfo

---

Oleh: **Widodo Hastjaryo**

Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta

Buku Setiap Hari (Senin - Minggu)  
Jam 08:00 - 16:00 WIB

Monumen Pers  
Museum Pers  
Perwakilan  
Surabaya



**Monumen Pers Nasional Surakarta** tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya perjuangan pers nasional. Gedung Monumen Pers Nasional dahulu bernama *Societeit Sasana Suka Mangkunegaran*, yang dibangun tahun 1918 oleh Arsitek Pribumi Abukasan Atmodirono atas prakarsa Mangkunegaran VII, sebagai balai pertemuan dan perkumpulan masyarakat. Pangeran Mangkunegaran VII di era itu telah memikirkan pentingnya ruang publik yang pada saat itu sebagai kemewahan bagi masyarakat kota Surakarta.



Gedung ini merupakan tempat Rapat/Deklarasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Pribumi Pertama (SRV) pada tanggal 1 April 1933. Dalam rapat yang diselenggarakan di gedung *Societeit Mangkoenegaran* (sekarang Monumen Pers Nasional), disepakati pendirian sebuah lembaga penyiaran radio profesional pertama di Kota Solo bernama *Solosche Radio Vereeniging* (SRV), dengan mengangkat Ir. Sarsito Mangunkusumo sebagai Ketua SRV.

SRV merupakan Radio Ketimuran yang dikelola oleh bangsa Indonesia dan berorientasi pada pengembangan kesenian dan budaya tradisional. Siaran SRV tidak terbatas hanya klenengan saja, melainkan acara budaya



lainnya seperti lakon wayang, orkes gambus dan keroncong, lagu-lagu daerah Sunda dan Bali, lagu Arab dan Jepang, hingga musik dan lagu modern. Kebijakan siaran SRV kemudian dijadikan sebagai garis kebijakan siaran Radio Ketimuran lainnya, yaitu komitmen isi siaran harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi budaya dan kesenian Timur.

Pada tahun 1934, gedung ini juga pernah digunakan untuk Kongres Bumiputera. Kemudian pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942-1945 sempat digunakan sebagai balai klinik pengobatan bagi tentara Jepang yang sakit.

Pada tanggal 9 Februari 1946, Gedung Societeit ini dijadikan sebagai tempat Kongres Wartawan se-Indonesia dan melahirkan asosiasi profesi wartawan pertama, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tanggal 9 Februari kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Gedung ini juga pernah dimanfaatkan sebagai Kantor Palang Merah Indonesia cabang Surakarta.



Secara resmi nama Museum Pers Nasional ditetapkan pada tahun 1971 saat kongres PWI ke-25 di Tretes Jawa Timur. Dengan berdirinya Museum Pers Nasional sebagai Yayasan, maka pengelolaan dokumen, arsip, artefak pers dan koran-koran kuno, dengan demikian telah terwadahi. Tokoh-tokoh pers seperti Rosihan Anwar, BM Diah dan S Tahsin memiliki andil besar bagi terbentuk dan berdirinya Museum Pers Nasional.

Kemudian pada tahun 1977 dilakukan pemugaran bangunan di lingkungan Museum Pers Nasional, di mana Ketua PWI saat itu Harmoko dan Ali Murtopo sebagai Menteri Penerangan. Lalu pada tahun 1978 tepatnya tanggal 9 Februari, Museum Pers Nasional berganti nama menjadi Monumen Pers Nasional, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu Monumen Pers Nasional dibuka untuk masyarakat umum dan memamerkan Sejarah Pers Indonesia.



Sudut Koleksi, Patung dan Diorama sebelum Revitalisasi Monumen Pers



Ruang Koleksi, Patung dan Diorama setelah Revitalisasi



Usianya yang sudah lebih dari 100 tahun membuat Monumen Pers Nasional dikukuhkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 210/M/2015, yang ditetapkan di Jakarta 24 September 2018 oleh Mendikbud saat itu, Prof Dr. Muhadjir Effendy.

Monumen Pers Nasional Surakarta merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai tugas melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional bernilai sejarah.

Oleh sebab itu Monumen Pers Nasional memperlihatkan adanya persinggahan-persinggahan penting, baik budaya, sosial

ataupun pemerintahan. Banyak peristiwa telah terjadi di Monumen Pers Nasional yang melibatkan tokoh-tokoh antara lain Presiden RI, Menteri, Dirjen, Rektor suatu Universitas, Gubernur, Walikota, Bupati, budayawan, para jurnalis, mahasiswa, pelajar hingga komunitas-komunitas lainnya. Monumen Pers Nasional tetap menyajikan papan baca bagi masyarakat di tengah era yang serba digital ini. Setiap hari Monumen Pers Nasional memasang surat kabar yang terbit secara nasional dan lokal di papan baca tersebut. Kenapa demikian? Ini merupakan perwujudan kedekatan kultural yang selama ini telah terbangun puluhan tahun lamanya.

Refleksi terhadap keberadaan Monumen Pers Nasional ini menjadi penting dan mengharukan, ketika hal ini dipantulkan kepada Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76 dan Perjalanan 20

tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Tidak mungkin suatu bangsa dapat menyadari eksistensinya dan hendak kemana jika tidak disadarkan melalui komunikasi dan informasi. Jejak dan artefak komunikasi yang memperlihatkan begitu penting informasi dan komunikasi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat ditelusuri dari dokumen-dokumen pers yang ada. Benar yang dikatakan seorang ilmuwan komunikasi Michel Foucault bahwa information is power. Selamat HUT RI ke-76 dan Selamat HUT Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ke-20. MERDEKA...

**Widodo Hastjaryo**



# Sekilas Sejarah Organisasi Pemancar Radio di Surakarta



Sumber Foto: Surakarta.go.id

Pada tahun 1925, Mangkoenegoro VII, penggagas berdirinya *Societeit Mangkoenegar* (sekarang Monumen Pers Nasional), mewujudkan upaya pelestarian kesenian tradisional melalui teknologi penyiaran radio. Penguasa Pura Mangkoenegar (1916-1944) tersebut memang dikenal multitalenta dengan predikat sebagai raja yang modern dan nasionalis, sekaligus sastrawan, seniman, serta budayawan intelektual. Tak heran jika beliau banyak mengeluarkan gagasan modern dalam kebijakannya terkait kesenian dan kebudayaan tradisional.

Awalnya Mangkoenegoro VII membina perkumpulan kesenian Jawa bernama *Javansche Kunstkring Mardiraras Mangkunegaran*. Kegiatan utama perkumpulan ini adalah bidang seni karawitan, yakni memainkan alat musik (gamelan) serta melantunkan gending-gending (nyanyian) Jawa, atau lebih populer dengan sebutan Klenengan. Semua itu dilakukan di lingkungan istana Mangkunegaran.

Setelah menerima pemancar radio tua pemberian Mangkoenegoro VII, perkumpulan *Javansche Kuntskring Mardiraras* kemudian menyiarkan klenengan (gending-gending Jawa) dan lakon wayang melalui siaran radio menggunakan call sign PK2MN atau yang dikenal masyarakat sebagai Pemancar Kring Ketimuran Mangkunegaran.

Seiring berjalannya waktu, pemancar tersebut tidak dipergunakan lagi karena sudah rusak dan kualitas audionya tidak maksimal. Setelah dianalisa oleh RM Ir. Sarsito Mangunkusumo, beliau berpendapat bahwa meskipun dilakukan perbaikan, peralatan itu tetap tidak akan berfungsi maksimal. Biaya yang dikeluarkan juga tidak akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu diputuskan untuk membeli peralatan yang baru. Agar tercukupi

dana pembelian peralatan baru, RM Sarsito mengusulkan untuk melibatkan pihak di luar perkumpulan *Javansche Kuntskring Mardiraras*.

Usulan RM Sarsito tersebut diterima oleh perkumpulan, dan pada hari Jumat, 1 April 1933 bertempat di gedung *Societeit Mangkoenegar* yang dihadiri oleh 9 orang perkumpulan berhasil menyepakati berdirinya Perhimpunan Radio Ketimuran, yang diberi nama *Solosche Radio Vereeniging (SRV)*, artinya Perkumpulan Radio Solo.



## SRV menjadi saksi sejarah dunia penyiaran dan perjuangan

Siaran perdana SRV pada saat itu berupa klenengan yang disajikan oleh *Javansche Kuntskring Mardiraras* yang dipancarkan hingga ke Belanda. Menurut telegram dari Belanda, siaran dapat diterima dengan baik serta dapat didengar di Eropa. Sejak saat itu SRV mengalami perkembangan yang sangat pesat dan anggotanya pun terus bertambah.

Setelah berhasil "menguasai angkasa" Solo dan sekitarnya dengan siaran seni budaya Jawa, SRV memperluas jangkauan siaran dengan mendirikan cabang di kota lain. Cabang pertama yang dibuka adalah Jakarta pada tanggal 8 April 1934, yakni SRV Kring cabang Betawi. Pada 30 April 1934 disusul pembentukan SRV Kring Bandung. Setelah itu disusul pula pembentukan SRV cabang Surabaya, serta pada tahun 1936 SRV Kring Madiun dibentuk dengan sebutan EMRO (*Eerste Madiunsche Radio Omreop*). Sementara di kota Semarang, SRV Kring berfungsi sebagai stasiun relay untuk wilayah Semarang, sampai pada akhirnya menjadi Radio Semarang pada tahun 1936. Adapun cabang terakhir yang didirikan SRV berada di Bogor.

Pada tanggal 15 Januari 1935 SRV mengadakan kongres di Solo. Salah satu keputusan pentingnya adalah SRV harus memiliki gedung studio sendiri yang memadai untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran. Untuk keperluan pembangunan gedung studio ini, Mangkoenegoro VII menghibahkan tanah seluas 5.000 meter persegi, terletak di kampung Kestalan, atau sebelah selatan stasiun kereta api Balapan Solo.

Setelah menempati gedung studio yang baru dan megah, para pengurus SRV kian semangat dalam mengelola siaran. Hal ini berdampak terhadap perkembangan seni budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Siaran radio yang sudah berjalan bertahun-tahun terpaksa berhenti sebentar dan mengalami hambatan

karena kedatangan penjajah Jepang. Sebelum Jepang masuk lewat Gundi dan menerobos Kalijambe, Kalioso, hingga kota Solo pada Maret 1942, Belanda sudah memberi perintah untuk merusak objek-objek penting, termasuk pemancar radio SRV. Kecerdikan Oetoyo dan Soegoto berhasil menyelamatkan mesin pemancar. Kepada Belanda mereka beralasan memang sudah dirusak, tetapi sebenarnya hanya dilepas meteran dan alat-alat kecil lainnya. Mungkin Belanda terlalu terburu-buru sehingga tidak meneliti lagi.

Tiga hari setelah sampai di Solo, komandan pasukan Jepang H. Funabiki mendarat di studio SRV. Di studio itu Funabiki bertemu dengan R. Maladi, dan memerintahkan untuk menghidupkan kembali pemancar dan melakukan siaran. Maladi dan kawan-kawan menyanggupi permintaan Funabiki, sehingga dalam beberapa hari SRV sudah kembali mengudara.

Untuk mempermudah pengorganisasian dan pengendalian radio siaran, Jepang membentuk Hosyo Kanry Kyoku (HKK) di tingkat pusat (Jakarta) dengan cabang-cabangnya di berbagai kota seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta (Solo), Surabaya, Purwokerto, hingga Malang.

Hosyo Kanry Kyoku membentuk badan pengawas radio di setiap kota kabupaten yang disebut Shidanso dan bertugas mempersatukan seluruh bengkel reparasi radio setempat. Semua perbaikan dan pemeriksaan pesawat radio penerima milik masyarakat dilakukan di satu tempat dan langsung diawasi secara ketat oleh seksi propaganda pemerintah militer Jepang. Selain itu Shidanso juga melakukan penyegelan terhadap gelombang/frekuensi siaran radio luar negeri dan membangun radio untuk umum di tempat-tempat pusat keramaian orang. Dengan peraturan tersebut, seluruh pemilik pesawat radio penerima hanya mendengarkan siaran yang dipancarkan oleh HKK.

Dapat disimpulkan bahwa pada era pemerintahan militer Jepang, radio dijadikan alat propaganda sekaligus pengendalian massa. Kesadaran publik dikendalikan dan di kontrol untuk membentuk opini tunggal. Seiring berjalannya waktu, dengan diperolehnya informasi tentang kekalahan Jepang dalam menghadapi Sekutu, maka orang-orang Indonesia yang bekerja di HKK secara diam-diam melakukan konsolidasi untuk mengantisipasi jikalau Jepang segera meninggalkan Indonesia.

Oleh karena itu, ketika Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), penyiar HKK di Jakarta segera menyebarluaskan peristiwa monumental tersebut. Setelah merdeka, penyempurnaan Radio Indonesia kemudian resmi dibentuk pada tanggal 11 September, yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia (RRI).

Perjuangan Radio Indonesia tidak sebatas pada menyebarluaskan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI, namun juga ikut perjuangan fisik sampai ke wilayah pegunungan. Hal tersebut terjadi ketika Belanda kembali ingin merebut Indonesia pada Agresi Militer I dan II.

Pemancar Radio PTP Goni di Delanggu dibom oleh Belanda, sehingga Bapak R. Maladi yang saat itu menjabat sebagai Kepala RRI Surakarta memerintahkan untuk memindahkan pemancarnya. Pemancar radio yang memiliki kekuatan 1 kilowatt tersebut diangkut dengan truk Chevrolet tua, di usung menuju Tawangmangu - Karanganyar.

Di desa Punthuk Rejo, pemancar terpaksa disimpan dan ditutupi dedaunan karena truk pengangkut tidak dapat melanjutkan perjalanan. Akhirnya dipilih lokasi yang tepat yaitu di desa Balong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Perjalanan menuju desa Balong membutuhkan waktu 4 hari karena proses pemindahan hanya dapat dilakukan malam hari.

Di desa Balong tersebut akhirnya RRI dapat melanjutkan siaran, meski terkadang di sela-sela siaran terdengar suara kambing mengembik karena pemancar disembunyikan di rumah penduduk yang berdekatan dengan kandang kambing. Sebagian masyarakat kemudian menyebut pemancar ini Pemancar Radio RRI Kambing dan sebagian lainnya memberi nama Kyai Balong.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda ke II, pemancar tersebut dibawa kembali ke Solo dan disimpan di gedung Societeit Mangkoenegaran yang saat ini digunakan oleh Monumen Pers Nasional. Perjalanan panjang sebuah pemancar tersebut, lika-liku dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur berita yang langsung dapat diterima oleh masyarakat luas. Untuk itu sudah sepantasnya jika pemancar siaran radio bersejarah ini menjadi Koleksi Utama bagi Monumen Pers Nasional Surakarta.

**(Eka Budiati)**







# Semarak

# 70<sup>TH</sup>

## RI Tim LG

Inspirasi dari  
Resiliensi Tokyo







## Merah putih berkibar megah gagah di udara Gorontalo,

berdiri tegak di ketinggian menara-menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai titik kota hingga di pelosok-pelosok desa. Suka cita kemerdekaan memang tak mengenal batas kota dan desa, semua bahagia dengan caranya masing-masing; sebab kemerdekaan memang warisan agung yang harus terus disyukuri, dijaga, diisi seluruh putra-putri negeri.

Merah putih berkibar megah gagah di udara Gorontalo, berdiri tegak di ketinggian menara-menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai titik kota hingga di pelosok-pelosok desa. Suka cita kemerdekaan memang tak mengenal batas kota dan desa, semua bahagia dengan caranya masing-masing; sebab kemerdekaan memang warisan agung yang harus terus disyukuri, dijaga, diisi seluruh putra-putri negeri.

Rangkaian Semarak Agustusan di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Gorontalo (Tim LG) diselenggarakan dalam 'form' terkendali. Tim yang seluruhnya sudah terbiasa dengan adaptasi

kebiasaan baru tak kesulitan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan protokol kesehatan. Kapasitas testing reguler yang memadai mempertebal keyakinan untuk dapat menyelenggarakan event-event terbatas yang aman.

Demikianlah resiliensi olahraga, pelajaran yang datang dari gelaran akbar Olimpiade yang baru saja sukses diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Juga dari beberapa turnamen elit lainnya, sebut saja *Grand Slam Asia Pasifik* di Australia, *Clay Court Season French Open* di Paris, *Grass Season Wimbledon* di London Inggris, hingga kejuaraan sepak bola Piala Eropa, Euro 2021. Asal diselenggarakan dalam gelembung terbatas yang aman,

pandemi memang bukan halangan untuk tetap kreatif berkreasi, berolahraga. Justru ia menguatkan imunitas.

Inilah beberapa rangkaian yang digelar Tim LG dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, di sela waktu bekerja produktif sehari-hari, seperti olahraga di Jumat pagi atau bahkan terkadang pada Kamis sore setelah jam kerja usai, mulai dari ketangkasan olahraga, fun games, hingga lomba pidato.



## Opening Ceremony

Untuk meningkatkan antusiasme dan engagement, tim tampil dengan kostum pakaian yang mencerminkan identitas daerah maupun idola pahlawan nasional masing-masing; mulai dari Jenderal Sudirman, Pattimura, Sultan Hasanuddin, hingga Nani Wartabone sang pahlawan nasional dan tokoh perjuangan dari Gorontalo. Empat tim berlaga penuh semangat di semua cabang sedari *kick off*.



## Olahraga Kebanggaan Publik Gorontalo

Masih ingat final olahraga cabang sepak takraw nomor *quadrant* putra Asian Games 2018 Indonesia versus Jepang? Seru, menegangkan, *happy ending*. Indonesia mengenakan perolehan medali emasnya menjadi 31 keping dengan satu tambahan dari cabang ini waktu itu. Medali emas pertama dari cabang sepak takraw sejak dipertandingkan di AG 1990.

Adalah Rizky A.R. Pago, Abd. Halim Radjiu, dkk., putra-putra Gorontalo atlet kebanggaan tanah air kala itu yang melengkapi prestasi mengagumkan kontingen Merah Putih. Pantaslah olahraga ini begitu digemari

di sini. Ke manapun berkeliling, mudah bagi saya melihat penduduk lokal memainkannya di depan rumah, di lapangan rumput, atau lahan-lahan kosong lainnya. Nah, karena olahraga ini favorit, sudah pasti kompetisinya ramai, sengit dan panas di partai final dua hari menjelang puncak perayaan Agustusan; Hasanuddin versus Pattimura.



Pasti masih segar dalam ingatan momen ketika Greysia Polii & Apriyani Rahayu, dua atlet bulu tangkis kebanggan tanah air yang telah berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium tertinggi di Tokyo, membuat haru biru dan bangga seantero negeri. Merayakan momentum membanggakan ini, Tim LG tak ketinggalan turut memainkan pertandingan bulu tangkis dalam Semarak Agustusan, selain tentu saja karena olahraga ini memang favorit anak-anak, Tim LG, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## Cabang Andalan Penyumbang Medali Emas di Olimpiade



## Olahraga Dinamis Anak Muda

Kenyataannya yang tua pun tak ingin ketinggalan, meski setelahnya harus nyeri sendi parah dan butuh vitamin D 5000 IU, hehe. Futsal. Pattimura versus Sudirman, laga panas menguras energi.





## Fun Games, Tenis Meja & Refarming Frekuensi 2,3 GHz

Lomba paling seru yang membuat semua bersemangat jadi ranking satu. Tebak kata, tebak tokoh, pengetahuan umum populer, hingga tebak film dan musik. Kategori ini mengadopsi serial *games show* di layar kaca, dibuat oleh tim kreatif Pradikta cs. Lomba dimenangkan oleh Tim Hasanuddin, yang disusul kelompok pahlawan nasional Gorontalo Nani Wartabone dan Sudirman.

Untuk pertandingan tenis meja, seperti dulu awalnya pertama kali dimainkan dalam ruang sebagai olahraga alternatif *indoor* musim dingin di Inggris tahun 1880-an. Begitu pula dalam kegiatan Semarak Agustusan kali ini, pertandingan digelar di ruang *meeting*; heroik karena menjadi *first gold medal contest*. Tak berharap *rubber game* di partai – partai penyisihan sore itu sebab salah satu atlet andalan terjadwal untuk melakukan agenda prioritas nasional, *refarming frekuensi 2,3 GHz*.



## Lomba Pidato Indonesia Digital

Juaranya Atiya Hadju, ia tampil memukau dengan kekayaan data *roadmap* dan capaian tahapan Indonesia Digital, dari SPBE hingga sektor industri, dunia usaha, UMKM. Atin yang sehari-hari *in charge* sebagai tenaga CS tampil *beyond expectation*, sikap percaya dirinya meyakinkan. Ada juga 'Prabowo', Irfan L yang lantang menggugah, serta *host* berpengalaman Ratna K. Anak-anak muda keren...



## Warna-Warni Indonesia di Upacara Virtual nan Khidmat

Acara utama paling ditunggu tentu adalah puncak perayaan 76 tahun Indonesia Merdeka. Selain karena gegap gempita dan khidmatnya, nasionalisme yang membuncah, juga karena semua tim akan tampil menawan dengan warna-warni Indonesia.

Menggunakan baju adat nusantara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Upacara virtual *live* ke Istana Merdeka Jakarta dengan fasilitas *Zoom Meeting* Biro Humas Setjen Kemenkominfo. Meski virtual namun tetap terasa sakral, begitu haru di momen lagu Syukur ciptaan Husein Mutahar; dan penuh gelora semangat begitu lagu Maju Tak Gentar dimainkan. Tak terasa tiga puluhan peserta upacara di Karawo Room UPT Mon SFR Gorontalo mengepal-ngepalkan tangannya ke udara; Maju Tak Gentar, Membela yang Benar!





...Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah menang.  
Terima kasih Pak C. Simanjuntak, terima para pahlawan, syuhada  
bangsa kami.

Semarak Agustusan dari Hulondalo, Gorontalo ini adalah bagian  
besar dari *Capacity Development Series* yang akan terus berjalan  
sepanjang tahun.

Seluruh rangkaian ditutup dengan suka cita, pesan dan doa  
pamungkas dari Top Management #MC175, "Cintai terus negerimu,  
tempat kita lahir dan kembali; semoga Allah curahkan keberkahan,  
kemakmuran, kesejahteraan, kebajikan dan cinta, untuk kita semua  
di tanah ini, INDONESIA. Pandemi menguji semua pilar kehidupan  
kita, namun bersamaan juga mengasah semua pilar kekuatan.  
Mari jadikan pijakan gerak akselerasi inovasi dan resiliensi. Jadilah  
berarti, jadilah bagian dari solusi".

**DIRGAHAYU REPUBLIK...**  
**Salam tangguh dan terus tumbuh, MERDEKA !!!**





**SELAMAT ATAS PELANTIKAN**

**Usman Kansong, S.Sos, M.Si**

**Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik  
Kementerian Kominfo**





# OTW MERDEKA

OTW KAYA. Begitulah teks yang disablon pada sebuah kaos yang dijual sebagai *merchandise* seorang *content creator* yang sedang naik daun. Dia *emang* sedang banyak senyum, bersyukur hidupnya yang mulai terbebas dari belenggu kemiskinan dan, *boom*, sedang meroket taraf kesejahteraannya. Penggemarnya pun mengidolakan dan mengidentikkan diri dengan sang OTW KAYA, yang memang terbukti merupakan pejuang tangguh dalam hal keluar dari jurang kemiskinan. Bit-bit kemiskinan dan kisah-kisah kocak kenikmatan dalam mencicipi geyuran rezeki berlimpah untuk pertama menjadi personanya dalam industri *entertainment*. Yang laku dijual.

Ya, kisah tentang kemiskinan yang diramu dengan bumbu lawak, plus cerita kocak bin norak tentang bagaimana rasanya menjadi kaya pun ternyata laku dijual. Segera saja stasiun televisi menyambarnya dengan membuatkan program yang tayang di jam-jam utama. Banyak juga yang nonton. Kalah dah sinetron.

Banyak sosok lain yang ketiban sampur ketajiran melalui dunia baru media, terutama media sosial. Selain dengan perjuangan keras, merangkak dari bawah sekali, seperti contoh sosok kita tersebut yang memulai dengan menjadi penonton bayaran, banyak pula sosok lain yang terorbit secara instan.

Ada yang mulai dari sekadar menyampaikan unek-unek di media sosial mereka. Bahkan unek-unek kepada suami yang tidak pernah ngajak pergi-pergi keluar nyari angin pun sudah mampu menjadi viral dan melambungkan seseorang menjadi artis. Tentu saja juga harus ditopang dengan kemampuan menghibur *beneran*. Dengan ditunjang kemampuan sebagai entertainer, doa, dan cita-citanya, maka unek-unek kepada suami untuk sekadar diajak ke "alpamaret" pun cukup mendobrak tembok tebal yang menghalangi wahyu keartisannya.

*Idi ying mimilii dingin kinyinyirin.* Ada yang mulai dengan kinyinyiran. Baik menyinyiri pemerintah, menyinyiri oposisi, atau menyinyiri masyarakat. Ada yang disampaikan dengan kocak, namun ada pula yang disampaikan dengan kebencian. Dengan nyinyir, suatu konten cepat viral. *Subscriber* atau *follower* makin banyak. AdSense dari Youtube menggelembung. Cukup beberapa detik nyinyir atau bicara sambil memonyongkan bibir. Biasanya ada pihak korban. Ah tapi persetan. Yang penting cuan, cuan, cuan.

Ada juga yang bermotif menancapkan pengaruh di dunia maya. Mereka yang tersisih dari posisi nyaman di kekuasaan berkecenderungan untuk membawa ketidakpuasan ke media sosial untuk menggalang pengaruh. Mereka menggunakan *best practice* yang berlaku di dunia maya, pakem-pakem media sosial, melebur dengan pergaulan kaum millennial dan bocil di dunia tersebut, untuk sekadar mendapatkan tambahan pengintil di kanalnya.

Bahkan masyarakat pun tak kalah gaya. Mereka kini selalu siap siaga menggenggam ponsel untuk bergegas mengambil gambar atau video untuk peristiwa-peristiwa yang mereka anggap merugikan mereka. Cekrek, kamera nyala. Ancaman pun menggema: Jangan macam-macam ya! Awas saya viralkan!

Dunia maya menawarkan ruang baru yang saat ini masih relatif bebas hampir mutlak. Kata-kata kasar dan ekspresi tak senonoh di dunia "tradisional" dapat dihamburkan di dunia maya. Dunia maya masih bak "terra nullius", tanah tak bertuan, yang bisa dieksplorasi sepuasnya tanpa aturan dan kepemilikan. Ya, meski sudah banyak yang terbukti bisa dididuk melalui penegakan aturan, namun toh lebih banyak yang tak mau aware, tak peduli akan hal itu. Umumnya, setelah mereka menjadi korban perundungan di dunia maya, barulah mereka merasa harus menuntut dengan aturan yang ada. Mendadak menjadi pendukung UU ITE, misalnya. Padahal dulu sok "keminter" anti-antian.

Bagi sebagian orang, dunia maya dianggap menawarkan berkah kemerdekaan seutuhnya. Jauh lebih bebas dibanding dunia "nyata" yang penuh tanggung jawab, adab, dan aturan. Hijrah ke dunia maya, mereka merasa "OTW merdeka". (Istilah OTW atau "on the way" sendiri sebenarnya merupakan "penerabasan" aturan baku tentang penyerapan istilah. OTW saat ini secara serampangan digunakan pada percakapan-percakapan non-formal untuk menjadi padanan dari kata "menuju" dalam artian "perjalanan fisik menuju ke tujuan", dan digunakan untuk semua hal yang belum tentu artinya fisik)

Sikap-sikap mereka yang melarikan diri ke ruang digital atau dunia maya untuk mengekspresikan diri sebebas-bebasnya tersebut justru bisa menjadi ironis jika mereka tidak mau menerima aturan bahwa tanggung jawab dan ikatan yang berlaku di dunia maya tersebut hakikatnya berlaku juga di dunia maya. Sayangnya, sebagian besar mereka umumnya begitu. Mau enaknyanya sendiri tapi tak mau bertanggung jawab. Dicokok, nangis. Minta materai. Merengek mengemis damai.

Dalam pengertian mereka-mereka yang tak utuh seperti itu, dunia maya justru malah bisa jadi area penindasan atau penjajahan baru. Ada yang "hanya" menindas orang secara verbal. Korbannya tetangga atau kawan sendiri. Ada yang cuiten isengnya mematikan bisnis orang. Ada yang menyerang, misalnya, pemerintah, dengan penggalangan opini dan penghasutan. Ada yang membunuh karakter dengan memelintir, memotong, *mem-framing*, pernyataan seseorang hingga berbeda makna atau lepas konteks. Ada yang motifnya iseng pengen ngelawak. Ada yang mendapat keuntungan darinya.

Media sosial bisa menjadi ruang baru yang memberi ruang yang sepenuhnya bebas merdeka. Menjadi hadiah bagi mereka yang mendambakan kebebasan seluas-luasnya. Yang justru memberi potensi bagi mereka untuk menjadi penguasa baru dan mendefinisikan kemerdekaan ruang tersebut dengan definisi ala mereka sendiri. Dan ujung-ujungnya justru menjadi penindas baru.\*\*\*



Oleh: FX Bambang Irawan  
Redaktur KominfoNext



## Menkominfo Ajak Ekspresikan Kemerdekaan Lewat Rumah Digital Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak warga Indonesia mengekspresikan diri pada Peringatan Kemerdekaan ke-76 Tahun Republik Indonesia melalui aplikasi Rumah Digital Indonesia. Melalui aplikasi itu, Menteri Johnny mengharapkan setiap kegiatan yang identik dengan perayaan hari kemerdekaan dilakukan secara virtual.

"Rumah digital ini wujud dari suatu ekspresi yang menunjukkan semangat kita di peringatan bulan kemerdekaan. Sehingga, semangat kemerdekaan senantiasa terpancar dari setiap individu yang berada di berbagai pelosok tanah air," ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Rumah Digital Indonesia dari Jakarta, Jumat (30/07/2021).

## Jelajahi Museum di Tengah Pandemi, Kominfo Ajak Masyarakat Virtual Tourism

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan penggunaan media sosial dinilai dapat meningkatkan minat berwisata secara virtual di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika; Septiana Tangkary.

"Virtual tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi, agar dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia. Pengguna media sosial di masa pandemi ini juga dapat dijadikan sebagai momentum, membangun komunikasi maupun meningkatkan engagement yang baik antara pengelola destinasi dengan pengikut ataupun calon wisatawan," ujarnya dalam webinar Peran Museum di Industri Pariwisata, dari Jakarta, Sabtu (07/08/2021).





## Sambut Presidensi G20 Tahun 2022, Menkominfo: Indonesia Agendakan Tiga Prioritas



Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan tiga isu prioritas dalam Presidensi G20 tahun 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan ketiga isu tersebut juga telah menjadi bagian diskusi dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital Tahun 2021 dan akan dilanjutkan tahun depan.



"Indonesia menyampaikan tiga isu prioritas bidang digital dalam Presidensi G20 tahun 2022, yaitu: pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan konektivitas; literasi digital dan kecakapan digital; dan arus data lintas negara (cross-border data flow)," jelasnya usai mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis (05/08/2021).

## Lebih dari 50 ribu Warganet Ikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi Virtual di Medsos Kominfo

Lebih dari 50 ribu warganet dan civitas Kementerian Komunikasi dan Informatika mengikuti secara virtual Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 yang digelar dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/08/2021). Berdasarkan pantauan, lebih dari 45 ribu warganet mengakses akun TikTok @kemkominfo, sementara yang menyaksikan dari akun Youtube @kemkominfoTV lebih dari 6.000 warganet. Sedangkan untuk akun zoom, para peserta didominasi civitas Kementerian Kominfo yang mencapai sebanyak 1.000 peserta daring,

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warganet dan mengucapkan selamat ulang tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. "Terima kasih untuk semua rakyat Indonesia, pegawai dan ASN Kominfo. Dirgahayu Indonesia, sekali lagi Dirgahayu Indonesia selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021," ucapnya usai mengikuti Peringatan Detik-Detik Proklamasi secara virtual dari press room Kementerian Kominfo.





## Groundbreaking Stasiun Bumi SATRIA-I, Menkominfo: Momentum Hadirkan Konektivitas Digital

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-I sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung konektivitas digital untuk kemajuan bangsa. Menurut Menkominfo, groundbreaking stasiun bumi satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-I menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital untuk menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok nusantara.

"Hari ini, kita menorehkan tonggak bersejarah bangsa dengan bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama atau groundbreaking Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi, yang kita kenal sebagai Satelit Republik Indonesia (SATRIA)," jelasnya dalam Groundbreaking Ceremony Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah, di Gedung PSN, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/08/2021).

## Sektor Pos Bertumbuh, Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota POC

Pemerintah Indonesia menyiapkan solusi lintas sektoral untuk mendorong pertumbuhan layanan pos nasional dan global. Dalam Kongres ke-27 Indonesia meminta dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Postal Operations Council (POC). Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Ismail menyatakan, sejak awal pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan layanan pos.

"Salah satu solusi lintas sektoral yang penting, juga sebagai penggerak rantai pasokan pos global, adalah transformasi digital dan adopsi teknologi digital. Saya pikir kita setuju bahwa transformasi digital telah mempercepat rantai pasokan pos global, dan meningkatkan kepuasan, pengalaman, dan kepercayaan pelanggan pada layanan pos global," ujarnya dalam Sesi Ketiga Diskusi Universal Postal Congress 2021, dari Jakarta, Rabu (11/08/2021).





## Tiga Operator Buka Layanan 5G, Menkominfo: Pemerintah Siapkan TKDN 5G



Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan Pemerintah akan menyiapkan pengembangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 5G dan meminta pabrikan untuk mengaktifkan perangkat lunak agar ponsel 5G bisa mengakses jaringan 5G. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan saat ini telah terdapat dua operator seluler yang menyediakan layanan komersial 5G, yaitu PT Telkomsel yang mulai beroperasi 27 Mei 2021 dan PT Indosat Tbk yang beroperasi pada 7 Juni 2021.

"Hari ini, kita bersama menyambut keikutsertaan PT XL Axiata Tbk yang baru saja mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Layanan 5G pada 6 Agustus 2021 beberapa hari yang lalu. Setelah pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) pada 3 sampai 5 Agustus 2021 di area Jalan Margonda, Kota Depok. Satu hari selesai uji laik operasi diterbitkan SKLO," jelasnya dalam Konferensi Pers Virtual Hasil Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 5G Berbasis Teknologi IMT-2020 di Pita Frekuensi 1800 MHz PT XL Axiata, Tbk dari Jakarta, Kamis (12/08/2021).

## Gandeng 4 PT Terbaik Dunia, Kominfo Buka Program DLA Mulai Hari Ini

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pendaftaran Program Digital Leadership Academy (DLA). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, pelatihan itu bekerja sama dengan empat perguruan tinggi bertaraf internasional untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.

"(Program DLA) ini sudah dibuka dan dilaksanakan secara daring, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengikuti Digital Leadership Academy karena kita langsung bekerjasama dengan universitas dari luar negeri," ujarnya dalam Webinar Indonesia 4.0 Conference dan Expo 2021 Virtual Edition, dari Jakarta, Kamis (19/08/2021).

Partner University	Training Topic	Duration
National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy	Digital Transformation: Smart City	Week 1: 13 Sep - 15 October 2021 (8:00-17:00 WIB) / Week 2: 17 Sep - 19 October 2021 (8:00-17:00 WIB)
Tsinghua University, School of Public Policy and Management	Digital Transformation: Digital Business	21 October - 6 November 2021
University of Oxford, Oxford Internet Institute	Digital Transformation: Policy and Practice	Publication Practice Seminar November 2021 (Virtual seminar event)
Harvard University, Harvard Kennedy School	Digital Transformation in Government: Investing Public Policy and Services	15-16 November 2021



## Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Pelindungan Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menjaga ruang digital tetap kondusif terutama dalam sektor keuangan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan mendorong masyarakat waspada dengan mengenali modus pelaku penipuan online serta membiasakan diri melindungi data pribadi.

"Kominfo meminta masyarakat untuk mewaspadaai ragam modus penipuan online yang biasanya terjadi di ruang digital, seperti phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering," ujarnya dalam Webinar Beritasatu "Mewaspadaai Jeratan Pinjaman Online Ilegal" dari Jakarta, Kamis (19/08/2021).



## Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Kominfo Gandeng Pemerintah Daerah



Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika; Usman Kansong menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi. Namun, demikian masih perlu ditingkatkan melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah.

"Kalau kita lihat ya publik trust masyarakat kepada pemerintah masih tinggi. Kita ingin meningkatkan lagi. Kalau sekarang sekian persen misalnya, besok mestinya itu lebih baik dan lebih tinggi lagi persentasenya," ungkapannya dalam Talkshow TokTok Kominfo Eps. 74, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (20/08/2021).

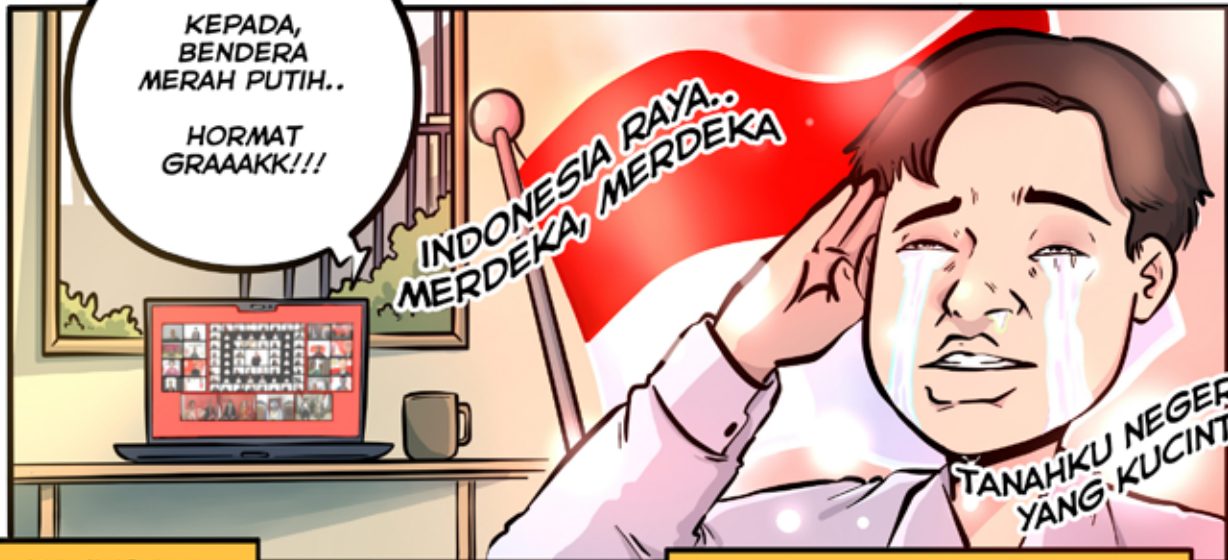
HARI INI 17 AGUSTUS 2021, TAHUN KEDUA KITA SEMUA MERAYAKAN KEMERDEKAAN DI MASA PANDEMI



UPACARA PUN DILAKUKAN SECARA VIRTUAL VIA ZOOM. TENTU HAL INI TIDAK MENGURANGI MAKNA HARI KEMERDEKAAN



KEPADA, BENDERA MERAH PUTIH..  
HORMAT GRAAAKK!!!



INDONESIA RAYA..  
MERDEKA, MERDEKA

TANAHKU NEGERIKU  
YANG KUCINTA

APA YANG AKU LAKUKAN.. MEMBUAT TEMAN-TEMAN KANTOR SALUT DAN HERAN, KARENA AKU TERLIHAT SANGAT MENDALAMI MOMEN KEMERDEKAAN INI.



DI BULAN YANG SAMA DENGAN HARI KEMERDEKAAN, AKU MENERIMA UNDANGAN NIKAH DARI MANTANKU, YAYUK



AIR MATAKU BAHKAN TAK BISA BERHENTI MENGALIR.. TERASA SEDIH, TERHARU, SEOLAH TERTUSUK TEPAT DI DADA

BERUNTUNG, AIR MATAKU SAAT MENDENGAR LAGU KEBANGSAAN TELAH MENGKAMUFLASE KESEDIHANKU KARENA DITINGGAL NIKAH YAYUK YANG KUSAYANG.



# 10 Hoaks Terviral Bulan Agustus 2021



# 1

## [HOAKS] Kuota 150 GB dari Kementerian Kominfo

Beredar narasi di media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahwa dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan operator jaringan seluler memberikan kuota internet 150 GB secara gratis mulai tanggal 17 Agustus 2021. Dalam pesan tersebut juga disebutkan syarat untuk mendapatkan kuota gratis beserta sebuah link tautan.



Faktanya, klaim bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan kuota internet 150 GB secara gratis mulai tanggal 17 Agustus 2021 adalah salah. Diklarifikasi langsung oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi bahwa saat ini Kemkominfo tidak memiliki program pemberian kuota sebesar 150GB dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Semua informasi terkait Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diakses melalui laman [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).



## 2

### [HOAKS] Vaksinasi Covid-19 Membuat Banyak Orang Terpapar Varian Delta dan Lebih Rentan Meninggal

Beredar sebuah pemberitaan terkait vaksinasi yang dimuat oleh salah satu website yang mengklaim bahwa orang yang sudah divaksinasi lengkap atau mendapatkan dua dosis, lebih banyak terpapar varian Delta dan lebih rentan untuk meninggal. Hal tersebut juga diklaim berdasarkan data dari Public Health England (PHE).

Dilansir dari laman [turnbackhoax.id](http://turnbackhoax.id), diketahui klaim pada pemberitaan tersebut adalah salah dan tidak memiliki bukti. Public Health England (PHE) memberikan pernyataan yang dimuat oleh [apnews.com](http://apnews.com), bahwa pihak Public Health England (PHE) tidak pernah menunjukkan data orang yang divaksinasi lebih rentan meninggal akibat varian Delta virus Corona. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa vaksinasi dengan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sangat efektif mengurangi gejala Covid-19 varian Delta.

## 4

### [HOAKS] Video Pesan Suara dari Direktur RS Medika Bondowoso dr. Yahya Amar

Beredar unggahan video berisi pesan suara di media sosial Facebook dan WhatsApp yang diklaim berasal dari dr. Yahya Amar, Direktur RS Medika Bondowoso, Jawa Timur. pesan suara tersebut berisi penjelasan yang menyebutkan bahwa virus Corona yang saat ini menyerang lambung bisa diobati dengan mengkonsumsi jamu AVC.

Faktanya, melalui akun Instagram @rsmitramedika, RS Mitra Medika Bondowoso membantah bahwa pesan suara dan video yang beredar tersebut merupakan suara dr. Yahya Amar. "Kami tegaskan suara yang ada dalam audio/video tersebut bukanlah suara beliau," tulis RS Mitra Medika, 26 Juli 2021. Pihaknya juga menerbitkan video dr. Yahya Amar agar publik bisa membedakan suara asli pemilik RS Mitra Medika Bondowoso tersebut, dengan suara yang beredar di Facebook dan pesan WhatsApp. Selain itu, klaim bahwa virus Corona yang saat ini menyerang lambung bisa diobati dengan jamu AVC juga keliru. BPOM belum memberikan izin pada jamu AVC sebagai obat Covid-19.

## 3

### [HOAKS] Vaksinasi Covid-19 Membuat Banyak Orang Terpapar Varian Delta dan Lebih Rentan Meninggal

Beredar sebuah video di media sosial yang menyatakan bahwa solusi mengendalikan pandemi adalah *herd immunity* alami bukan vaksin. Video tersebut menjelaskan bahwa di Amerika, kekebalan tubuh imunitas terhadap Covid-19 lebih dari 49,1% populasi ditambah yang telah berhasil divaksin adalah 13,7% populasi, maka Amerika saat ini sudah mendekati *herd immunity* dan mayoritas kekebalannya didapat dari alami atau natural *herd immunity*. Jika pandemi Covid-19 adalah bencana alam (natural disaster), maka sesungguhnya kesembuhan alami adalah *herd immunity* natural juga untuk mengalahkannya.

Berdasarkan klarifikasi dari Kementerian Kesehatan RI, informasi dalam video tersebut keliru. *Herd immunity* atau kekebalan kelompok adalah adanya perlindungan dari penyakit infeksi secara tidak langsung saat mayoritas populasi memiliki kekebalan yang bisa didapat baik dari infeksi alami atau vaksin. Persentase orang yang harus memiliki kekebalan bervariasi pada tiap penyakit tergantung respon imun, efikasi vaksin, dan faktor-faktor lain. Membiarkan masyarakat terpapar alami dengan infeksi Covid-19 untuk mencapai *herd immunity* diperkirakan harus >70% populasi sakit dengan berbagai umur dan status kesehatan. Ini akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Ditambah lagi bila fasilitas kesehatan tidak memadai, akan terjadi kolaps dan semakin meningkatkan kematian baik dari populasi dengan sakit Covid-19 dan bukan Covid-19. Belum ada bukti secara ilmiah *herd immunity* bisa terbentuk secara alami karena masih minimnya pengetahuan mengenai respon imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 (seberapa kuat dan berapa lama imunitas bertahan) dan sulitnya mengukur perilaku manusia. Selain itu, secara moral/etik, sangat bertentangan karena harus membiarkan manusia sakit dan meninggal terutama populasi rentan. Sedangkan dengan vaksinasi, meskipun terjadinya *herd immunity* juga masih sulit diperkirakan, paling tidak akan mengurangi risiko kesakitan dan kematian terutama pada populasi "rentan".

## 5

### [HOAKS] Madagaskar Keluar dari WHO Karena Skandal Covid-19

Beredar sebuah pesan WhatsApp berisi narasi yang berjudul "BREAKING: MADAGASKAR KELUAR DARI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA ATAS Skandal COVID-19."

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Madagaskar menyatakan diri keluar dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, adalah salah. Isu senada sempat beredar pada Mei 2020 lalu. Namun berdasarkan ulasan yang dimuat AllAfrica.com, Madagaskar saat ini terdaftar di bawah negara-negara Afrika tempat WHO beroperasi, hal itu menunjukkan bahwa Madagaskar masih menjadi anggota organisasi tersebut.

## 6

### [HOAKS] Honda Bagi-Bagi Hadiah Rayakan HUT ke-70

Beredar informasi di media sosial mengenai Honda membagikan sejumlah hadiah dengan cara mengisi survei sebagai rangkaian dari perayaan HUT Honda ke-70. Penerima diminta untuk mengklik tautan yang ada dalam pesan tersebut. Ketika diklik akan muncul pemberitahuan untuk mengisi survei dan pihak Honda sudah menyiapkan hadiah menarik bagi pemenang.

Dikutip dari liputan6.com, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect, Motor Yusak Billy, mengatakan bahwa kabar tentang Honda membagikan hadiah dengan cara mengisi survei sebagai perayaan HUT ke-70 adalah hoaks. Yusak memastikan bahwa pesan berantai itu bukan berasal dari Honda. Ia meminta masyarakat untuk tidak menanggapi dan merespons pesan berantai tersebut.



## 7

### [HOAKS] Larangan Mengonsumsi Makanan/Minuman Beralkohol dan Soda setelah Vaksin Covid-19

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp mengenai informasi larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan soda setelah vaksin Covid-19.

Dikutip dari situs covid19.go.id, belum ada hasil penelitian yang membuktikan konsumsi makanan dan minuman beralkohol dan minuman bersoda setelah divaksin Covid-19 dapat berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Dilansir dari Kompas, ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret, dr. Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan bahwa larangan mengonsumsi makanan dan minuman beralkohol seperti tape bergantung pada kondisi kesehatan yang melatarbelakangi setiap orang, bukan karena dapat mempengaruhi keefektifan vaksin.

Sedangkan, terkait dengan minuman bersoda, melansir dari The New York Times, salah satu peneliti dari Departemen Kesehatan Umum Universitas Harvard, Vasanti S. Malik menyatakan bahwa mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama memang berbahaya bagi kesehatan, bukan karena minuman bersoda dapat mempengaruhi keefektifan vaksin.



## 8 [HOAKS] Video SBY Dalangi Aksi Mahasiswa Menolak Kebijakan PPKM

Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan aksi sejumlah mahasiswa dan diklaim sebagai aksi penolakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang didalangi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Video tersebut dibagikan dengan keterangan bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan otak di balik aksi mahasiswa tersebut dan ikut mendanai aksi itu hingga Rp 190 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim aksi mahasiswa menolak kebijakan PPKM yang didalangi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keliru. Menkopolkum Mahfud MD dalam satu siaran televisi nasional mengatakan, aksi penolakan kebijakan PPKM merupakan aksi iseng yang dilakukan kelompok yang tidak murni. Aksi ini tidak ada tokoh yang menggerakkan dan mendanai. Polisi bahkan tidak pernah memberikan izin untuk aksi apapun selama pandemi. SBY sendiri membantah tuduhan tersebut dan memilih diam. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan diam dan tidak akan merespon tuduhan tersebut. SBY lebih memilih melakukan hal positif di tengah pandemi.

## 9 [HOAKS] Setelah Divaksin Bisa Sebabkan Hasil Tes Covid-19 Positif

Beredar informasi di media sosial Twitter bahwa ada seorang yang sebelum divaksin melakukan test Covid-19 dengan hasil negatif, namun setelah divaksin mengalami panas dingin, diare serta badan gemetar. Kemudian hari ke-3 pasca vaksin melakukan tes Covid-19 kembali dan hasilnya menjadi positif.

Faktanya, dilansir dari kompas.com, ahli patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret, dr. Tonang Dwi Ardyanto menyebutkan hal itu tidak benar. dr. Tonang menjelaskan, virus non aktif yang ada dalam vaksin tidak akan menyebabkan hasil tes Covid-19 baik Antigen atau RT-PCR menjadi reaktif atau positif. Lebih lanjut, dr. Tonang menegaskan jika seseorang mendapati hasil tes Covid-19 yang dilakukannya positif setelah melakukan vaksin, itu dikarenakan ia telah terpapar virus tanpa ia sadari.

## 10 [DISINFORMASI] WHO Temukan Vaksin Covid-19 Palsu dan Beredar di Indonesia

Beredar sebuah tangkapan layar artikel berita berisi informasi yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin Covid-19 palsu dan telah beredar di Indonesia. Artikel berjudul "WHO Pergoki Vaksin Covid-19 Palsu, Salah Satu Jenisnya Beredar di Indonesia" itu juga menyebut ada dua jenis vaksin Covid-19 yang dipalsukan, yakni AstraZeneca dan Covishield dari India.

Dikutip dari antaranews.com, informasi tentang WHO menemukan vaksin Covid-19 palsu itu termasuk kabar yang tidak lengkap. WHO melalui situs resminya tidak menyebut produk Covishield, vaksin ChAdOx1 produksi Serum Institute of India beredar di Indonesia. WHO menyebutkan negara yang terdeteksi produk palsu vaksin Covid-19 Covishield, vaksin ChAdOx1 adalah Uganda dan India.





# DIRGAHAYU INDONESIA

76<sup>TH</sup>  
INDONESIA TANGGUH  
INDONESIA TUMBUH

